

**MEKANISME KERJA HUMAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DALAM MEMBUAT KONSEP PIDATO GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi  
di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH:**

**ELLA NOVIA SARI**  
**10943005466**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim...**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karna berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun judul skripsi adalah **“Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau Dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur Dan Wakil Gubernur”**. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta yang tiada lelah memberikan motivasi baik moril maupun non moril. Serta kasih sayang yang terus mengalir kepada ananda tiada tergantikan oleh siapapun.
2. Adinda Mohd. Ghazali dan Mohd. Ilham yang selalu memberikan semangat kepada kakanda, terimakasih atas rasa bangga dan hormat kalian kepada kakanda.
3. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir Karim, sebagai Rektor UIN SUSKA Riau beserta Wakil Rektor I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKARiau.

4. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim, MA sebagai ketua Jurusan Ilmu Komunikasi beserta anggota yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
6. Bapak Drs. Suhaimi, D.M.Si dan Bapak Yantos, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing skripsi penulis
7. Ibu Listiawati Susanti, M.ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Komunikasi.
8. Ibu Vera Sardila, M.Si selaku pimpinan pustaka dan M. Fahmi selaku karyawan pustaka yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
9. Bapak Toni Hartono, M.Si sebagai dosen mata kuliah Kapita Selekta yang memberikan pemahaman serta arahan kepada penulis selama menjalani mata kuliah Kapita Selekta sehingga penulis bisa mengerti arah Proposal dan Skripsi

10. Bapak Elfriandri, M.Si sebagai penguji ujian munaqasah, terimakasih telah membimbing penulis dalam membuat skripsi ini sehingga penulis menjadi paham.
11. Humas Pemerintah Provinsi Riau khususnya bagian TU dan Bagian Publikasi yang senantiasa memberikan informasi guna menunjang data dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dan senantiasa disamping penulis baik dalam keadaan susah maupun senang yakni Mela Karmila, Rina Saltira, Annisa Azizah, dan Fitri Afrianti. Rangkaian warna warni persahabatan kita semoga terus terukir dihati meskipun nantinya kita akan terpisah oleh ruang dan waktu.
13. Kakanda Riki Slamet Riadi yang selalu ada di saat penulis dalam senang dan susah. Selalu memberikan motivasi yang tiada henti, keberhasilan ini juga untuk mu. Semoga hubungan kita selalu mendapat berkah oleh Ilahi Robbi.
14. Teman-teman bermain yang selalu mengisi hari-hari penuh ceria yakni Febriska Fista, Syifa Maria, Husni Toyib, Eno Jaya Putra, Agung Riadi, Sutomo, Idris Pasharibu, Ferdian Kurnia, dan Yogi Busada. Maaf selama ini mungkin penulis selalu membuat jengkel dan kesal namun semua itu penulis lakukan untuk membuat ikatan pertemanan kita menjadi erat.
15. Rekan seperjuangan Ilmu Komunikasi angkatan 2009, semoga kita semua kelak menjadi orang yang sukses.

16. Selanjutnya kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara tenaga, maupun material.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu teguran atas segala kekurangan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin ya robbal'alamin.

Pekanbaru, 07 juni 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GANBAR.....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |             |
| A. Latar Belakang .....                               | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....                         | 4           |
| C. Penegasan Istilah.....                             | 4           |
| D. Permasalahan.....                                  | 4           |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....               | 6           |
| F. Kerangka Teoritis.....                             | 8           |
| G. Konsep Operasional .....                           | 36          |
| H. Metode Penelitian.....                             | 38          |
| I. Tehnik Analisis Data.....                          | 41          |
| J. Sistematika Penuilisan .....                       | 41          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>         |             |
| A. Sejarah Provinsi Riau.....                         | 43          |
| B. Letak Geografis Provinsi Riau .....                | 52          |
| C. Visi dan Misi Riau .....                           | 55          |
| D. Keberadaan Humas Di Pemerintah Provinsi Riau ..... | 58          |
| E. Tugas Pokok dan Fungsi Humas.....                  | 59          |

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

|   |     |
|---|-----|
| A. Mekanisme Kerja Humas .....                        | 70  |
| 1. Penyusunan <i>Out Line</i> .....                   | 71  |
| 2. Mengumpulkan Data/ Informasi .....                 | 77  |
| 3. Menyusun Draf Pidato .....                         | 81  |
| 4. <i>Editing</i> Pidato.....                         | 81  |
| 5. Verifikasi Konsep Pidato .....                     | 99  |
| 6. <i>Finishing</i> Pidato .....                      | 100 |
| 7. Publikasi – Penyerah Pidato.....                   | 100 |
| B. Kendala-Kendala dalam Pembuatan Konsep Pidato..... | 101 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

|  |     |
|--|-----|
| A. Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato | 103 |
|--|-----|

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 133 |
| B. Saran.....       | 135 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

**MODEL ARISTOTELES .....33**  
**STRUKTUR ORGANISASI**



## **ABSTRAK**

### **MEKANISME KERJA HUMAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MEMBUAT KONSEP PIDATO GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Bagian Publikasi merupakan salah satu bidang yang bernaung dibawah Humas Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu tugas pokok Bagian Publikasi adalah membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Membuat Pidato pejabat bukanlah hal yang mudah karena staff editor harus mampu membuat konsep pidato sebaik mungkin, dan dari konsep pidato tersebut akan dinilai langsung oleh atasan, dan akan dijadikan salah satu tolok ukur kepakaran, kemampuan, dan keterampilannya dalam melaksanakan seluruh tugas. Mekanisme kerja pembuatan konsep pidato inilah yang dikaji oleh penulis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam metode penelitian tersebut yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Rekam kemudian direduksi dan dianalisis dalam bentuk kata-kata, diedit dan dapatlah kesimpulan dan hasil.

Tugas mengenai pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur diatur oleh Peraturan Gubernur No 11 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme Kerja Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 7 tahapan yaitu: menyusun out line pidato, mengumpulkan data atau informasi, menyusun draf pidato, *editing* pidato, verifikasi pidato, *finishing* pidato, dan Publikasi-penyerah.

Analisa penulis berdasarkan teori dapat disimpulkan bahwa konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah cukup baik karena telah memenuhi Kriteria prinsip penyusunan naskah pidato yang terdiri dari kesatuan, hubungan dan penekanan. Namun juga ada beberapa hal yang belum diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, sistem lambang dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur masih salah karena tidak menggunakan sistem lambang atau kombinasi hal tersebut akan berakibat fatal karena akan dapat membuat bingung Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu juga mengumpulkan data dan informasi melalui buku atau studi literatur masih belum diterapkan. Dilain sisi, data penunjang melalui buku akan membuat konsep pidato yang lebih berkualitas. Dimana isi pidato tersebut akan menggambarkan bahwa orator memiliki pengetahuan yang luas dan kredibilitas yang tinggi.

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat baku , Resmi dan tidak berubah. Pidato umum tidak dapat diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur karena pidato Pejabat telah ditetapkan formatnya. Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikerjakan oleh Bagian Publikasi diberikan jangka waktu yang sangat singkat sehingga membatasi daya piker dan konsentrasi staff editor. Selain waktu yang relative singkat, terkadang kekurangan isi juga menjadi masalah dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan wakil Gubernur.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah berbeda dengan Humas Non Pemerintah, dimana Humas Pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan, namun Humas Pemerintah juga senantiasa menggunakan tehnik publisitas dalam menginformasikan kegiatan Pemerintah.

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi dinas Pemerintah dan lembaga non Pemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial (Ruslan, 107: 2001).

Adanya unit kehumasan pada setiap instansi Pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun ke luar yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas merupakan alat untuk memperlancar jalannya interaksi pada serta penyebaran informasi melalui pers, radio, televisi dan media lainnya.

Pejabat pemerintah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur selalu melakukan rutinitas baik didalam maupun diluar. Aktivitas pejabat yang padat dan selalu menghadiri berbagai kegiatan diluar merupakan sorotan public dan pers. Maka seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dituntut untuk sesempurna mungkin didepan khalayak. apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian didepan forum maka menjadi sorotan media dan akan berakibat fatal terhadap *image* atau citra.

Umumnya pejabat pemerintah muncul dihadapan forum menggunakan naskah pidato dengan membacanya. Jarang sekali pejabat pemerintah menggunakan *impromptu* atau *ad libitum*, yakni penyampaian pidato tanpa naskah.

Pada umumnya pejabat pemerintah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki staff ahli mengenai pembuatan naskah pidato oleh tim penyusun pidato yang khusus diangkat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atau ditetapkan sebagai *Public Relations Officer*(PRO). Oleh karena itu, bagi seorang PRO pengetahuan menyusun naskah pidato sangatlah penting. Hasil karyanya, sebagai salah satu kegiatan operasionalisasi Public Relations (PR) yang akan dinilai langsung oleh atasan dan akan dijadikan salah satu tolok ukur kepakaran, kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan seluruh tugasnya.

Salah satu bidang Humas Pemerintah Provinsi Riau memiliki Bagian Publikasi yang memiliki tugas salah satunya adalah membuat

konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Humas Pemerintah Provinsi Riau tentunya memiliki tanggung jawab dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai kegiatan-kegiatan. tentunya bagian publikasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi tugasnya sebagai konseptor.

Pembuatan konsep pidato hendaknya dipersiapkan dalam jangka waktu yang lama hal ini bertujuan agar isi (*content*) dapat ditunjang dan bersamaan dengan data yang telah ada, selain itu tentunya isi pidato akan lebih berkualitas.

Hal ini juga didukung oleh Nasihat Culloght, (Rakhmat, 1986 :32) tentang pidato adalah sebelum anda berpidato, jauh-jauh hari sebelumnya sudah mulai mempersiapkan diri sedikit demi sedikit, maka akan menarik keuntungan besar dari persiapan yang seperti itu.

Tuntutan waktu membuat Humasharus menyelesaikan pidato dalam waktu yang relatif singkat bahkan Bagian Publikasi dapat menyelesaikan 20 Naskah dalam sehari. Sedangkan menurut teori pembuatan naskah itu harus dipersiapkan dalam waktu yang lama agar *content* (isi) dapat semenarik mungkin dikemas. Tidak dapat dibayangkan jika penyampaian pidato Gubernur dan Wakil Gubernur salah, tentunya akan dapat berpengaruh terhadap *image*, citra dan kewibawaan pejabat tersebut dan ini akan menjadi masalah besar dimana masyarakat akan kurang memperdulikannya.

Permasalahan ini tentu saja memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkajinya, yakni selain ingin memberikan informasi mengenai tugas hubungan masyarakat Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat, serta bagaimana kinerja dan sistematis pembuatan pidato pada Bidang Publikasi di Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan untuk diteliti lebih jauh tentang peranan Humas Pemerintah Provinsi Riau dengan judul : **“Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau Dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur”**.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Pidato sangat penting karena dapat menentukan citra dan dijadikan tolok ukur atas kemampuan seorang pemimpin.
2. Humas berperan aktif dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menampung segala aspirasi masyarakat.

## **C. Penegasan Istilah**

1. Mekanisme Kerja adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas

sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu tatanan, komunikasi, dan profesional.

2. Humas (*Public Relations*) menurut Dr. Rex F Harlow, mendefinisikan Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan khalayaknya. Melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini public, menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama (Effendi, 2002: 21).
3. Pemerintah Provinsi adalah suatu organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Bagian Publikasi merupakan salah satu bidang yang berada dibawah Humas Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas *editor* untuk membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk orang banyak.

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam permasalahan ini penulis mengambil pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan membuat konsep pidato secara cepat sehingga mengerjakan konsep pidato secara terburu-buru.
- b. Kurangnya membuka studi literatur dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Seringnya petugas lembur hingga malam untuk menyelesaikan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

##### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi dalam membuat konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

##### **3. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah agar masalah dalam penelitian ini dapat terarah. Adapun yang



menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Mekanisme kerja dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur? Dan apa saja kendala atau hambatan dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mengetahui bagaimana Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai pendalaman terhadap ilmu PR
  - 2). Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya civitas akademika komunikasi mengenai realita tugas Humas Pemerintah Provinsi dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - 3) Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis guna memperdalam dan pengaplikasian ilmu dibidang kehumasan.

## b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pihak Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur
- 2) Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu komunikasi Uin Suska Riau

## **F. Kerangka Teoritis**

Pembahasan kerangka Teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **1. Pengertian Mekanisme Kerja**

Pengertian secara umum dari mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu tatanan, komunikasi, dan profesional.

Mekanisme kerja adalah cara kerja yang dilakukan suatu organisasi, cara kerja mesin. Daryanto dalam Murfhy (2009:6).

Mekanisme kerja merupakan bagaimana melaksanakan tugas untuk menyelesaikan, dalam proses pelaksanaan kerja tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, seseorang dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mempunyai pengalaman. Misalnya mekanisme kerja Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana Humas dituntut untuk se kreatif mungkin dan dapat menyelesaikan konsep pidato dalam waktu yang relatif singkat. Mekanisme kerja adalah cara yang dilakukan suatu organisasi atau cara kerja mesin. Hasan Alwi dalam Kurniati (2008:32).

Berbicara tentang mekanisme kerja, semua organisasi memiliki mekanisme kerja yang sama, hanya saja proses penerapan yang digunakan berbeda-beda menyesuaikan dengan tujuan dan anggota dalam organisasi.

Kerja adalah cara tugas-tugas digabungkan untuk menciptakan pekerjaan individu, tingkat fleksibilitas (keluwesan) yang dimiliki pegawai dalam pekerjaan, dan adanya sistem pendukung organisasi agar memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan kinerja. Kerja merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia. Desain pekerjaan berkaitan dengan penentuan struktur hubungan tugas dan hubungan antar pribadi dari suatu pekerjaan dengan menentukan berapa banyak keanekaragaman, tanggung jawab, signifikansi, dan otonomi pekerja diberikan oleh pekerjaannya. Desain pekerjaan berpengaruh besar terhadap efektifitas organisasi. Pekerjaan yang dirancang dengan baik akan dapat meningkatkan motivasi yang merupakan faktor penentu produk civitas

seseorang maupun organisasi. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan sejauh mana tuntutan tugas tersebut. Dengan berkembangnya organisasi dan perubahan faktor lingkungan menyebabkan organisasi perlu melakukan desain ulang terhadap pekerjaan.

Dua strategi utama dalam mendesain ulang pekerjaan adalah spesialisasi tugas atau sering juga disebut dengan penyederhanaan tugas (*Job Simplification*) dan pemekaran pekerjaan (*Job Enlargement*). Dua strategi ini saling bertentangan. Penyederhanaan pekerjaan adalah mengurangi jumlah elemen-elemen tugas yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan pemekaran pekerjaan adalah membuat tugas-tugas lebih kompleks dengan meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan tiap-tiap pekerja.

## **2. Definisi Humas**

Hubungan masyarakat disebut juga *public relation* (purel), dengan ruang lingkup (*scope*) kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu keluar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi.

Hubungan masyarakat merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan public di luar dan di dalam organisasi dengan jalan berkomunikasi. Sudah tentu komunikasi yang dilakukan tidak sembarangan, melainkan dengan cara-cara disertai seni-seni komunikasi

tertentu yang merupakan objek studi ilmu komunikasi yang disebut dengan teknik komunikasi. Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani, *technikos* yang berarti keterampilan.

Hubungan masyarakat juga sebagai metode komunikasi sering disebut humas sebagai lembaga (*public relations as state of being*). Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar. Karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin organisasi.

Menurut Edward L. Bernays mengatakan bahwa Humas memiliki tiga fungsi utama yaitu :

Memberikan Penerangan kepada masyarakat

- a. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- b. Usaha-usaha untuk pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan / lembaga kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada perusahaan dan lembaga. (Ruslan , 2003 : 19)

Yang menjadi tujuan kegiatan Humas adalah Usaha agar masyarakat sadar, sengaja, terencana dan terus menerus mengerti dan mengetahui kegiatan yang dilakukan organisasi atau lembaga. Selain itu, humas merupakan mediator yang berada diantara pimpinan organisasi

dengan publiknya. Baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal.

Kegiatan utama dari Humas dalam mewakili top management suatu lembaga atau organisasi merupakan bentuk kegiatan *two way communications* adalah ciri khas dari fungsi dan peranan Humas. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas Humas bertindak sebagai nara sumber informasi (*source of informations*) dan merupakan saluran informasi (*Channel of informations*).

Humas dalam pemerintahan merupakan wadah yang memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai penyebar informasi dan corong dari pemerintahan. Dalam perkembangan humas masih merupakan permasalahan, baik berupa hambatan, tantangan dan rintangan, di masa belum ada keseragaman masing-masing humas khususnya Humas Pemerintah.

Walaupun kita menyadari Humas bagian yang tidak dapat diabaikan dan perlu disadari pentingnya peranannya. Tugas perangan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi pembangunan bangsa. Humas merupakan bagian dari tugas penerangan dan perlu disadari sedalam-dalamnya bahwa tugas penerangan itu merupakan bagian dari pembangunan sendiri. Karena penerangan merupakan bagian dari komunikasi sosial dan komunikasi sosial ini harus berkembang antara pemerintah dan masyarakat dan antar kelompok masyarakat itu. Jadi dengan demikian Humas dapat diartikan: Suatu kegiatan untuk

menanamkan pengertian guna memperoleh *good will*, kerjasama dan kepercayaan yang ada gilirannya mendapat dukungan dari pihak lain.

### **3. Biro Konsultan Humas**

#### **a. Pengertian Biro Humas**

Praktek konsultasi Humas adalah penyelenggaraan jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, serta di dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum.

Sebagian besar Humas hanya melayani sebagian fungsi-fungsi humas. Sementara itu cukup banyak biro-biro iklan yang berani menawarkan jasa humas. Namun pada umumnya, Humas itu bersifat independen, tidak berada di bawah atau menjadi suatu bagian dari biro iklan. Dalam menjalankan operasi-operasinya, mereka biasanya mengkhususkan diri pada subbidang tertentu saja mengingat cakupan fungsi kehumasan memang sedemikian luasnya.

### **4. Tujuan Humas**

Mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pihak lain yakni publik (umum, masyarakat). Tujuan Humas adalah untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi budi yang menyenangkan bagi

lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbale balik.

## **5. Prinsip Pokok Humas**

- a. Bahwa “Humas bertolak dari dalam Organisasi”. Berhasil tidaknya hubungan suatu organisasi dengan masyarakat sangat di pengaruhi oleh “SIKON” di dalam (intern) organisasi yang bersangkutan.
- b. Bahwa “Tindakan-tindakan membawa nama keseluruhan”. Tindakan-tindakan humas sebenarnya bukan saja dilakukan oleh unit kerja humas sendiri, tetapi juga oleh seluruh jajaran organisasi.

Tugas kehumasan pemerintah meliputi tugas strategis dan taktis. Dimana tugas strategis meliputi tugas yang mengikutsertakan humas dalam *decision making process*, sedangkan tugas taktis meliputi memberikan informasi, memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbale balik, membuat citra yang baik. Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijaksanaan pemerintah. agar dapat menjalankan tugas “taktis” secara baik maka tugas “strategis” perlu dimiliki oleh humas. Tugas strategis ini sangat penting, mengingat humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan coordinator lalu lintas informasi dengan masyarakat. dengan demikian humas akan selalu dapat mengetahui latar belakang dari pada suatu kebijaksanaan dan keputusan yang diambil.



## **6. Konsep dan Teori Informasi**

### **a. Pandangan Tentang Informasi**

Meski semua orang tahu bahwa informasi merupakan unsur dasar dalam komunikasi, tetapi tidak seluruh orang sepakat mengenai pengertian informasi itu sendiri. Ada yang mengaitkan dengan hal-hal baru yakni seperti orang yang membaca berita-berita di surat kabar atau majalah. Ada pula yang menyamakannya dengan ilmu pengetahuan misalnya informasi yang dikandung sebuah buku ilmiah. Ada lagi yang mengidentikkan dengan data dan angka-angka hasil penelitian. Bahkan ada pula yang menyebut isu yang tidak diketahui hubungannya disebut juga sebagai informasi.

Untuk memperluas pemahaman, Fisher dalam Rakhmat (2004:28) mengelompokkan berbagai pandangan mengenai konsep informasi antara lain: pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. manakala seseorang berbincang dengan lawan bicara; pada saat membaca Koran, majalah, buku, selebaran, spanduk, papan reklame; atau pada waktu mendengarkan radio atau menonton televisi, ketika itulah sejumlah data dan fakta dapat diingat dan disimpan dalam memori ingatan.

Dalam pandangan pertama ini, informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik lain,

dari suatu medium ke medium lain, dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, informasi identik dengan wujud material yang dapat dikirimkan dan diterima melalui berbagai saluran, baik melalui media massa seperti surat kabar, radio dan televisi atau media komunikasi lainnya seperti telepon, facsimile, surat, telegram, kartu, gambar, buku, maupun komunikasi tatap muka, dan bahasa isyarat.

Kedua, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan makna data. Menurut pandangan ini, informasi berbeda dengan data. Informasi adalah arti, maksud atau makna yang dikandung data. Dalam hal ini peranan seseorang untuk memberikan makna pada data memegang posisi yang sangat penting. Suatu data baru dikatakan mempunyai nilai informasi jika dianggap memiliki arti oleh penafsirnya.

#### b. Masalah Bahasa dalam Komunikasi

Bahasa merupakan factor yang sangat penting dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, Kita tidak dapat berkomunikasi. Dua jenis bahasa yang dikenal dalam komunikasi, Yaitu bahasa verbal (lisan) dan bahasa nonverbal (tulisan, symbol, isyarat). Fungsi bahasa dalam komunikasi adalah untuk mengirimkan pesan.

Menurut Rakhmat (Rakhmat, 1988:118), Ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa. *Pertama*, definisi fungsional yang melihat bahasa sebagai alat yang dimiliki bersama (*socially shared means*) untuk mengungkapkan gagasan. Artinya bahasa hanya dapat dipahami bila ada

kesempatan di antara anggota-anggota kelompok social untuk memakainya.

*Kedua*, definisi formal yang mengatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Artinya kata-kata itu memiliki makna, dan kata-kata tersebut disusun menurut tata bahasa yang berlaku. Setiap bahasa memiliki peraturan penyusunan bahasa (*grammer*) masing-masing.

Hubungan masyarakat (Humas) merupakan bidang yang selalu melakukan kontak langsung dengan pimpinan. Segala aktivitas pimpinan selalu didampingi oleh pihak hubungan masyarakat. Oleh karena itu, maka hubungan masyarakat diberikan delegasi tugas yang salah satu nya adalah membuat konsep pidato.

## **7. Pengertian Menulis Naskah**

Naskah. dengan Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian kemampuan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis paling akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting.

Dalam menulis semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil yang benar-benar baik. Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa menulis dapat diartikan sebagai

kegiatan menuangkan ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai.

Menurut Djago Tarigan dalam Elina Syarif, Zulkarnaini, Sumarno menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Lado dalam Elina Syarif, Zulkarnaini, Sumarno juga mengungkapkan pendapatnya mengenai menulis yaitu: meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain.<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>

Menulis dapat dianggap sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Menurut Heaton dalam St. Y. Slamet menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks.

Menurut Gebhardt dan Dawn Rodrigues *writing is one of the most important things you do in college*. Menulis merupakan salah satu hal paling penting yang kamu lakukan di sekolah. Kemampuan menulis yang baik memegang peranan yang penting dalam kesuksesan, baik itu menulis laporan, proposal atau tugas di sekolah.

Pengertian menulis diungkapkan juga oleh Barli Bram *in principle, to write means to try to produce or reproduce written message*. Barli Bram mengartikan menulis sebagai suatu usaha untuk membuat atau mereka ulang tulisan yang sudah ada.

Menurut Eric Gould, Robert Diyanni, dan William Smith menyebutkan *writing is a creative act, the act of writing is creative because its requires to interpret or make sense of something: a experience, a text, an event*. Menulis adalah perilaku kreatif, perilaku menulis kreatif karena membutuhkan pemahaman atau merasakan sesuatu: sebuah pengalaman, tulisan, peristiwa.

M. Atar Semi dalam bukunya mengungkapkan pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Burhan Nurgiantoro menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa.

Menulis menurut Mc Crimmon dalam St. Y. Slamet merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. St. Y. Slamet sendiri mengemukakan pendapatnya tentang menulis yaitu kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks.  
<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>

## **8. Pengertian Pidato**

Di kalangan para ahli pidato, atau orator, atau retor terdapat suatu pemeo sebagai pegangan yang berbunyi “*Quit Ascendit Sine Labore, Descendit Sine Honore*”. Yang memiliki arti “ siapa yang naik tanpa kerja , akan turun tanpa kehormatan”

Dalam hubungannya dengan pidato, makna *pemeo* tersebut ialah bahwa seseorang yang berpidato tanpa melakukan persiapan, akan mengalami kegagalan, jika gagal maka kehormatannya akan jatuh. Oleh karena itu, seseorang sebelum naik ke mimbar harus melakukan persiapan terdahulu secara seksama.

Hal ini juga didukung oleh Nasihat Culloght dalam Rakhmat (2004:32) tentang pidato adalah sebelum anda berpidato, jauh-jauh hari sebelumnya sudah mulai mempersiapkan diri sedikit demi sedikit, maka akan menarik keuntungan besar dari persiapan yang seperti itu.

**Pidato** adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya.

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau bisa dikatakan sebagai *public speaking*. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak, dengan maksud agar pendengar pidato dapat mengetahui, memahami, menerima serta diharapkan bersedia melaksanakan segala sesuatu yang disampaikan terhadap mereka.

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau

berbicara yang baik di depan publik / umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik.

## **9.Prinsip Penyusunan Naskah Pidato**

Prinsip penyusunan naskah pidato secara garis besar terdiri dari:

- a. Kesatuan (*Unity*)
- b. Hubungan (*Coherence*)
- c. Penekanan (*Emphasis*)(Rumpoko, 2012:32).

Naskah pidato secara umum terdiri dari tujuan, materi atau isi dan sifatnya pesan dari isi pidato tersebut. Pidato tentu harus mempunyai tujuan, dan itu jelas tercermin dari naskah pidatonya. Tujuan yang tersurat dari naskah pidato harus jelas, tidak menimbulkan kebingungan, tanda Tanya atau persepsi yang berbeda dari sekalian para pendengar. Oleh karena, tujuan dari pidato harus disampaikan secara jelas, gamblang dan tuntas.

Perihal materi atau isi harus mempunyai satu gagasan yang mendominasi seluruh uraiannya. Pemilihan bahan-bahan penunjang atau pelengkap harus tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga akibatnya malah lebih dominan dibandingkan materi atau isi pidatonya sendiri. Jika hal ini yang terjadi, maka hanya akan menimbulkan kebingungan dari para pendengarnya karena mereka menjadi sulit menangkap isi pidato yang disampaikan.

Satu naskah pidato yang baik, harus mempunyai hubungan antara urutan bagian dari uraian yang berhubungan atau berkaitan satu dan lainnya harus terungkap secara jelas, sehingga keseluruhan pembicaraan dapat dimengerti serta dipahami dengan jelas lagi baik oleh sekalian para pendengarnya.

Seorang orator yang baik harus mampu dan dapat menunjukkan kepada sekalian para pendengarnya bagian-bagian yang penting dari pidatonya akan dapat ditangkap, dimengerti serta dipahami oleh sekalian para pendengarnya tersebut.

Dalam penulisannya dalam naskah pidato, hal-hal yang perlu untuk diterapkan ini ditebalkan, dimiringkan atau juga diberi baris bawah, sehingga ketika menyampaikan pidato, orator mengetahui bahwa ia harus menekankan bagian yang bertanda khusus tersebut kepada para pendengarnya.

## **10. Sistematika Pidato**

Naskah pidato sudah tentu harus komunikatif, karena itu harus disusun secara konseptual sistematis. Secara retorika susunan pidato terdiri atas empat bagian :

- a. Pendahuluan,
- b. Penampilan masalah,



c. Penegasan argumentative,

d. Kesimpulan (Rumpoko, 2012:40)

Fungsi bagian *pendahuluan* adalah sebagai upaya menyiapkan para hadirin secara psikologis mengenai hal atau masalah pokok yang akan di kemukakan. Suatu pidato akan membangkitkan perhatian para hadirin apabila masalah yang ditampilkannya menyentuh kebutuhan dan kepentingannya.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memikat perhatian hadirin, antara lain :

a. Menampilkan kutipan pendapat seorang ahli atau tokoh,

b. Mengajukan pertanyaan,

c. Menyajikan ilustrasi yang spesifik,

d. Memberikan fakta yang mengejutkan (*surprise*),

e. Mengetengahkan hal yang mengandung rasa insani (*human interest*),

f. Mengemukakan hal yang ganjil.

Dari susunan pidato *penampilan* masalah adalah bagian yang akan di tampilkan pokok pembahasan yang dalam pengurainnya harus bersifat persuasif, yakni mengandung ajakan atau bujukan untuk melaksanakannya.

Penampilan pokok pembahasan perlu diberi ilustrasi yang relevan dengan dipatri oleh ungkapan-ungkapan yang menyengat sehingga terasa oleh hadirin, betapa pentingnya masalah yang dibahas untuk dirinya, yang pada gilirannya penting untuk masyarakat atau Negara.

Selanjutnya bagian *argumenta* adalah yang berfungsi memberikan penegasan disertai pengungkapan mengenai cara melaksanakannya atau cara mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dijumpai. Jika berdasarkan pengalaman atau dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan cara pemecahan masalah yang dikemukakan itu, dibagian inilah dilakukan netralisasi, sehingga segalanya menjadi jelas bagi hadirin.

Bagian akhir dari suatu susunan pidato ialah kesimpulan berisi pelandasan. Bagian ini harus singkat, sederhana, dan merupakan kebulatan dari seluruh isi pidato.

Demikianlah beberapa hal mengenai penyusunan pidato yang sering menjadi tugas kahumas. Karena itu kahumas harus mengamati gaya pidato atasannya itu sehingga, dengan menghayati gayanya itu, akan menghasilkan susunan pidato yang memuaskan bagi sang pemimpin.

## **11. Sasaran dan Tujuan Pidato**

Sasaran utama pidato adalah untuk menyampaikan informasi, membangkitkan minat dan meraih simpati atau perhatian dari pendengar

sehingga isi pidato tersebut dapat diterima, diketahui, dipahami, serta akhirnya dilaksanakan dengan baik.

Menurut Luqman Hadinegoro (Rumpoko, 2011:15), seseorang orator harus mampu menyajikan isi pidatonya secara sistematis, runtut dan teratur serta menarik dengan diikuti cara penyajian yang juga harus baik sehingga minat dan perhatian dari pendengar akan tergugah dan tertarik menyimak pidato yang diberikan sang orator. Fungsi pidato sangat banyak dan beragam, yang kesemuanya akan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pidato tersebut.

Adapun fungsi-fungsi pidato tersebut di antaranya adalah :

- a. Memberikan Informasi (*to inform*)
- b. Menghibur (*to entertain*)
- c. Membujuk (*to persuade*)
- d. Menarik Perhatian (*to interest*)
- e. Meyakinkan (*to convince*)
- f. Memperingatkan (*to warn*)
- g. Membentuk Kesan (*to impress*)
- h. Memberikan instruksi (*to instruct*)
- i. Membangun Semangat (*to arouse*)
- j. Menggerakkan massa (*to move*), dan lain-lainnya (Rumpoko, 2012:16)

## 12. Pidato yang Memukau

Menurut seorang ahli komunikasi massa, Asul Wijayanto(Rumpoko, 2001:39), agar dapat memukau ada beberapa hal sangat penting berikut ini :

### a. Perhatikan Komunikator

Komunikator adalah pembicara yang akan menyampaikan pesan. Pembicara sebagai komunikator harus memperhatikan penampilan diri agar dapat berpidato dengan baik. Untuk itu, pembicara harus memperhatikan cara berpakaian cara berjalan menuju mimbar, cara berdiri di belakang mimbar, cara memandang pendengar untuk membina kontak bathin dan sebagainya.

Pembicara juga harus menguasai dan memahami benar apa yang akan dikatakan dan cara mengatakannya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pembicara biasanya hanya menyiapkan dengan matang apa yang akan dikatakan (isi pidato). Pembicara lupa bahwa cara mengatakannya pun harus dipersiapkan secara matang agar pidatonya mencapai hasil seperti yang diharapkan.

### b. Pesan adalah masalah yang dipidatoken atau isi pidato.

Pesan atau isi pidato juga harus diuraikan secara jelas agar pendengar sebagai penerima pesan dapat memahaminya.itulah

sebabnya isi pidato akan berupa penjelasan pendapat, alasan, dan bukti.

Tidak harus semua unsur itu ada dalam pidato. Sebab unsur-unsur yang ada dalam pidato dan kedalaman pembahasannya sangat bergantung pada waktu yang tersedia, situasi, pendengar, dan tujuan pidato.

#### c. Gunakan Sarana Secara Maksimal

Sarana adalah alat yang digunakan dalam berpidato seperti pengeras suara, OHP, dan benda peraga. Pembicara harus memahami cara menggunakan sarana dengan tepat. Sedikit saja melakukan kesalahan dalam menggunakan alat-alat itu, kelancaran pidato akan terganggu.

Pengeras suara memainkan peranan yang sangat penting dalam berpidato. Besarnya volume harus diatur sesuai dengan luasnya ruang dan banyaknya pendengar. Suara yang terlalu keras akan memekakan telinga. Sebaliknya, suara yang terlalu lemah menyebabkan pendengar tidak dapat menerima isi pidato dengan sempurna. Berkaitan dengan itu, pembicara harus mampu mengatur keras lemahnya suara agar sesuai dengan kebutuhan pendengar.

#### d. Lihat Respek Komunikatif

Komunikasikan adalah orang yang menangkap atau menerima pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dalam bahasa sehari-hari penerima pesan ini disebut pendengar. Pembicara yang ingin berhasil pidatonya harus berusaha mengetahui dan memahami pendengar. Karena pendengarsalah satu unsur yang penting dalam kegiatan berpidato.

### **13. Jenis-Jenis Pidato**

Menurut ada tidaknya persiapan, sesuai dengan cara yang dilakukan waktu persiapan, dapat dikemukakan empat macam pidato:

#### **a. Pidato tanpa Naskah (*impromptu*)**

Pidato tanpa naskah sering disebut pidato secara *impromptu* atau pidato secara *ad libitum*. Pidato dengan cara ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara mimbarawan dengan hadirin terjadi *personal contact* atau kontak pribadi dimana kedua pihak saling menatap. Selain itu hadirin akan menaruh kepercayaan penuh kepada mimbarawan, karena penyampaiannya merupakan pencetusan dari ide atau pemikirannya sendiri.

Kerugiannya sangatlah fatal apalagi bagi pemula pidato tentunya dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah, karena dasar pengetahuan tidak memadai. Impromptu mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat atau tidak lancer, gagasan yang disampaikan bisa

berantakan dan ngawur karena tidak adanya persiapan dan spontanitas, kemungkinan akan demam panggung.

b. Pidato dengan naskah (Manuskrip)

*Manuskrip* disebut juga pidato dengan naskah. juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Disini tidak berlaku istilah “menyampaikan pidato” tetapi “membacakan pidato”. manuskrip diperlukan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan kata saja dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat buruk pada pembicara. Manuskrip juga dilakukan oleh ilmuwan yang melaporkan hasil penelitian dalam pertemuan ilmiah.

Manuskrip tentu saja juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan-keuntungan adalah diantaranya kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali, kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan serta manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak.

Ditinjau dari komunikasi kerugiannya cukup berat diantaranya komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah

memperpendek atau memperpanjang pesan, pembuatannya lebih lama dan sekedar menyiapkan garis-garis besarnya (*Outline*) saja.

*c. Memoriter*

Pesan pidato ditulis dan kemudian diingat kata demi kata. Seperti manuskrip, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Tetapi karena pesan sudah tetap, maka tidak terjalin saling hubungan antara pesan dan pendengar, kurang langsung, memerlukan banyak waktu dalam persiapan, kurang spontan, perhatian beralih dari kata-kata kepada usaha mengingat-ingat. Bahaya terbesar timbul bila satu kata atau lebih hilang dari ingatan. Seperti penulisan manuskrip, maka naskah memoriter pun harus ditulis dengan gaya ucapan.

*d. Ekstempore*

Ekstempore adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Pidato sudah dipersiapkan sebelumnya berupa *out-line* (garis besar) dan pokok-pokok penunjang pembahasan (*supporting points*). Tetapi pembicara tidak berusaha mengingatnya kata demi kata. *out-line* itu hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran kita.



Keuntungan ekstempore ialah komunikasi pendengar dan pembicara lebih baik karena pembicara berbicara langsung kepada khalayak, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan.

Bagi pembicara yang belum ahli kerugiannya adalah persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru, pemilihan bahasa yang jelek, kefasihan yang terhambat karena kesukaran memilih kata dengan segera, kemungkinan menyimpang dari out-line, dan tentu saja tidak dapat dijadikan bahan penerbitan.

#### **14. Persiapan Menyusun Naskah Pidato**

Humas sebagai terjemah dari *public relations* dewasa ini sudah menjadi profesi yang bersifat ilmiah (*scientific*). Dalam ilmu komunikasi penulisan pidato termasuk *retorika*. Retorika mempunyai dua pengertian, secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit retorika adalah seni bicara didepan umum atau publik, singkatnya, retorika adalah pidato. Dalam pengertian luas retorika tidak hanya merupakan *seni bicara*, tetapi *seni menulis*.

Suatu pidato yang disusun oleh kehumasan untuk dibacakan atasannya, tidak hanya merupakan paparan informatif yang berisi keterangan atau penjelasan, tetapi persuasif, yakni mengandung ajakan atau bujukan sehingga para hadirin tergerak hatinya untuk melaksanakannya. Dalam hubungan dengan tugas penyusunan naskah

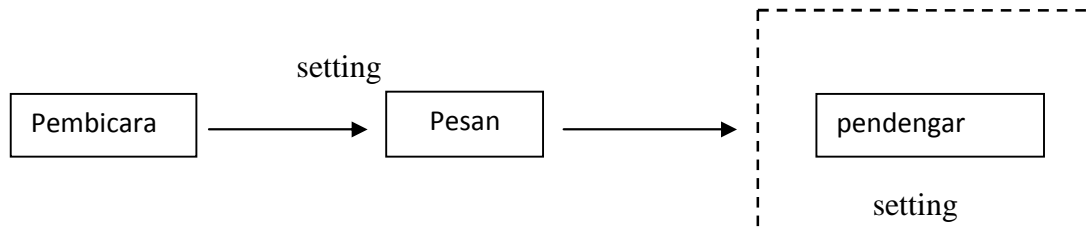
pidato, seorang kehumasan harus mengobservasi dan meneliti gaya bicara atasannya dalam suatu pertemuan intern, misalnya ketika memberikan *Briefing* kepada para pegawai.

Biasanya, jika seorang pejabat meminta dibuatkan naskah pidato kepada kehumasan, ia hanya menyebutkan topiknya disertai hal-hal tertentu yang dianggap penting untuk dijadikan bahan penyusunan. Oleh karena itu kahumas harus mempunyai data mengenai segala bidang guna menjadi penunjang naskah pidato yang disusunnya itu, sebab bobot suatu pidato ditentukan oleh data penunjangnya. Kahumas yang terampil akan menguasai salah seorang karyawannya untuk mengelola segala data yang mungkin pada suatu ketika diperlukan.

## **15. Model Aristoteles**

Model aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retorik (*rhetorical model*). Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dasar proses

komunikasi, yaitu pembicara (*speaker*), pesan (*message*) dan pendengar (*listener*).



Fokus komunikasi yang ditelaah aristoteles adalah komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan suatu keterampilan penting yang digunakan diperadilan dan dimajelis legislatur dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh karena bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, aristoteles tertarik menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato.

Menurut Aristoteles ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia. *Pertama*, harus sanggup menunjukkan kepada khalayak memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat (*ethos*). *Kedua*, harus menyentuh hati khalayak : perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang (*pathos*). *Ketiga*, meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti dilihat pada respon khalayak (*logos*).

Sebagai seorang orator, harus memiliki persyaratan meliputi aspek-

aspek psikis dan fisik, aspek teoritis dengan dilengkapi kegiatan praktek yang harus terdapat factor-faktor *Ethos, Pathos, dan Logos*.

***Ethos*** yang merupakan kredibilitas sumber (*Source Credibility*) dimana pengetahuan berlandaskan pendidikan formal ditambah hasil studi literature mengenai segala aspek kehidupan yang begitu mendalam dan meluas.

***Pathos*** menunjukkan imbauan emosional (*Emotional Appeals*). Dengan kata-kata yang terpilih, dengan kalimat yang bervariasi dalam menyampaikan orator dihadapan khalayak.

***Logos*** menunjukkan imbauan logis (*Logical Appeals*) yang diketengahkan dalam suatu pidato berdasarkan pemikiran yang mantap.

Menurut aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa anda (ethos-keterpercayaan anda), argumen anda (logos-logika dalam pendapat anda), dan dengan memainkan emosi khalayak (phatos-emosi khalayak). Dengan kata lain faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya dan cara penyampaianya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu dalam suatu keadaan emosi.

Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. Seseorang berbicara, pesannya berjalan kepada khalayak dan khalayak mendengarkan. Tahap-tahap dalam

peristiwa itu berurutan alih-alih terjadi secara simultan. Disamping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang bertujuan (disengaja) yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya.

Kelemahan lain model retorik ini adalah tidak dibahasnya aspek-aspek non verbal dalam persuasi. Meskipun demikian, kita harus bersifat adil untuk tidak menilai model komunikasi dengan perspektif kekinian. Jelas bahwa model aristoteles ini, telah mengilhami pakar-pakar komunikasi lainnya untuk merancang model komunikasi yang lebih baik. Kebanyakan model komunikasi lebih baru yang dikembangkan para ahli sejak zaman aristoteles tetap mengandung tiga unsur yang samayakni sumber yang mengirimkan pesan, pesan yang dikirimkan dan penerima pesan tersebut.

## **G. Konsep Operasional**

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih jelas maka perlu adanya konsep operasional. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan dan permasalahannya, maka konsep operasional peneliti dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator untuk mengukur permasalahan tersebut:

## **1. Indikator Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato**

### **Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:**

#### a. Menyusun *out line* pidato

- 1). Pembukaan
- 2). Tema
- 3). Isi pidato
- 4). Tujuan / Sasaran
- 5). Kesimpulan
- 6). Penutup

#### b. Mengumpulkan data atau informasi

- 1). Dokumen
- 2). SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 3). Mitra Kerja
- 4). Media
  - a). cetak
  - b). audio
  - c). audio visual
- 5). Buku / Literatur

c. Penyusun draf pidato

- 1). Pemilihan kata
- 2). Pemilihan kalimat atau bahasa

d. *Editing* pidato

- 1). SKPD
- 2). Mitra Kerja
- 3) *editing* Humas

e. Verifikasi konsep pidato

- 1). Kasubbag
- 2). Kabag Publikasi
- 3) Kepala Biro

f. *Finishing* pidato

- 1). Kepala Biro
- 2). Gubernur atau Wakil Gubernur.

g. Publikasi-penyerah pidato

- 1). Humas
- 2). Ajudan Gubernur

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Riau tepatnya di Bidang Publikasi Kantor Gubernur Jln. Jendral. Sudirman No. 460 Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Humas Pemerintah Provinsi Riau.

#### **b. Objek**

Dalam penelitian ini adalah Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Utama (*Key Informan*)**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, atau orang yang diwawancarai, serta dokumen (Moleong,



2004: 157). Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Publikasi, Kasubbag Editor dan 3 orang Staff Editor sehingga seluruh informan berjumlah 5 orang, kemudian hasil observasi dan dokumen-dokumen yang ada di Humas Pemerintah Provinsi Riau.

b. Sumber Data Pelengkap

Adapun tehnik penentuan informan adalah tehnik Purposive dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif penulis, dengan begitu penulis menentukan sendiri informannya (Subagyo, 1999: 31).

Sumber data pelengkap sebagai data pendukung dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Humas Pemerintah Provinsi Riau.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

a. *Interview* (wawancara) yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informasi atau autoritas atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dasar interview yang penulis tanyakan yaitu Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan yakni melalui

Rekam, Reduksi, dianalisis dalam bentuk kata-kata kemudian di edit dan hasil.

- b. *Observasi* yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kondisi riil yang terjadi pada Bagian Publikasi Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Observasi yang saya lakukan adalah observasi tidak terlibat, dimana saya hanya mengamati secara langsung dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

- c. *Dokumentasi* yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

## **I. Teknik Analisis Data**

Menurut Sumadi Surya Brata secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenal situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka, penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1998:24) .

Tekhnik analisa data yang saya lakukan yakni berawal dari interview yang kemudian direkam kemudian direduksi dan dianalisis yang hasil datanya berupa kata-kata.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis susun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam pembahasan ini berisikan tentang :

Latar Belakang, Alasan memilih Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, menggambarkan

tentang : Sejarah Provinsi Riau, Letak Geografis Provinsi Riau, Ttugas Pokok dan Fungsi Humas Pemerintah Provinsi Riau, Kondisi dan Struktur Humas Pemerintah Provinsi Riau.

**BAB III PENYAJIAN DATA**, dalam pembahasan ini berisikan masalah

bagaimana Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

**BAB IV ANALISA DATA**, dalam pembahasan ini penulis mengemukakan

pandangan yang berhubungan dengan Mekanisme Kerja Humas

Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur dan faktor pendukung dan penghambat dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

**BAB V PENUTUP**, berisikan kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Provinsi Riau**

##### **1. Periode 5 Maret 1958-6 Januari 1960**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957. kemudian diundangkan dalam undang-undang nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam undang-undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Jo lembaran negara No.75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra Tingkat II:

- a. Bengkalis
- b. Kampar
- c. Indragiri
- d. Kepulauan Riau, termasuk dalam undang-undang no. 8 tahun 1956 (No.25)

- e. Kotoparaja Pekanbaru.temaktub dalam undang-undang No. 8 tahun 1956 No.19.

Dengan ini Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di TanjungPinang oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr.Sumarman.Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau.

Sering dengan terjadinya pemberontakan PRRI,telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yangluas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI Pemerintah di Kabupaten mulai diterbitkan. sebagai Bupati Inderagiri di rengat ditunjuk Tengku Bay.di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt.Abdurrahman dibantu oleh Wedana T.Kamuruzzaman.

## **2. Pemindahan Ibu Kota**

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah memulai difikirkan untuk menetapkan Ibu Kota Provinsi Riau hanya Bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No.Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958- No.21/0/03-D/58 dibentuk panitia penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I

## **3. Daerah Swatantra Tingkat I Riau**

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat. penguasa perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia Interdepartementel kepentingan pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. sebagai pelaksana di daerah di bentuk pula satu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol.Kaharudin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres no. 6/1959 sekaligus direalisasikan.

Gubernur Mr.S.M.Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Gedung sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

#### **4. Periode 6 Januari 1960 – 15 November 1966**

Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan Ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru



dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibukota.

## **5. Pekanbaru Menjadi Ibukota**

Aparatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di Gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari:

- a. Wan Ghalib
- b. Soeman Hs
- c. Muin Sadjoko

Anggota-Anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen disusunlah Program Kerja Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

- a. Pemulihan pehubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat
- b. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
- c. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekuen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharudin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantara pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, Gedung Pertemuan Umum (Gedung Trikora), Gedung Universitas Riau, Wisma Riau Masjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putra dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan Pemerintah Daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan *Hearing* dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan di samping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah yaitu Dt.Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsure Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideology bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal atas dasar

Nasakomisasi ini maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur Pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah Kabupaten yang ada stagnasi dalam kelancaran jalannya roda Pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-siapi dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan Sk.No615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Dengan di angkatnya Kolonel Arifn Achmad sebagai wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/443-1506. Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jendral Basuki Rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada Tanggal 15 November 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifn Achmad Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan surat keputusan NO. UP/6/136-260, TERTANGGAL 24 Februari 1967. surat keputusan tersebut diperbarui dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146/M/1969 TERTANGGAL 17 Nopember 1969.

Hingga Sekarang ini pejabat Gubernur Riau Sudah mengalami beberapa kali Pergantian, yaitu :

- a. Mr.S.M.Amin Periode 1958-1966
- b. H.Kaharudun Nasution Periode 1960-1966
- c. H.Arifin Achmad Periode 1966-1978
- d. Hr.Subrantas.S Periode 1978-1980
- e. H.Prpto Prayinto (Plt) 1980
- f. H.Imam Munandar Periode 1980-1988
- g. H.Baharudin Yusuf (Plh)1988.
- h. AtarSibero(Plt)1988
- i. H.Soeripto Periode 1988-1998
- j. H.Saleh Djasit Periode 1998-2003
- k. H.M.Rusli Zainal Periode 2003-2008
- l. H.Wan Abubakar Periode 2008
- m. H.M.Rusli Zainal Periode 2008-Sekarang .

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1

Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten / Kota sekarang hanya menjadi 11 kabupaten / Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah (1). Kuantan Singingi, (2). Indragiri Hulu, (3). Indragiri Hilir, (4). Pelalawan, (5). Siak, (6). Kampar, (7). Rokan Hulu, (8). Bengkalis, (9). Rokan Hilir, dan Kota (10). Pekanbaru, (11). Dumai.

## **B. Letak Geografis Provinsi Riau**

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik Provinsi Riau berada dalam kawasan yang sangat strategis, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1 15' Lintang Selatan sampai 4 45' Lintang Utara atau antara 100 03'-109 19 Bujur Timur Greenwich dan 6 50'-1 45' Bujur Barat Jakarta (Badan Perencanaan Pusat Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2007:1).

Provinsi Riau mempunyai luas 107.94 Km<sup>2</sup> dengan persentasi luas Daratan sebesar 80,11 persen dan Lautan seluas 19,89 Persen. Hal ini berbalik ketika kepulauan Riau masih merupakan bagian dari Provinsi Riau, dimana lautan lebih luas dari Daratan. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai,

diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting bagi prasarana perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, 2007:2).

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan daerah tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Berhala
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan
- d. Sebelah Barat: provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dari posisi ini kelihatan bahwa provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : Provinsi Sumatra utara, Sumatra barat, jambi, dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) Negara Tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan memberikan keuntungan kepada Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang tersebut tidak saja di sector ekonomi tetapi bisa di sector lainnya.

Memasuki era otonomi daerah, permasalahan – permasalahan batas-batas daerah menjadi mengemuka. Dikatakan penting karena terkait langsung

dengan upaya penambahan dan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepastian hukum bagi masing-masing Daerah. Dalam konteks penyelesaian batas-batas Daerah dibentuk tim dari masing-masing daerah dan dibawah koordinasi Tim Penyelesaian dan Penerapan Batas Daerah (TPPBD). TPPBD provinsi Riau dibentuk dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 26 November 2001 Nomor : Kpts. 530/XI/2001 dan disempurnakan dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 22 Maret 2003 Nomor : 137/III/2003.

Sampai saat ini penyelesaian batas-batas wilayah, baik antar Provinsi maupun batas-batas antar Kabupaten masih banyak yang belum diselesaikan. Misalnya saja batas Laut antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyangkut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan Provinsi mempunyai hak dalam pengelolaan hasil kekayaan laut sepanjang 12 mil Laut. Namun sampai sekarang, batas 12 mil laut masing-masing Provinsi masih belum jelas.

Begitu juga batas antar Kabupaten/kota yang ada di provinsi riau yang perlu dilakukan pengukuran agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk melakukan upaya dalam melakukan tapal batas masing-masing kabupaten / kota yang ada di Riau. Usaha nyata yang sudah dilakukan adalah penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu, sekarang sudah bisa diselesaikan. Belum lagi batas antar kecamatan maupun batas antara desa yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.



## C. Visi dan Misi Riau

### 1. Visi Riau

Filosofi pembangunan Daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “*Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi*”. Posisi Strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur Perdagangan dan Ekonomi Internasional.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara local, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat riau maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin dan beradat istiadat melayu yang agamis, maka disusunlah visi riau sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 Tentang Poal dasar Pembangunan daerah provinsi tahun 2001-2005 yakni :”*Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Serta Lahir Dan Batin, Di Asia Tenggara Tahun 2020*”.

Untuk memberikan gambaran untuk penjabaran visi riau 2020, telah dirumuskan visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu sesuai dengan Perda Provinsi Riau No 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan No 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008, guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan Visi antara Provinsi Riau, yakni :”  
*Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Mengentaskan Kemiskinan, Pembangunan Pendidikan Yang Menjamin Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Kemudahan Aksesibilitas, Dan Pengembangan Kebudayaan Yang Menempatkan Kebudayaan Melayu Secara Proposional dalam Kerangka Kebudayaan”.*

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi antara Provinsi Riau kurun waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan visi Riau 2020, maka kedepan Misi pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan professional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.

- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat
- d. Mewujudkan perekonomian potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis
- f. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama , seni budaya dan moral
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan public.
- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan
- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

#### **D. Keberadaan Humas di Pemerintah Provinsi Riau**

Humas Provinsi Riau berada dibawah asisten I Gubernur Provinsi Riau. Humas di Pemerintah Provinsi Riau terletak dalam suatu Biro yang dinamakan Biro Humas.

Humas di Pemerintah Provinsi Riau bertugas sebagai mediator antara public dan pemerintah. Yang dimaksud fungsi dan Humas hanya sebagai mediator adalah Humas bertindak sebagai komunikator dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada publik. Kemudian Biro Humas sebagai komunikator dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan Pemerintah.

Publik sasaran Humas Pemerintah Provinsi Riau adalah public internal yaitu jajaran pemerintahan yang berupa instansi-instansi pemerintah di Provinsi Riau sendiri dan public eksternal yaitu masyarakat Riau pada umumnya dari kalangan manapun.

Kebijakan yang disampaikan bukan hanya kebijakan yang berasal dari pemerintah Provinsi Riau sendiri akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Humas**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau maka tugas pokok dan fungsi Humas adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan untuk pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan perencanaan pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- e. Mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- f. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah untuk pengumpulan informasi.

## **2. Bagian Pengumpulan Informasi**

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pendataan informasi, penyaringan informasi, dan tata usaha biro.

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan program pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- b. Melaksanakan program pendataan informasi dan penyaringan informasi
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- e. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana.
- f. Melaksanakan penatausahaan biro.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Pengumpulan Informasi terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Pendataan Informasi**

Kepala Sub Bagian Pendataan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.
- b). Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bagian.

## **2). Sub Bagian Penyaringan Informasi**

Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.
- b). Menyiapkan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

## **3). Sub Bagian Tata Usaha Biro.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerimaan dan pengolahan surat masuk dan surat keluar biro
- b). Menyiapkan bahan arsip/ laporan/ data-data lain secara sistematis pada biro
- c). Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana program/ kegiatan serta rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan dan melaksanakan inventarisasi di lingkungan biro.
- d). Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan biro, yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala.
- e). Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas, serta hak-hak keuangan lainnya.
- f). Melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup biro.
- g). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
- h). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **3. Bagian Penyajian Informasi**

Kepala Bagian penyajian informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggara tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.



Kepala Bagian Penyajian Informasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- b. Melaksanakan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan pers, dokumentasi dan distribusi
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Penyajian Informasi, terdiri atas:

**1). Sub Bagian Hubungan Pers**

Kepala Sub Bagian Hubungan Pers, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan pers dengan Pemerintah Provinsi Riau
- b). Melaksanakan hubungan dengan pers untuk menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **2). Sub Bagian Dokumentasi**

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual
- b). Menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- c). Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi
- d). Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **3). Sub Bagian Distribusi**

Kepala Sub Bagian Distribusi, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan data, bahan dan informasi untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait
- b). Melaksanakan distribusi penerbitan internal dan eksternal
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **4. Bagian Penerangan**

Kepala Bagian Penerangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program penyuluhan, pemberitaan dan penerbitan.

Kepala Bagian Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penerangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- c. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- d. Melaksanakan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Riau melalui media massa baik cetak, elektronik maupun on-line
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagaian Penerangan terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Bina Penyuluhan**

Kepala Sub Bagian Bina Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyuluhan di bidang kehumasan.
- b). Melaksanakan penyuluhan di bidang kehumasan.
- c). Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

### **2). Sub Bagian Bina Pemberitaan**

Kepala Sub Bagian Bina Pemberitaan, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan analisis pemberitaan
- b). Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

- c). Menyiapkan konferensi pers dan press release
- d). Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

### **3). Sub Bagian Bina Penerbitan**

Kepala Sub Bagian Bina Penerbitan mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerbitan
- b). Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik
- c). Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, duka cita dan iklan pembangunan di media massa baik cetak maupun elektronik.
- d). Melaksanakan pembuatan agenda / buku kerja, kalender dan penerbitan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **5. Bagian Publikasi**

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program audio visual, publikasi dan editor.

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penggunaan audio visual yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- c. Melaksanakan editing konsep pidato Gubernur Riau

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro

Bagian Publikasi, terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Audio Visual**

Kepala Sub Bagian Audio Visual, mempunyai tugas:

- a). Menghimpun hasil peliputan audio visual kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- b). Menyiapkan dan melakukan perbaikan hasil peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau, sebelum dipublikasikan.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **2). Sub Bagian Publikasi**

Kepala Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas:

- a). Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual melalui media elektronik dan *on-line*
- b). Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan.
- c). Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun
- d). Melaksanakan pembuatan baliho, spanduk dan *running text* untuk menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **3). Sub bagian Editor**

Kepala Sub Bagian Editor, mempunyai tugas :

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur
- b). Melaksanakan editor terhadap konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- c). Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyusunan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau khususnya di Bidang Publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Mekanisme Kerja yang berkaitan dengan bagaimana proses pembuatan pidato, serta faktor-faktor pendorong dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya pada Bab pendahuluan yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **A. Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur**

Data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian berupa hasil wawancara langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data mengenai mekanisme kerja dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, penulis mengadakan wawancara kepada subjek penelitian yaitu kepada Kabag Publikasi, Kasubbag Editor dan Staff Editor Publikasi Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun persiapan teknis mengenai penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi pencarian data, proses pembuatan dan hasil

pidato. Persiapan petunjuk teknis berawal dari draf yang diberikan oleh SKPD terkait .

Setelah data terkumpul selanjutnya penelitian disajikan pada bab III sesuai dengan sistematika penelitian yang telah peneliti tetapkan. Adapun mekanisme kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dianalisis berdasarkan hasil wawancara secara terstruktur yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

### **1. Menyusun *Out Line* Pidato.**

Garis-garis besar (outline) pidato merupakan pelengkap yang amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan keharusan bagi pembicara baru. Garis besar adalah peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Peta ini memberikan petunjuk dan arah yang akan dituju. Garis besar yang salah akan mengacaukan pembicaraan, begitu juga sebaliknya garis besar yang teratur akan menertibkan pembicaraan.

Humas Pemerintah Provinsi Riau biasanya menyusun out line (garis besar) pidato, berawal dari judul atau tema kegiatan kemudian dirangkumlah kapan acara kegiatan dilaksanakan, siapa saja yang menghadiri dan pesan apa yang akan disampaikan. Outline berguna untuk mengarahkan pembuatan konsep pidato dan hal-hal pokok yang menjadi sasaran pidato yang dijelaskan oleh bapak Darusman (**Wawancara, Kabag Publikasi, Rabu 08 Mei 2013**)



## **a. Pembukaan**

Pembukaan pidato merupakan awal pembuka pidato yang berisi salam pembuka, puji syukur dan shalawat.

Contoh:

### **Paragraf 1**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Wr, Wb**

**Salam Sejahtera bagi kita semua,**

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Yth. Saudara Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Pemerintah Provinsi Riau

Yth. Saudara Kapolda Riau beserta kapolres / Kapolesta Se Provinsi  
Riau

Yth. Saudara Kepala Dinas / Instansi terkait di lingkungan Pemerintah  
Provinsi Riau dan di lingkungan Pemerintah Kab / Kota Se-  
Provinsi Riau

Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kab / Kota Se  
Provinsi Riau

Yth. Saudara Narasumber pada Rapat Koordinasi dan Fasilitasi  
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka  
Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak Se Provinsi  
Riau.

Yth. Peserta Rapat dalam Rangka Pengendalian Penggunaan Bahan  
Bakar Minyak Se Provinsi Riau Tahun 2013 dan Hadirin yang  
berbahagia.

### **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan puji syukur  
kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga kita  
dapat berkumpul dan bertatap muka di ruangan ini dalam acara rapat

koordinasi dan fasilitasi pengendalian penggunaan bahan bakar minyak Se Provinsi Riau.

### **Paragraf 3**

Kemudian shalawat beriringkan salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah meninggalkan warisan dan pedoman hidup yang sangat berharga dan mulia kepada kita umat islam, yakni berupa Al-Qur'an dan Sunnah, untuk itu marilah kita bershalawat kepada beliau **“Allahumma Soli Ala Saidina Muhammad Wa Ala Ali Muhammad”**, semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at dari beliau pada hari kiamat kelak.

#### **b. Tema**

Tema merupakan landasan/ pedoman yang mengacu suatu kegiatan atau acara.

Contoh :

### **Paragraf 4**

**“Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri ESDM NO. 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak”**

Jadi tema merupakan pedoman atau landasan untuk membuat konsep pidato, guna tema adalah agar subbag editor senantiasa mencari data atau informasi yang berkaitan dengan tema. Selain itu juga

bertujuan untuk membatasi isi pidato agar tidak membahas topic yang melenceng dari tema (Rakhmat, 2004: 13).

### **c. Tujuan Pidato**

#### **Paragraf 5**

**Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan pemerintah dengan melakukan pentahapan pembatasan penggunaan BBM jenis tertentu atau bersubsidi dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak tidak terlepas dari upaya agar subsidi yang telah direncanakan tepat sasaran dan dinikmati oleh yang berhak menerima dengan tujuan agar kuota BBM Tahun 2013 dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

#### **Paragraf 6**

**Hadirin yang saya Hormati,**

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang timbul, permasalahan itu antara lain berkaitan dengan kurangnya sosialisasi peraturan Menteri ESDM dimaksud, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya kesadaran pengguna BBM bersubsidi yang tidak berhak menikmati sesuai amanat peraturan tersebut.

#### **Paragraf 7**

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, saya himbau kepada semua elemen Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab / Kota agar secara bersama-sama untuk berkoordinasi, mensosialisasi, memfasilitasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dimaksud.

#### **Paragraf 8**

Saya juga menghimbau agar pemerintah Kab / Kota dalam menjalankan tugasnya meminimalisir permasalahan yang muncul dalam penyaluran Bahan bakar Minyak Bersubsidi, juga menyusun langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak agar tepat sasaran dan mensosialisasikan dan memfasilitasi program dimaksud di daerah.

### **d. Isi Pidato**

## **Paragraf 9**

### **Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya memberikan subsidi atau bantuan berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan subsidi yang diberikan seperti pupuk, energy, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **Paragraf 10**

Pada APBN Tahun 2012 kebijakan pemberian subsidi untuk sector energi dianggarkan sebesar 312 Triliun terdiri dari subsidi untuk listrik sebesar 89,2 Triliun, sedangkan subsidi untuk BBM sebesar 137,4 Triliun (untuk alokasi sebanyak 40 juta kilo liter).

## **Paragraf 11**

Sampai akhir tahun 2012 terjadi beberapa kali penambahan alokasi untuk subsidi BBM karena banyaknya terjadi kekurangan kuota BBM di beberapa Provinsi dan termasuk Provinsi Riau.

## **Paragraf 12**

Jumlah total alokasi BBM bersubsidi secara Nasional Tahun 2012 setelah penambahan menjadi 222,8 Triliun (alokasi BBM menjadi sebanyak 45,3 juta kilo liter), terjadi peningkatan konsumsi BBM sebanyak 85,4 Triliun atau 5,3 juta kilo liter).

## **Paragraf 13**

Oleh karena melihat besarnya jumlah alokasi anggaran untuk subsidi sector energy khususnya Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak.

## **Paragraf 14**

### **Hadirin yang saya Hormati.**

Upaya pemerintah dalam rangka mengurangi beban subsidi energy yang semakin besar setiap tahunnya dalam APBN, pada awalnya dengan menetapkan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2012 dan diganti lagi dengan No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

### **Paragraf 15**

Berdasarkan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk transportasi darat, dilaksanakan oleh:

- Penetapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *Untuk Transportasi Jalan*, mulai berlaku untuk jenis:
  1. Kendaraan dinas tehitung mulai **Tanggal 1 Februari 2013**
  2. dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) berlaku mulai **Tanggal 1 Maret 2013**
- pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *untuk Transportasi Laut*, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.

### **e. Kesimpulan**

### **Paragraf 16**

**Hadirin yang saya Hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga apa yang menjadi harapan kita untuk mensukseskan program ini dapat kita raih demi kesejahteraan masyarakat. Kepada peserta kiranya dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan maksimal, dan saya harapkan Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Implementasi Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak Se Provinsi Riau dan adanya kesimpulan rapat yang mampu menjawab hal-hal berkaitan dengan upaya pemaksimalan kebijakan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

### **f. Penutup**

Penutup merupakan bagian akhir dari pidato. Biasanya penutup pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berisi pantun dan salam.

Contoh:

## **Paragraf 17**

Akhir kata dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Se Provinsi Riau Tahun 2013, Secara resmi saya nyatakan Dibuka.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

**Terima Kasih,**

**Wassalamu’alaikum Wr. Wb**

## **2. Mengumpulkan Data/ Informasi**

Data atau informasi yang diperoleh harus disusun kembali dan mengemas data dan informasi. Data informasi bisa saja didapatkan dari SKPD ataupun mitra kerja dan media internet.

### **a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).**

Humas biasanya mengumpulkan data atau informasi melalui SKPD terkait pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Koordinasi antara Humas dengan SKPD diatur oleh Pergub Riau No. 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Adapun SKPD yang bekerjasama dengan Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan draf guna menunjang data dan memudahkan humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam nota dinas diantaranya:

- 1). BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
- 2). Biro Hukum
- 3). Badan Kesbang Polinmas
- 4). Dinas Pendidikan Tingkat I
- 5). Dinas Perkebunan
- 6). Biro Tata Pemerintahan
- 7). Dinas Kesehatan
- 8). Biro Administrasi Perekonomian

**b. Mitra Kerja Sama Non SKPD**

Adapun mitra kerja sama antara pihak Humas dengan pihak swasta lainnya, yaitu:

- 1). PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepri
- 2). PT. Garuda Indonesia
- 3). Tribun
- 4). UR
- 5). UIN
- 6). UIR
- 7). UNILAK

8). PONPES Naga Beralih, Kab. Kampar

9). Dan lain sebagainya,

Menurut Bapak Darusman, SKPD ataupun mitra kerja yang berkoordinasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di naungan Pemerintah Provinsi dan pihak swasta yang telah diatur dalam nota dinas. adapun bentuk koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan mitra kerja tidak terlalu formal bisa saja SKPD terkait yang mengantarkan draf ke Humas, ataupun bisa saja mengirimkan melalui Email, Fax selain itu Bagian Publikasi juga melakukan komunikasi secara terus menerus dengan SKPD terkait baik melalui telekomunikasi seperti HP dan jejaring sosial lainnya.

Panduan Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah draf yang diberikan dari SKPD ataupun mitra kerjasama Hal ini agar pidato tersebut tidak menyimpang dari kegiatan tersebut. Selain itu juga bertujuan apabila ada keraguan atau hal yang masih keliru dapat ditanyakan langsung kepada pihak terkait. karena kita tahu bahwa penampilan Gubernur dan Wakil Gubernur di forum sangat diperhatikan oleh pers oleh karena itu data yang diberikan haruslah valid. **(Wawancara Kabag Publikasi, Senin 06 Mei 2013)**

Jika Humas tidak menerima Draft dari SKPD ataupun mitra kerja, protokol yang memberikan tema atau judul serta waktu dan tempatnya. Jika hal ini terjadi tentunya sangat menyulitkan Humas karna tidak ada



pedoman ataupun bahan dasar. Subbag Editor harus mencari sendiri isi ataupun gagasan untuk ditampilkan. Beda halnya dengan draf yang diberikan oleh SKPD hal ini sangat memudahkan Subbag Editor dalam bekerja sehingga hanya mengedit sebagian untuk menjadi konsep pidato yang utuh.

### c. Media

#### 1). Media cetak

Pada media cetak seperti Koran atau majalah biasanya juga sering mengumpulkan data melalui keliping yang diarsipkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena dari Koran Humas bisa mengetahui repon apa yang terjadi pada masyarakat atas kebijakan Pemerintah.

#### 2). Media audio / Audio Visual

Kecanggihan teknologi sekarang ini mempermudah akses informasi bagi Humas. Humas biasanya senantiasa mencari data melalui media internet seperti Blog ataupun kata sambuta dari Menteri.

#### 3). Buku / Literatur

Mengumpulkan data penunjang seperti studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan jarang sekali melihat studi

literatur tanpa terkecuali Hut Riau karena keterbatasan waktu.  
(Wawancara Staff Editor, Senin 06 Mei 2013).

### **3. Menyusun Draf Pidato**

#### a. Pemilihan kata

Editor memilih kata dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan EYD (Ejaan yang disempurnakan).

#### b. Pemilihan bahasa atau kalimat

Pemilihan bahasa atau kalimat dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur lebih diperhalus saja dari draf yang diberikan oleh SKPD ataupun mitra kerja.

### **4. *Editing* Pidato**

Menurut Bapak Fuadi, Shi, M.Si sebagai Kasubbag Editor bahwa Draf atau Bahan dasar yang diberikan oleh seluruh SKPD sangat membantu dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena data yang diperlukan sudah ada sehingga pihak editor hanya mengedit dan merangkai kata sehingga menjadi pidato yang sempurna.

Beliau juga menambahkan bahwa jika bagian editor telah mendapat data dari SKPD maka pembuatan konsep pidato dapat selesai dalam waktu yang tidak lama dalam mengedit pidato bahkan bisa

menyelesaikan satu naskah dalam waktu 2 jam dan bisa menyelesaikan 20 naskah dalam sehari (**Wawancara Kasubbag Editor, Rabu 08 Mei 2013**).

Adapun sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

- a. Salam pembuka
- b. Puji syukur dan shalwat
- c. Isi pidato tersebut
- d. Himbauan
- e. Pantun
- f. Penutup

Hal-hal penyusunan Pendahuluan, Penampilan Masalah, Penegasan Argumentatif serta Penutup dalam sebuah konsep pidato. Bapak Putra sebagai staff Bagian Editor menjelaskan bahwa penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan atau dipedomani oleh draf tersebut. Susunan atau sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat **Baku dan Resmi** jadi formatnya telah ditetapkan. Penyusunan pendahuluan bersifat salam pembuka, penampilan masalah berisi masalah yang terjadi, penegasan argumentatif berisi solusi dan penutup berisi salam dan pantun. Pantun selalu ada dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur karena Riau identik dengan tanah melayu (**Wawancara, Kamis 16 Mei 2013**).

Draf yang diterima dari SKPD ataupun mitra kerja hanya merupakan bahan mentah yang harus diolah lagi, draf juga merupakan pedoman dalam menulis konsep pidato. Macam-macam *editing* pidato:

**a. Contoh Pidato dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum diedit Humas.**

Contoh draf yang diedit oleh SKPD kemudian diantar ke Humas untuk sebagai pedoman dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

**SAMBUTAN GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAAN  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING, DAN  
WORKSHOP STANDARISASI LPSE  
PEKANBARU, 2 JULI 2013**

---

Yang saya hormati, Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yang saya hormati, Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Wr. Wb,**

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih

diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahummashalli 'ala Muhammad Wa'ala 'ali Muhammad.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di bumi lancang kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif, dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan, dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahdalam bidangPengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

Anak Dara Mandi Disungai

Berkemban Panjang Menutup Diri

Acara Rapat Koordinasi Dan Workshop Akan Dimulai

Semoga Mendapat Restu Illahi

Akhirnya, dengan ucapan "Bismillahirrahmanirrahim" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

**b. Contoh Pidato dari Mitra Kerja**

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL  
BANK INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA  
PERBANKAN DI PROVINSI RIAU TANGGAL 26  
OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

- Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau
- Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau
- Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran
- Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau
- Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun



2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat entrepreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

GUBERNUR RIAU

**c. Humas**

**1). Contoh *Editing* Pidato Humas setelah diberi draf oleh SKPD**

**SAMBUTAN  
GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAAN KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING DAN WORKSHOP  
STANDARISASI LPSE  
TANGGAL, 2 JULI 2013 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Yth. Saudara Rekan-Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Wakil Gubernur Riau,

Yth. Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yth. Saudara Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia.

**Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Alhamdulillah* pada saat yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini, dalam rangka menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE.

**Paragraf 3**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ucapan **“Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa ala ali Muhammad”** semoga mendapat safaat pada hari akhir nanti.

#### **Paragraf 4**

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Lancang Kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

#### **Paragraf 5**

##### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

#### **Paragraf 6**

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur Pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 7**

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran Pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **Paragraf 8**

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada Tanggal 1 Agustus 2012.

#### **Paragraf 9**

##### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

#### **Paragraf 10**

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

#### **Paragraf 11**

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

#### **Paragraf 12**

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

#### **Paragraf 13**

##### **Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.

#### **Paragraf 14**

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para Narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

#### **Paragraf 15**

Demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampaikan se bait pantun.

**Tuah sakti hamba negeri**

**Tuah Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji**

**Rakor Management Training dibuka secara resmi**

**Untuk peningkatan Standarisasi LPSE di Negeri ini**

#### **Paragraph 16**

Akhirnya, dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

#### **Paragraf 17**

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua.

**Terimakasih.**

**Wabillahitaufiqwalhidayah.**

**Wassalamualakum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

2). Contoh *Editing* Pidato Humas yang berasal dari Mitra Kerja

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BANK  
INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA PERBANKAN DI PROVINSI  
RIAU**

**TANGGAL 26 OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

### **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, dalam rangka memupuk tali silaturahmi, berhalal bi halal khususnya dengan jajaran Bank Indonesia dan para pimpinan Perbankan serta Bank Perkreditan Rakyat se Provinsi Riau.

### **Paragraf 3**

Selanjutnya salawat beriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at Beliau pada hari kiamat kelak.

### **Paragraf 4**

Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini dan berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, atas nama pribadi, keluarga dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan **"minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin"** . Semoga segala amal ibadah kita, terutama dibulan suci Ramadhan yang lalu kita diberi pahala berlipat ganda oleh Allah SWT dan segala kesalahan dan dosa kita mendapat ampunan dari-Nya. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi suci seperti bayi dan menjadi pemenang di hari kebahagiaan ini. Selanjutnya dengan modal tersebut, mari kita tatap dan songong hari depan yang lebih baik lagi.

### **Paragraf 5**

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**



Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

#### **Paragraf 6**

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

#### **Paragraf 7**

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

#### **Paragraf 8**

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 9**

**Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat enterpreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

#### **Paragraf 10**

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

#### **Paragraf 11**

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 12**

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

#### **Paragraf 13**

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

#### **Paragraf 14**

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

*Burung pipit hinggap dijerami*

*Terbang kembali ke angkasa*

*Kita berkumpul bersilaturahmi*

*Semoga kebersamaan dapat dipupuk sepanjang masa*

*Mari beriring, kita berjalan*

*Menuju negeri yang di impikan*

*Seiya sekata dalam tugas kita jalankan*

*Riau yang jaya dan maju kita harapkan*

#### **Paragraf 15**

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

GUBERNUR RIAU

**H. M. RUSLI ZAINAL, SE, MP**

### **5. Verifikasi Konsep Pidato**

Setelah konsep pidato selesai dibuat oleh staff editor maka setelah itu akan diverifikasi oleh kasubbag editor untuk mengecek hasil ataupun menambah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah diperiksa oleh Kasubbag Editor kemudian di cek kembali oleh Kabag Publikasi dan terakhir disahkan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau.

### **6. *Finishing* Pidato**

Setelah dicek oleh berbagai pihak dan terakhir adalah Kepala Biro Humas maka selesailah pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kepala Biro Humas   □ □ →   Gubernur / Wakil Gubernur

Gambar 1.1 Alur *Finishing*  
(Sumber: Bagian Publikasi Humas Pemprov Riau)

### **7. Publikasi – Penyerah Pidato**

Setelah konsep pidato selesai, langkah terakhir adalah penyerahan konsep pidato tersebut dari Humas ke Gubernur melalui Ajudan Gubernur. Adapun skema dapat dilihat sebagai berikut:

**PROTOKOL — HUMAS — AJUDAN GUBERNUR**

Gambar 1.2 Alur Penugasan  
(Sumber: Bagian Publikasi Humas Pemprov Riau)

Bagan diatas adalah jalur atau sistem tentang jalannya perintah mengenai penugasan pembuatan pidato. Bagian Publikasi hanya diberikan Tema ataupun judul kegiatan beserta tanggal kegiatan oleh pihak protokol. Setelah itu Bagian Publikasi mencari data sendiri melalui kerjasama dengan seluruh SKPD.

Adapun apabila pidato telah diselesaikan staff editor menyerahkan konsep pidato kepada Kasubbag Editor kemudian diserahkan lagi kepada Kabag Publikasi dan terakhir diperiksa kembali oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Setelah semuanya selesai maka pidato tersebut langsung diantar kepada Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**B. Kendala-Kendala dalam Pembuatan Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.**

Dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur banyak memiliki hambatan atau kendala-kendala yaitu diantaranya adalah:

**1. Kekurangan isi (*content*)**

Terkadang isi pidato yang dibuat Bagian Publikasi kurang lengkap. Misalnya membuat konsep pidato mengenai Himpunan Kerukunan Tani

Indonesia, editor hanya membahas atau membuat isi mengenai Kesejahteraan Tani dan Pemberdayaan Tani. Padahal masih banyak lagi hal-hal yang juga dapat dicantumkan pada isi pidato seperti infrastruktur atau transportasi, dimana kedua hal tersebut merupakan latarbelakang dari kesejahteraan tani.

Selain itu terkadang isi pidato yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarena berbeda pandangan dan pendapat antara individu. Dilain sisi juga Sulitnya mengikuti atau menirukan sifat atau perilaku Gubernur dan Wakil Gubernur. Editor harus mampu berempati Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **2. Waktu yang Relatif Singkat**

Keterbatasan waktu membatasi imajinasi editor. Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan jangka waktu yang relatif sangat singkat sehingga daya konsentrasi atau pemikiran dibatasi oleh waktu sehingga berpengaruh terhadap isi pidato. editordituntut sekreatif mungkin untuk membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **3. Kekurangan Personil**

Keterbatasan personil merupakan kendala yang amat besar Karena pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sangatlah banyak.

Ditambah lagi Gubernur dan Wakil Gubernur selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang menuntut untuk tampil didepan forum. Hal tersebut tentunya mengharuskan Bagian Publikasi bekerja keras untuk memenuhi segala pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan terkadang *subbag editor* harus lembur bekerja hingga malam (**Wawancara Staff Editor, Senin 13 Mei 2013**).

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur**

Pada bab ini penulis menganalisis data yang telah disajikan pada Bab III yang sesuai dengan permasalahan. Adapun analisa yang penulis gunakan yaitu teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

Analisa data kualitatif adalah teknik upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun tujuan analisa data adalah untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian. Analisa penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Menusun *Out Line* Pidato.**

Garis-garis besar (outline) pidato merupakan pelengkap yang amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan keharusan bagi pembicara baru. Garis besar adalah peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Peta ini memberikan petunjuk dan arah yang akan dituju. Garis besar yang salah akan mengacaukan pembicaraan, begitu juga sebaliknya garis besar yang teratur akan menertibkan pembicaraan.

Analisa penulis sesuai dengan **Paragraf 15 hal 76** bahwa sistem lambang yang dibuat oleh staff editor tidak sesuai dengan teori atau sistem lambang yang baik. Dapat dilihat pada paragraph berikut ini.

Berdasarkan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk transportasi darat, dilaksanakan oleh:

- Penetapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu ***Untuk Transportasi Jalan***, mulai berlaku untuk jenis:
  1. Kendaraan dinas tehitung mulai **Tanggal 1 Februari 2013**



2. dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) berlaku mulai **Tanggal 1 Maret 2013**

- pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *untuk Transportasi Laut*, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.

Analisa penulis sesuai dengan teori bahwa outline yang baik itu adalah:

Bentuk garis besar bermacam-macam, tetapi ada pedoman yang sama untuk membuat garis besar yang baik. Adapun Ciri-ciri garis besar yang baik adalah:

- a. Garis besar terdiri dari tiga bagian : pengantar, isi, dan penutup. Dapat membaginya menjadi lima bagian: perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Perhatian ditempatkan pada pengantar; kebutuhan, pemuasan, dan visualisasi. Pada isi; tindakan pada penutup pidato.
- b. Lambang yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tidak boleh membingungkan. Sistem lambang yang tidak tertib akan mengaburkan pikiran penunjang. Ada dua macam sistem lambang yaitu sistem angka dan sistem kombinasi.
- c. Pikiran pokok dan penunjang dibedakan dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Pernyataan yang mempunyai kedudukan sama berada pada garis vertical yang sama pula.

Contoh: jurnalistik mencakup bermacam-macam pekerjaan :

- 1). Dalam media surat kabar: reporter, penyunting, pembaca naskah dan sebagainya,
- 2). Dalam kantor berita ; reporter, juru potret, penyunting dan sebagainya.

Jadi dapat dikatakan bahwa out line pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sistem lambangnya belum baik namun indikator out line lainnya sudah baik dilakukan dimana garis besar yang baik dimana terdiri atas tiga bagian yaitu: pengantar, isi dan penutup. Dan telah dapat membaginya menjadi lima bagian: perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi dan tindakan. Perhatian ditempatkan pada pengantar; kebutuhan, pemuasan, dan visualisasi pada isi; tindakan penutup pidato. Semua unsur-unsur tersebut telah termuat pada pidato Gubernur dan wakil Gubernur.

Analisa penulis mengenai prinsip penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sesuai dengan teori yang meliputi :

#### **a. Kesatuan**

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terdiri atas tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, tanda tanya atau persepsi yang berbeda. Perihal materi atau isi telah memiliki satu gagasan yang mendominasi seluruh uraiannya.

Dapat dilihat pada **Paragraf 9 hal 75** yang menjelaskan bahwa isi memiliki satu gagasan yang mendominasi isi keseluruhannya, dapat dilihat sebagai berikut:

## **Paragraf 9**

### **Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya memberikan subsidi atau bantuan berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan subsidi yang diberikan seperti pupuk, energy, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **b. Hubungan**

Seluruh uraian pidato memiliki hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diterapkan dapat dilihat pada **paragraf 6, paragraf 7 dan 8 Hal 74** dimana pada paragraf tersebut menjelaskan hubungan antara uraian satu dan lainnya. Selain itu juga memberikan ilustrasi yang berbeda namun berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

## **Paragraf 6**

### **Hadirin yang saya Hormati,**

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang timbul, permasalahan itu antara lain berkaitan dengan kurangnya sosialisasi peraturan Menteri ESDM dimaksud, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya kesadaran pengguna BBM bersubsidi yang tidak berhak menikmati sesuai amanat peraturan tersebut.

## **Paragraf 7**

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, saya himbau kepada semua elemen Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab / Kota agar secara bersama-sama untuk berkoordinasi, mensosialisasi, memfasilitasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dimaksud.

### **Paragraf 8**

Saya juga menghimbau agar pemerintah Kab / Kota dalam menjalankan tugasnya meminimalisir permasalahan yang muncul dalam penyaluran Bahan bakar Minyak Bersubsidi, juga menyusun langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak agar tepat sasaran dan mensosialisasikan dan memfasilitasi program dimaksud di daerah.

#### **c. Penekanan**

Dalam penulisan naskah pidato, hal-hal yang perlu diterapkan ditebalkan, dimiringkan atau juga diberi garis bawah sehingga ketika menyampaikan pidato, Gubernur dan Wakil Gubernur mengetahui bahwa ia harus menekankan bagian yang bertanda khusus tersebut.

Seperti terlihat jelas dalam paragraf Hal 73 dimana tema ditebalkan karena dianggap penting dan merupakan pedoman uraian berikutnya.

### **Paragraf 4**

**“Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri ESDM NO. 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak”**

## **2. Mengumpulkan Data/ Informasi**

Data atau informasi yang diperoleh harus disusun kembali dan mengemas data dan informasi menjadi satu pidato yang utuh. Data

informasi bisa saja didapatkan dari SKPD ataupun mitra kerja dan media internet.

**a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Mitra Kerja Non SKPD.**

Humas biasanya mengumpulkan data atau informasi melalui SKPD ataupun Mitra Kerja terkait pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Koordinasi antara Humas dengan SKPD diatur oleh Pergub Riau No. 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Analisa penulis bahwa koordinasi dengan SKPD atau Mitra Kerja dengan pihak Humas adalah upaya yang sangat baik karena data akan lebih akurat dan validasi kebenarannya sudah teruji. Selain itu kita tahu bahwa Humas tidak mungkin mengetahui segala data dan informasi mengenai SKPD atau Mitra kerja yang bernaung di Provinsi Riau. Jadi, koordinasi atau kerja sama dengan SKPD ataupun Mitra kerja merupakan hal yang baik.

**b. Buku / Literatur**

Mencari data informasi tidak hanya melalui SKPD ataupun Mitra kerja tetapi juga harus mencari data penunjang. Mengumpulkan data penunjang seperti studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan jarang sekali melihat studi literatur tanpa terkecuali Hut Riau.

Buku sangat bagus menjadi data penunjang dalam membuat konsep pidato karena akan dapat menunjukkan seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan kredibilitas. Seluruh pidato Gubernur dan Wakil Gubernur baik tentang SKPD ataupun Mitra Kerja tidak ada membuka buku melainkan Hut riau. Hal kebiasaan buruk ini harusnya dapat dirubah.

Analisa penulis disesuaikan dengan teori aristoteles ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia. *Pertama*, harus sanggup menunjukkan kepada khalayak memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat (ethos). *Kedua*, harus menyentuh hati khalayak : perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang (pathos). *Ketiga*, meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti dilihat pada respon khalayak (logos).

Salah satu komponen penting kredibilitas adalah otoritas. Memiliki otoritas artinya memiliki keahlian yang diakui. Hal-hal yang membuat seseorang memiliki otoritas adalah :

1. Otoritas dibentuk karna orang melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman
2. Dalam kredibilatas adalah *good sense*. Pendengar menyukai dan akhirnya menerima gagasan yang dikemukakan oleh pembicara yang di pandang objektif. Membangun citra objektif terdiri atas :
  - a. Menggunakan pendekatan rasional dan argumentasi yang logis.

- b. Menghindari penjulukan atau memilih kata-kata.
  - c. Menghindari sikap tidak jujur dalam menyajikan informasi seperti dengan sengaja menutup informasi yang sudah sangat dikenal khalayak.
  - d. Tidak menggurui pendengar maksudnya ialah memperlakukan pendengar sebagai rekan, saudara atau mitra dalam mencari kebenaran.
3. *Good sense* erat kaitannya dengan *good character* (prilaku yang baik) yang merupakan komponen kredibilitas yang ketiga. Prilaku yang baik yaitu termasuk kejujuran, integritas, dan ketulusan. Pendengar akakn tertarik pada tokoh yang terkenal jujur, yang tidak mudah di beli, yang telah berbuat banyak untuk masyarakat.
4. *Good will* artinya pendengar akan tertarik mendengar pidato yang disampaikan jika mereka tau bahwa pidato tersebut berbicara untuk kepentingan mereka. membangun *good will* melalui proses ko – orientasi. Yakni mencari kesamaan antara pembicara dengan pendengar dalam perbuatan, sikap dan nilai. Ciptakan kesan bahwa keperluan mereka adalah keperluan pembicara, kerugian mereka adalah kerugian anda, dan kecemasan mereka adalah kecemasan anda. Satukan pembicara secara psikologis dengan seluruh pendengar. Teknik lain untuk membangun *good will* adalah menunjukkan keterlibatan pribadi (komitmen).

5. *Dinamisme* adalah ekspresi fisik dari komitmen psikologis pembicara terhadap topik bila anda memandang serius pembicaraan anda, suara dan gerak anda juga kelihatan serius. Semangat, begitu juga kelesuan.

Etos di tunjukan dalam kualifikasi (kesan yang baik mengenai anda).

Contohnya yang menimbulkan etos :

1. Pernyataan yang mengenai sumber-sumber yang anda kutip
2. Pernyataan yang menunjukkan keterlibatan anda dalam studi yang relevan dengan pembicaraan
3. Pernyataan yang mengacu pada posisi, penghargaan, atau prestasi yang dicapai
4. Pernyataan yang menunjuk pada peristiwa, orang atau tempat penting yang berkaitan dengan topik anda (Jalaludin Rakhmat, 2002: 71).

### **3.Menyusun Draf Pidato**

#### a. Pemilihan Kata

Pemilihan kata berdasarkan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

#### b. Pemilihan Bahasa atau Kalimat

Pemilihan bahasa yang lebih diperhalus kata-katanya.



Analisa penulis bahwa pemilihan kata berdasarkan EYD dan pemilihan bahasa yang lebih diperhalus belum cukup untuk membuat sebuah konsep pidato yang baik dan benar karena berdasarkan teori bahwa pemilihan kata dan bahasa itu terdiri atas:

a. Kata-kata harus jelas

Bahwa kata-kata yang dipilih tidak boleh menimbulkan arti ganda (ambigues), tetap dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. Untuk mencapai kejelasan seperti itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1). Gunakan istilah yang spesifik (tertentu)

Ada kata-kata yang terlalu umum sehingga mengundang tafsiran bermacam-macam. Ada pula kata-kata yang artinya sudah tertentu. “ia mengajar saya bahasa inggris” lebih spesifik daripada “ia mendidik saya”.

2). Gunakan kata-kata yang sederhana

Berpidato adalah berkomunikasi karena nilai komunikasinya, kata-kata yang diucap harus dapat dipahami dengan cepat.”konsep-konsep kaum politisi yang sarat dengan fantasi dan delusi” adalah kalimat yang sulit dicerna.

3). Hindari istilah-istilah teknis

Ciri dunia modern ialah berkembangnya spesialisasi yang mempertinggi kemampuan, tetapi juga menkotak-kotak manusia dalam dunianya sendiri. Masing-masing mengembangkan kata-kata yang dipahami oleh mereka sendiri sedangkan bagi orang lain istilah tersebut adalah membingungkan.

4). Berhemat dalam penggunaan kata-kata

Seringkali kalimat yang panjang menjadi jelas setelah kata-kata yang berlebihan dibuang. Seperti “ adalah suatu keharusan bagi seorang guru untuk menaruh perhatian yang tinggi kepada siswa-siswanya”, kalimat ini lebih jelas diganti dengan “ guru harus memperhatikan sekali siswa-siswanya”. Termasuk penghematan kata adalah menghindari gejala-gejala kerancuan (kontaminasi).

5). Gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda.

#### **4. *Editing* Pidato**

##### **a. Contoh Pidato dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum diedit Humas.**

Contoh draf yang diedit oleh SKPD kemudian diantar ke Humas untuk sebagai pedoman dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

**SAMBUTAN GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAAN**

**KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING, DAN  
WORKSHOP STANDARISASI LPSE**

**PEKANBARU, 2 JULI 2013**

---

Yang saya hormati, Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yang saya hormati, Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Wr. Wb,**

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahummashalli 'ala Muhammad Wa'ala 'ali Muhammad.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di bumi lancang kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

**Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi

masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif, dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan, dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahdalam bidangPengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

Anak Dara Mandi Disungai

Berkemban Panjang Menutup Diri

Acara Rapat Koordinasi Dan Workshop Akan Dimulai

Semoga Mendapat Restu Illahi

Akhirnya, dengan ucapan "Bismillahirrahmanirrahim" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

**b. Contoh Pidato dari Mitra Kerja**

## **SAMBUTAN**

### **GUBERNUR RIAU**

#### **PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BANK INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU TANGGAL 26 OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor,

terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat enterpreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

#### **Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.



**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

**GUBERNUR RIAU**

**c. Contoh *Editing* Pidato Humas setelah diberi draf oleh SKPD**

**SAMBUTAN  
GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAANKEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING DAN WORKSHOP  
STANDARISASI LPSE  
TANGGAL, 2 JULI 2013 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Yth. Saudara Rekan-Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Wakil Gubernur Riau,

Yth. Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yth. Saudara Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia.

## **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Alhamdulillah* pada saat yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini, dalam rangka menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE.

## **Paragraf 3**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ucapan **“Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa ala ali Muhammad“** semoga mendapat safaat pada hari akhir nanti.

## **Paragraf 4**

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Lancang Kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

## **Paragraf 5**

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

## **Paragraf 6**

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur Pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 7**

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran Pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## **Paragraf 8**

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada Tanggal 1 Agustus 2012.

## **Paragraf 9**

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

## **Paragraf 10**

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

## **Paragraf 11**

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa

tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

## **Paragraf 12**

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

## **Paragraf 13**

**Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintahdalam bidangPengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.

## **Paragraf 14**

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para Narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

## **Paragraf 15**

Demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampaikan sebaait pantun.

**Tuah sakti hamba negeri**

**Tuah Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji**

**Rakor Management Training dibuka secara resmi**

**Untuk peningkatan Standarisasi LPSE di Negeri ini**

### **Paragraf 16**

Akhirnya, dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

### **Paragraf 17**

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua.

**Terimakasih.**

**Wabillahitaufiqwalhidayah.**

**Wassalamualakum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

### **d. Contoh *Editing* Pidato Humas yang berasal dari Mitra Kerja**

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BANK  
INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA PERBANKAN DI PROVINSI  
RIAU**

**TANGGAL 26 OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

### **Paragraf 1**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

### **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, dalam rangka memupuk tali silaturahmi, berhalal bi halal khususnya dengan jajaran Bank Indonesia dan para pimpinan Perbankan serta Bank Perkreditan Rakyat se Provinsi Riau.

### **Paragraf 3**

Selanjutnya salawat beriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at Beliau pada hari kiamat kelak.

### **Paragraf 4**

Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini dan berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, atas nama pribadi, keluarga dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan "**minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin**". Semoga segala amal ibadah kita, terutama dibulan suci Ramadhan yang lalu kita diberi pahala berlipat ganda oleh Allah SWT dan segala kesalahan dan dosa kita mendapat ampunan dari-Nya. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi suci seperti bayi dan menjadi pemenang di hari kebahagiaan ini. Selanjutnya dengan modal tersebut, mari kita tatap dan songsong hari depan yang lebih baik lagi.

### **Paragraf 5**

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan.

Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

#### **Paragraf 6**

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

#### **Paragraf 7**

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

#### **Paragraf 8**

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 9**

##### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat enterpreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni

pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

#### **Paragraf 10**

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

#### **Paragraf 11**

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 12**

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

#### **Paragraf 13**

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.



#### **Paragraf 14**

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

*Burung pipit hinggap dijerami  
Terbang kembali ke angkasa*

*Kita berkumpul bersilaturahmi*

*Semoga kebersamaan dapat dipupuk sepanjang masa*

*Mari beriring, kita berjalan*

*Menuju negeri yang di impikan*

*Seiya sekata dalam tugas kita jalankan*

*Riau yang jaya dan maju kita harapkan*

#### **Paragraf 15**

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL, SE, MP**

Analisa penulis bahwa editing pidato dari Humas kurang baik, karena merupakan salinan dari draf SKPD. Seharusnya tatanan bahasa dan

kalimatnya harus lebih bervariasi agar pidato terlihat lebih menarik dan tidak terlalu kaku.

## **5. Verifikasi Konsep Pidato**

Setelah konsep pidato selesai dibuat oleh staff editor maka setelah itu akan diverifikasi oleh kasubbag editor untuk mengecek hasil ataupun menambah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah diperiksa oleh Kasubbag Editor kemudian di cek kembali oleh Kabag Publikasi dan terakhir disahkan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Analisa penulis verifikasi sangat baik dilakukan karena pidato Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan berbagai penyaringan ide baik itu melalui SKPD, Staf Editor, Kasubbag Editor, Kabag Publikasi dan yang terakhir adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk penyempurnaan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, ide atau gagasan pidato murni dari SKPD dan Humas. Humas tidak ada koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pidato yang akan disampaikan.

## **6. *Finishing* Pidato**

Setelah dicek oleh berbagai pihak dan terakhir adalah Kepala Biro Humas maka selesailah pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Analisa penulis penyelesaian konsep pidato tersebut memang sudah cukup baik karena telah mengalami berbagai proses penyaringan hingga selesai menjadi satu konsep yang utuh.

## **7. Publikasi – Penyerah Pidato**

Setelah konsep pidato selesai, langkah terakhir adalah penyerahan konsep pidato tersebut dari Humas ke Gubernur melalui Ajudan Gubernur. Adapun skema dapat dilihat sebagai berikut:

**PROTOKOL — HUMAS — AJUDAN GUBERNUR**

(Sumber: Bagian Publikasi)

Bagan diatas adalah jalur atau sistem tentang jalannya perintah mengenai penugasan pembuatan pidato. Bagian Publikasi hanya diberikan Tema ataupun judul kegiatan beserta tanggal kegiatan oleh pihak protokol. Setelah itu Bagian Publikasi mencari data sendiri melalui kerjasama dengan seluruh SKPD.

Adapun apabila pidato telah diselesaikan staff editor menyerahkan konsep pidato kepada Kasubbag Editor kemudian diserahkan lagi kepada Kabag Publikasi dan terakhir diperiksa kembali oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Setelah semuanya selesai maka pidato tersebut langsung diantar kepada Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Humas Pemerintah Provinsi Riau memiliki berbagai bagian, salah satunya Bagian Publikasi yang terdiri oleh subbagian. Editor merupakan subbagian dari publikasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yakni membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berawal dari draf yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mitra kerja yang terangkum oleh nota dinas kepada pihak Humas.

Meskipun pembuatan konsep pidato ini bersifat editor namun ada beberapa langkah dalam membuat konsep pidato Gubernur dan wakil Gubernur yaitu:

1. Menyusun out line pidato
2. Menyusun data / informasi
3. Menyusun draf pidato
4. *Editing* pidato
5. Verifikasi pidato
6. *Finishing* pidato
7. Publikasi – penyerah pidato

Adapun sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sangatlah berbeda dengan konsep pidato pada umumnya. Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat tetap, baku dan resmi. Ada halnya konsep pidato secara umum tidak dapat diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sepenuhnya belum bisa mengaplikasikan teori. Dimana konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur ada beberapa hal yang belum diterapkan yakni kurangnya membuka studi literatur, penggunaan bahasa yang belum bervariasi masih terlalu kaku. Namun prinsip penyusunan naskah pidato telah diterapkan semua pada konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas kesatuan, hubungan dan penekanan. Konsep pidato Gubernur dan Wakil

Gubernur *pertama*, memiliki kesatuan antara isi dan tujuan artinya tidak melenceng dari tema kegiatan. *Kedua*, memiliki hubungan antara uraian satu yang lainnya jika memberikan ilustrasi hal tersebut relevan dengan tema kegiatan yang artinya berhubungan. *Ketiga*, memiliki penekanan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang dianggap penting untuk disampaikan selalu ditulis dengan tebal, dimiringkan dan sebagainya sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur mengetahui untuk menekankan tulisan tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Staff Editor**

#### **a. Masalah bahasa**

Adapun saran ataupun masukan dari penulis terhadap Bagian Publikasi khususnya Sub Bagian Editor yakni harus mampu menguasai atau lebih memperdalam ilmu bahasa dan dapat membuat pidato. Karena bahasa merupakan alat komunikasi yang memberikan pemahaman persepsi kepada pendengar.

Pemilihan kata dan bahasa juga harus sangat diperhatikan karena salah satu unsure teori aristoteles bahwa bahasa juga mempengaruhi dihadapan khalayak. Yakni unsur *phatos* menunjukkan imbauan emosional dengan kata-kata yang terpilih,

dengan kalimat yang bervariasi dalam menyampaikan orator di forum.

#### **b. Masalah lambang dalam out line pidato**

Lambang yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tidak boleh membingungkan. Sistem lambang yang tidak tertib akan mengaburkan pikiran penunjang. Ada dua macam sistem lambang yaitu sistem angka dan kombinasi.

Sistem lambang yang digunakan editor dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memenuhi kriteria bukan sistem angka dan bukan sistem kombinasi. Kesalahan lambang akan membuat pemahaman berbeda dan akan membingungkan.

#### **c. Mengumpulkan data**

Data memang diperoleh dari SKPD ataupun mitra kerjanamun juga sebaiknya menambahkan data penunjang melalui studi literature karena akan berbeda isi, wawasan dan kutipan yang lebih berbobot jika membuka studi literatur.

Sudi literature mempengaruhi factor ethos pada teori Aristoteles dimana ethos merupakan kredibilitas sumber (*source credibility*)dimana pengetahuan berlandaskan pendidikan formal

ditambah hasil studi literatur mengenai segala aspek kehidupan yang begitu mendalam dan meluas.

## **2. Protokol**

Dilain sisi juga perlu diperhatikan bahwa jarak waktu penugasan pembuatan pidato sebaiknya seminggu sebelum hari kegiatan sehingga editor lebih memiliki daya waktu berpikir yang lebih lama tanpa harus bekerja dengan dikejar waktu.

## **3. Gubernur**

Selain itu penulis juga memberikan masukan kepada Gubernur dan wakil Gubernur untuk menambah personil Bagian publikasi khususnya Subbag Editor. bahwa kekurangan personil (editor) dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur membuat staff editor kewalahan. Oleh karenanya tidak salah untuk menambah personil lainnya namun dalam arti personil yang berpengalaman dibidangnya ataupun profesional dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta
- Effendi, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kriyanto, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. PT Kencana, Jakarta
- Kurniati, Prima. 2008. *Mekanisme Kerja Sri Junjungan Televisi (SJTV) Bengkalis Dalam Menyiarkan Program Acara “Dondang Sayang”* . Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau
- Kusumaningrat hikmat dkk. 2009. *Jurnalistik Teori & Praktek*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad. 2004. *Menjadi Orator Ulung*, PT Grasindo. Jakarta
- Murfhy, Mohammad Ary. 2009. *Mekanisme Kerja Program Acara Siaran Forum Dialog Di TVRI Riau*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau
- Rogers, Natali. 1982. *Berani Berbicara didepan Publik*. Nuansa. India Muflih
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Retorika Modern Pendekatan Praktis*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Rumpoko, Hadi. 2012. *Panduan Pidato Luar Biasa*. Megabooks, Yogyakarta
- Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan Konsepsi&Aplikasi*.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaja, H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Reneka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Komunikasi dan Humas*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>
- <http://ssgpelajarbahasa.blogspot.com/2011/11/kaitan-retorika-dengan-pidato.html>



## ABSTRAK

### MEKANISME KERJA HUMAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MEMBUAT KONSEP PIDATO GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Publikasi merupakan salah satu bidang yang bernaung dibawah Humas Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu tugas pokok Bagian Publikasi adalah membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Membuat Pidato pejabat bukanlah hal yang mudah karena staff editor harus mampu membuat konsep pidato sebaik mungkin, dan dari konsep pidato tersebut akan dinilai langsung oleh atasan, dan akan dijadikan salah satu tolok ukur kepakaran, kemampuan, dan keterampilannya dalam melaksanakan seluruh tugas. Mekanisme kerja pembuatan konsep pidato inilah yang dikaji oleh penulis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam metode penelitian tersebut yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Rekam kemudian direduksi dan dianalisis dalam bentuk kata-kata, diedit dan dapatlah kesimpulan dan hasil.

Tugas mengenai pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur diatur oleh Peraturan Gubernur No 11 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme Kerja Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 7 tahapan yaitu: menyusun out line pidato, mengumpulkan data atau informasi, menyusun draf pidato, *editing* pidato, verifikasi pidato, *finishing* pidato, dan Publikasi-penyerah.

Analisa penulis berdasarkan teori dapat disimpulkan bahwa konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah cukup baik karena telah memenuhi Kriteria prinsip penyusunan naskah pidato yang terdiri dari kesatuan, hubungan dan penekanan. Namun juga ada beberapa hal yang belum diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, sistem lambang dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur masih salah karena tidak menggunakan sistem lambang atau kombinasi hal tersebut akan berakibat fatal karena akan dapat membuat bingung Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu juga mengumpulkan data dan informasi melalui buku atau studi literatur masih belum diterapkan. Dilain sisi, data penunjang melalui buku akan membuat konsep pidato yang lebih berkualitas. Dimana isi pidato tersebut akan tergambarkan bahwa orator memiliki pengetahuan yang luas dan kredibilitas yang tinggi.

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat baku , Resmi dan tidak berubah. Pidato umum tidak dapat diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur karena pidato Pejabat telah ditetapkan formatnya. Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikerjakan oleh Bagian Publikasi diberikan jangka waktu yang sangat singkat sehingga membatasi daya pikir dan konsentrasi staff editor. Selain waktu yang relative singkat, terkadang kekurangan isi juga menjadi masalah dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan wakil Gubernur.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim...**

Alhamdulillah, pujisyukurhadiran Allah SWT, karnaberkatRahmatdanhidayah-Nyapenulisdapatmenyelaikanskripsiini yang disusunsebagaisalahsatusyaratmencapaigelarSarjanaIlmuKomunikasipada program studiIlmuKomunikasi, FakultasDakwah Dan IlmuKomunikasiUniversitas Islam Negri Sultan SyarifKasim Riau.

Adapunjudulskripsiadalah **“MekanismeKerjaHumasPemerintahProvinsi Riau DalamMembuatKonsepPidatoGubernur Dan WakilGubernur”**.Dalampenyusunanskripsiinipenulisbanyakmendapatdukungandariberbagaipihak, dengantulusdanikhlaspenulismenyampaikanpenghargaan yang tinggidanterimakasihkepada :

1. AyahndadanIbundatercinta yang tiadalelahmemberikanmotivasibaikmorilmaupun non moril. Serta kasihsayang yang terusmengalirkepadaanandatiadatergantikanolehsiapapun.
2. AdindaMohd. GhazalidanMohd. Ilham yang selalumemberikiansemangatkepadakakanda, terimakasihatas rasa banggadanhormat kalian kepadakakanda.
3. Bapak Prof. Dr. H. M NazirKarim, sebagaiRektor UIN SUSKA Riau besertaWakilRektor I, II, III yang telahmemberikankesempatankepadapenulisuntukmenuntutilmu di FakultasDakwahdanIlmuKomunikasi UIN SUSKARiau.
4. Bapak Dr. YasrilYazid, MIS sebagaiDekanFakultasDakwahdanIlmuKomunikasibesertaWakilDekan I, II, III yang telahmemberikankemudahanselamapenulismengikutiperkuliahan.

5. Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim, MA sebagai ketua Jurusan Ilmu Komunikasi beserta anggota yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
6. Bapak Drs. Suhaimi, D.M.Sidan Bapak Yantos, M.Sis selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing skripsi penulis
7. Ibu Listiawati Susanti, M.ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulisan untuk ilmu di Jurusan Ilmu Komunikasi.
8. Ibu Vera Sardila, M.Sis selaku pimpinan pustakawan dan M. Fahmi selaku karyawan pustakawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
9. Bapak Toni Hartono, M.Sis sebagai dosen matakuliah Kapita Selekta yang memberikan pemahaman serta arahan kepada penulis selama menjalankan matakuliah Kapita Selekta sehingga penulis bisa mengerti arah Proposal dan Skripsi
10. Bapak Elfriandri, M.Sis sebagai pengujian munaqasah, terima kasih telah membimbing penulis dalam membuat skripsi ini sehingga penulisan menjadi paham.
11. Humas Pemerintah Provinsi Riau khususnya bagian TU dan Bagian Publikasi yang senantiasa memberikan informasi guna menunjang data dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dan senantiasa disamping penulis baik dalam keadaan susah maupun senang yakni Melia Karmila, Rina Saltira, Annisa Azizah, dan Fitri Afrianti.

Rangkaianwarnawarnipersahabatankitasemogaterusterukirdihatimeskipunnantinyakitaakanterpisaholehruangdanwaktu.

13. KakandaRikiSlametRiadi yang selaluada di saatpenulisdalamsenangdususah. Selalumemberikanmotivasi yang tiadanhenti, keberhasilaninijugauntuk mu. SemogahubungankitaselalumendaptberkaholehIlahiRobbi.
14. Teman-temanbermain yang selalumengisihari-haripenuh ceria yakniFebriskaFista, Syifa Maria, HusniToyib, Eno Jaya Putra, AgungRiadi, Sutomo, IdrisPasharibu, FerdianKurnia, dan Yogi Busada. Maafselamainimungkinpenulisselalumembuatjengkeldankesalnamunsemuaipunulislakukanuntukmembuatikatanpertemanankitamenjadierat.
15. RekanseperjuanganIlmuKomunikasiangkatan 2009, semogakitasemuakelakmenjadi orang yang sukses.
16. Selanjutnyakepadapihak-pihakterkait yang membentupenulisbaikitusecaratenaga, maupun material.

Penulismenyadaribahwapenulisanskripsiinimasijauhdarikesempurnaanolehsebabit uteguranatassegalakekurangansangatpenulisharapkan.Semogaskripsiinibermanfaatbagikit asemua, Amin yarobball' alamin.

Pekanbaru, 07 juni 2013

Penulis





## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GANBAR.....</b>                           | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |             |
| A. LatarBelakang.....                               | 1           |
| B. AlasanMemilihJudul.....                          | 4           |
| C. PenegasanIstilah.....                            | 4           |
| D. Permasalahan .....                               | 4           |
| E. TujuanandanKegunaanPenelitian .....              | 6           |
| F. KerangkaTeoritis.....                            | 8           |
| G. KonsepOperasional .....                          | 36          |
| H. MetodePenelitian .....                           | 38          |
| I. TehnikAnalisis Data.....                         | 41          |
| J. SistematikaPenuilisan .....                      | 41          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>       |             |
| A. SejarahProvinsi Riau.....                        | 43          |
| B. LetakGeografisProvinsi Riau.....                 | 52          |
| C. VisidanMisi Riau .....                           | 55          |
| D. KeberadaanHumas Di PemerintahProvinsi Riau ..... | 58          |
| E. TugasPokokdanFungsiHumas.....                    | 59          |

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

|   |     |
|---|-----|
| A. Mekanisme Kerja Humas.....                         | 70  |
| 1. Penyusunan <i>Out Line</i> .....                   | 71  |
| 2. Mengumpulkan Data/ Informasi .....                 | 77  |
| 3. Menyusun Draf Pidato .....                         | 81  |
| 4. <i>Editing</i> Pidato.....                         | 81  |
| 5. Verifikasi Konsep Pidato .....                     | 99  |
| 6. <i>Finishing</i> Pidato .....                      | 100 |
| 7. Publikasi – Penyerah Pidato.....                   | 100 |
| B. Kendala-Kendala dalam Pembuatan Konsep Pidato..... | 101 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

|  |     |
|--|-----|
| A. Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato ... | 103 |
|--|-----|

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 133 |
| B. Saran .....      | 135 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

**MODEL ARISTOTELES ..... 33**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah berbeda dengan Humas Non Pemerintah, dimana Humas Pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan, namun Humas Pemerintah juga senantiasa menggunakan tehnik publisitas dalam menginformasikan kegiatan Pemerintah.

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi dinas Pemerintah dan lembaga non Pemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial (Ruslan, 107: 2001).

Adanya unit kehumasan pada setiap instansi Pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun ke luar yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas merupakan alat untuk memperlancar jalannya interaksi pada serta penyebaran informasi melalui pers, radio, televisi dan media lainnya.

Pejabat pemerintah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur selalu melakukan rutinitas baik didalam maupun diluar. Aktivitas pejabat yang padat dan selalu menghadiri berbagai kegiatan diluar merupakan sorotan public dan pers. Maka seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dituntut untuk sesempurna mungkin didepan khalayak. apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian didepan forum maka menjadi sorotan media dan akan berakibat fatal terhadap *image* atau citra.

Umumnya pejabat pemerintah muncul dihadapan forum menggunakan naskah pidato dengan membacanya. Jarang sekali pejabat pemerintah menggunakan *impromptu* atau *ad libitum*, yakni penyampaian pidato tanpa naskah.

Pada umumnya pejabat pemerintah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki staff ahli mengenai pembuatan naskah pidato oleh tim penyusun pidato yang khusus diangkat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atau ditetapkan sebagai *Public Relations Officer*(PRO). Oleh karena itu, bagi seorang PRO pengetahuan menyusun naskah pidato sangatlah penting. Hasil karyanya, sebagai salah satu kegiatan operasionalisasi Public Relations (PR) yang akan dinilai langsung oleh atasan dan akan dijadikan salah satu tolok ukur kepakaran, kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan seluruh tugasnya.

Salah satu bidang Humas Pemerintah Provinsi Riau memiliki Bagian Publikasi yang memiliki tugas salah satunya adalah membuat

konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Humas Pemerintah Provinsi Riau tentunya memiliki tanggung jawab dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai kegiatan-kegiatan. tentunya bagian publikasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memenuhi tugasnya sebagai konseptor.

Pembuatan konsep pidato hendaknya dipersiapkan dalam jangka waktu yang lama hal ini bertujuan agar isi (*content*) dapat ditunjang dan bersamaan dengan data yang telah ada, selain itu tentunya isi pidato akan lebih berkualitas.

Hal ini juga didukung oleh Nasihat Culloght, (Rakhmat, 1986 :32) tentang pidato adalah sebelum anda berpidato, jauh-jauh hari sebelumnya sudah mulai mempersiapkan diri sedikit demi sedikit, maka akan menarik keuntungan besar dari persiapan yang seperti itu.

Tuntutan waktu membuat Humasharus menyelesaikan pidato dalam waktu yang relatif singkat bahkan Bagian Publikasi dapat menyelesaikan 20 Naskah dalam sehari. Sedangkan menurut teori pembuatan naskah itu harus dipersiapkan dalam waktu yang lama agar *content* (isi) dapat semenarik mungkin dikemas. Tidak dapat dibayangkan jika penyampaian pidato Gubernur dan Wakil Gubernur salah, tentunya akan dapat berpengaruh terhadap *image*, citra dan kewibawaan pejabat tersebut dan ini akan menjadi masalah besar dimana masyarakat akan kurang memperdulikannya.

Permasalahan ini tentu saja memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkajinya, yakni selain ingin memberikan informasi mengenai tugas hubungan masyarakat Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat, serta bagaimana kinerja dan sistematis pembuatan pidato pada Bidang Publikasi di Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan untuk diteliti lebih jauh tentang peranan Humas Pemerintah Provinsi Riau dengan judul : **“Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau Dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur”**.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Pidato sangat penting karena dapat menentukan citra dan dijadikan tolok ukur atas kemampuan seorang pemimpin.
2. Humas berperan aktif dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menampung segala aspirasi masyarakat.

## **C. Penegasan Istilah**

1. Mekanisme Kerja adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas

sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu tatanan, komunikasi, dan profesional.

2. Humas (*Public Relations*) menurut Dr. Rex F Harlow, mendefinisikan Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan khalayaknya. Melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini public, menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama (Effendi, 2002: 21).
3. Pemerintah Provinsi adalah suatu organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Bagian Publikasi merupakan salah satu bidang yang berada dibawah Humas Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas *editor* untuk membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.



5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk orang banyak.

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam permasalahan ini penulis mengambil pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan membuat konsep pidato secara cepat sehingga mengerjakan konsep pidato secara terburu-buru.
- b. Kurangnya membuka studi literatur dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Seringnya petugas lembur hingga malam untuk menyelesaikan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

##### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi dalam membuat konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

##### **3. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah agar masalah dalam penelitian ini dapat terarah. Adapun yang

menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Mekanisme kerja dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur? Dan apa saja kendala atau hambatan dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mengetahui bagaimana Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai pendalaman terhadap ilmu PR
  - 2). Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya civitas akademika komunikasi mengenai realita tugas Humas Pemerintah Provinsi dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - 3) Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis guna memperdalam dan pengaplikasian ilmu dibidang kehumasan.

## b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pihak Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur
- 2) Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu komunikasi Uin Suska Riau

## **F. Kerangka Teoritis**

Pembahasan kerangka Teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **1. Pengertian Mekanisme Kerja**

Pengertian secara umum dari mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu tatanan, komunikasi, dan profesional.

Mekanisme kerja adalah cara kerja yang dilakukan suatu organisasi, cara kerja mesin. Daryantodalam Murfhy(2009:6).

Mekanisme kerja merupakan bagaimana melaksanakan tugas untuk menyelesaikan, dalam proses pelaksanaan kerja tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, seseorang dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mempunyai pengalaman. Misalnya mekanisme kerja Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana Humas dituntut untuk se kreatif mungkin dan dapat menyelesaikan konsep pidato dalam waktu yang relatif singkat. Mekanisme kerja adalah cara yang dilakukan suatu organisasi atau cara kerja mesin. Hasan Alwi dalam Kurniati (2008:32).

Berbicara tentang mekanisme kerja, semua organisasi memiliki mekanisme kerja yang sama, hanya saja proses penerapan yang digunakan berbeda-beda menyesuaikan dengan tujuan dan anggota dalam organisasi.

Kerja adalah cara tugas-tugas digabungkan untuk menciptakan pekerjaan individu, tingkat fleksibilitas (keluwesan) yang dimiliki pegawai dalam pekerjaan, dan adanya sistem pendukung organisasi agar memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan kinerja. Kerja merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia. Desain pekerjaan berkaitan dengan penentuan struktur hubungan tugas dan hubungan antar pribadi dari suatu pekerjaan dengan menentukan berapa banyak keanekaragaman, tanggung jawab, signifikansi, dan otonomi pekerja diberikan oleh pekerjaannya. Desain pekerjaan berpengaruh besar terhadap efektifitas organisasi. Pekerjaan yang dirancang dengan baik akan dapat

meningkatkan motivasi yang merupakan faktor penentu produk civitas seseorang maupun organisasi. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan sejauh mana tuntutan tugas tersebut. Dengan berkembangnya organisasi dan perubahan faktor lingkungan menyebabkan organisasi perlu melakukan desain ulang terhadap pekerjaan.

Dua strategi utama dalam mendesain ulang pekerjaan adalah spesialisasi tugas atau sering juga disebut dengan penyederhanaan tugas (*Job Simplification*) dan pemekaran pekerjaan (*Job Enlargement*). Dua strategi ini saling bertentangan. Penyederhanaan pekerjaan adalah mengurangi jumlah elemen-elemen tugas yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan pemekaran pekerjaan adalah membuat tugas-tugas lebih kompleks dengan meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan tiap-tiap pekerja.

## **2. Definisi Humas**

Hubungan masyarakat disebut juga *public relation* (purel), dengan ruang lingkup (*scope*) kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu keluar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi.

Hubungan masyarakat merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan public di luar dan di dalam organisasi dengan jalan

berkomunikasi. Sudah tentu komunikasi yang dilakukan tidak sembarangan, melainkan dengan cara-cara disertai seni-seni komunikasi tertentu yang merupakan objek studi ilmu komunikasi yang disebut dengan teknik komunikasi. Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani, *technikos* yang berarti keterampilan.

Hubungan masyarakat juga sebagai metode komunikasi sering disebut humas sebagai lembaga (*public relations as state of being*). Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar. Karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin organisasi.

Menurut Edward L. Bernays mengatakan bahwa Humas memiliki tiga fungsi utama yaitu :

Memberikan Penerangan kepada masyarakat

- a. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- b. Usaha-usaha untuk pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan / lembaga kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada perusahaan dan lembaga. (Ruslan , 2003 : 19)

Yang menjadi tujuan kegiatan Humas adalah Usaha agar masyarakat sadar, sengaja, terencana dan terus menerus mengerti dan mengetahui kegiatan yang dilakukan organisasi atau lembaga. Selain itu,

humas merupakan mediator yang berada diantara pimpinan organisasi dengan publiknya. Baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal.

Kegiatan utama dari Humas dalam mewakili top management suatu lembaga atau organisasi merupakan bentuk kegiatan *two way communications* adalah ciri khas dari fungsi dan peranan Humas. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas Humas bertindak sebagai nara sumber informasi (*source of informations*) dan merupakan saluran informasi (*Channel of informations*).

Humas dalam pemerintahan merupakan wadah yang memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai penyebar informasi dan corong dari pemerintahan. Dalam perkembangan humas masih merupakan permasalahan, baik berupa hambatan, tantangan dan rintangan, di masa belum ada keseragaman masing-masing humas khususnya Humas Pemerintah.

Walaupun kita menyadari Humas bagian yang tidak dapat diabaikan dan perlu disadari pentingnya peranannya. Tugas perangan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi pembangunan bangsa. Humas merupakan bagian dari tugas penerangan dan perlu disadari sedalam-dalamnya bahwa tugas penerangan itu merupakan bagian dari pembangunan sendiri. Karena penerangan merupakan bagian dari komunikasi sosial dan komunikasi sosial ini harus berkembang antara

pemerintah dan masyarakat dan antar kelompok masyarakat itu. Jadi dengan demikian Humas dapat diartikan: Suatu kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh *good will*, kerjasama dan kepercayaan yang ada gilirannya mendapat dukungan dari pihak lain.

### **3. Biro Konsultan Humas**

#### **a. Pengertian Biro Humas**

Praktek konsultasi Humas adalah penyelenggaraan jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, serta di dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum.

Sebagian besar Humas hanya melayani sebagian fungsi-fungsi humas. Sementara itu cukup banyak biro-biro iklan yang berani menawarkan jasa humas. Namun pada umumnya, Humas itu bersifat independen, tidak berada di bawah atau menjadi suatu bagian dari biro iklan. Dalam menjalankan operasi-operasinya, mereka biasanya mengkhususkan diri pada subbidang tertentu saja mengingat cakupan fungsi kehumasan memang sedemikian luasnya.



#### **4. Tujuan Humas**

Mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pihak lain yakni publik (umum, masyarakat). Tujuan Humas adalah untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbale balik.

#### **5. Prinsip Pokok Humas**

- a. Bahwa “Humas bertolak dari dalam Organisasi”. Berhasil tidaknya hubungan suatu organisasi dengan masyarakat sangat di pengaruhi oleh “SIKON” di dalam (intern) organisasi yang bersangkutan.
- b. Bahwa “Tindakan-tindakan membawa nama keseluruhan”. Tindakan-tindakan humas sebenarnya bukan saja dilakukan oleh unit kerja humas sendiri, tetapi juga oleh seluruh jajaran organisasi.

Tugas kehumasan pemerintah meliputi tugas strategis dan taktis. Dimana tugas strategis meliputi tugas yang mengikutsertakan humas dalam *decision making process*, sedangkan tugas taktis meliputi memberikan informasi, memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbale balik, membuat citra yang baik. Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijaksanaan pemerintah. agar dapat menjalankan tugas “taktis” secara baik maka tugas “strategis” perlu dimiliki oleh humas. Tugas strategis ini sangat penting, mengingat humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan

coordinator lalu lintas informasi dengan masyarakat. dengan demikian humas akan selalu dapat mengetahui latar belakang dari pada suatu kebijaksanaan dan keputusan yang diambil.

## **6. Konsep dan Teori Informasi**

### **a. Pandangan Tentang Informasi**

Meski semua orang tahu bahwa informasi merupakan unsur dasar dalam komunikasi, tetapi tidak seluruh orang sepekat mengenai pengertian informasi itu sendiri. Ada yang mengaitkan dengan hal-hal baru yakni seperti orang yang membaca berita-berita di surat kabar atau majalah. Ada pula yang menyamakannya dengan ilmu pengetahuan misalnya informasi yang dikandung sebuah buku ilmiah. Ada lagi yang mengidentikkan dengan data dan angka-angka hasil penelitian. Bahkan ada pula yang menyebut isu yang tidak diketahui hubungannya disebut juga sebagai informasi.

Untuk memperluas pemahaman, Fisher dalam Rakhmat (2004:28) mengelompokkan berbagai pandangan mengenai konsep informasi antara lain: pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. manakala seseorang berbincang dengan lawan bicara; pada saat membaca Koran, majalah, buku, selebaran, spanduk, papan reklame; atau pada waktu mendengarkan radio atau menonton televisi, ketika

itulah sejumlah data dan fakta dapat diingat dan disimpan dalam memori ingatan.

Dalam pandangan pertama ini, informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik lain, dari suatu medium ke medium lain, dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, informasi identik dengan wujud material yang dapat dikirimkan dan diterima melalui berbagai saluran, baik melalui media massa seperti surat kabar, radio dan televisi atau media komunikasi lainnya seperti telepon, facsimile, surat, telegram, kartu, gambar, buku, maupun komunikasi tatap muka, dan bahasa isyarat.

Kedua, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan makna data. Menurut pandangan ini, informasi berbeda dengan data. Informasi adalah arti, maksud atau makna yang dikandung data. Dalam hal ini peranan seseorang untuk memberikan makna pada data memegang posisi yang sangat penting. Suatu data baru dikatakan mempunyai nilai informasi jika dianggap memiliki arti oleh penafsirnya.

#### b. Masalah Bahasa dalam Komunikasi

Bahasa merupakan factor yang sangat penting dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, Kita tidak dapat berkomunikasi. Dua jenis bahasa yang dikenal dalam komunikasi, Yaitu bahasa verbal (lisan) dan

bahasa nonverbal (tulisan, symbol, isyarat). Fungsi bahasa dalam komunikasi adalah untuk mengirimkan pesan.

Menurut Rakhmat (Rakhmat, 1988:118), Ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa. *Pertama*, definisi fungsional yang melihat bahasa sebagai alat yang dimiliki bersama (*socially shared means*) untuk mengungkapkan gagasan. Artinya bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesempatan di antara anggota-anggota kelompok social untuk memakainya.

*Kedua*, definisi formal yang mengatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Artinya kata-kata itu memiliki makna, dan kata-kata tersebut disusun menurut tata bahasa yang berlaku. Setiap bahasa memiliki peraturan penyusunan bahasa (*grammar*) masing-masing.

Hubungan masyarakat (Humas) merupakan bidang yang selalu melakukan kontak langsung dengan pimpinan. Segala aktivitas pimpinan selalu didampingi oleh pihak hubungan masyarakat. Oleh karena itu, maka hubungan masyarakat diberikan delegasi tugas yang salah satu nya adalah membuat konsep pidato.

## **7. Pengertian Menulis Naskah**

Naskah. dengan Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian kemampuan berbahasa, menulis selalu

diletakkan paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis paling akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting.

Dalam menulis semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil yang benar-benar baik. Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai.

Menurut Djago Tarigan dalam Elina Syarif, Zulkarnaini, Sumarno menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Lado dalam Elina Syarif, Zulkarnaini, Sumarno juga mengungkapkan pendapatnya mengenai menulis yaitu: meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain.<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>

Menulis dapat dianggap sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Menurut Heaton dalam St. Y. Slamet menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks.

Menurut Gebhardt dan Dawn Rodrigues *writing is one of the most important things you do in college*. Menulis merupakan salah satu hal paling penting yang kamu lakukan di sekolah. Kemampuan menulis yang

baik memegang peranan yang penting dalam kesuksesan, baik itu menulis laporan, proposal atau tugas di sekolah.

Pengertian menulis diungkapkan juga oleh Barli Bram *in principle, to write means to try to produce or reproduce written message.* Barli Bram mengartikan menulis sebagai suatu usaha untuk membuat atau mereka ulang tulisan yang sudah ada.

Menurut Eric Gould, Robert Diyanni, dan William Smith menyebutkan *writing is a creative act, the act of writing is creative because its requires to interpret or make sense of something: a experience, a text, an event.* Menulis adalah perilaku kreatif, perilaku menulis kreatif karena membutuhkan pemahaman atau merasakan sesuatu: sebuah pengalaman, tulisan, peristiwa.

M. Atar Semi dalam bukunya mengungkapkan pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Burhan Nurgiantoro menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa.

Menulis menurut Mc Crimmon dalam St. Y. Slamet merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. St. Y. Slamet sendiri mengemukakan pendapatnya tentang menulis yaitu kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat

kompleks.<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>

## 8. Pengertian Pidato

Di kalangan para ahli pidato, atau orator, atau retor terdapat suatu pemeo sebagai pegangan yang berbunyi “*Quit Ascendit Sine Labore, Descendit Sine Honore*”. Yang memiliki arti “ siapa yang naik tanpa kerja , akan turun tanpa kehormatan”

Dalam hubungannya dengan pidato, makna *pemeo* tersebut ialah bahwa seseorang yang berpidato tanpa melakukan persiapan, akan mengalami kegagalan, jika gagal maka kehormatannya akan jatuh. Oleh karena itu, seseorang sebelum naik ke mimbar harus melakukan persiapan terdahulu secara seksama.

Hal ini juga didukung oleh Nasihat Culloght dalam Rakhmat (2004:32) tentang pidato adalah sebelum anda berpidato, jauh-jauh hari sebelumnya sudah mulai mempersiapkan diri sedikit demi sedikit, maka akan menarik keuntungan besar dari persiapan yang seperti itu.

**P**idato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya.

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau bisa dikatakan sebagai *public speaking*. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak, dengan maksud agar pendengar pidato dapat mengetahui, memahami, menerima serta diharapkan bersedia melaksanakan segala sesuatu yang disampaikan terhadap mereka.

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik / umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik.

## **9.Prinsip Penyusunan Naskah Pidato**

Prinsip penyusunan naskah pidato secara garis besar terdiri dari:

- a. Kesatuan (*Unity*)
- b. Hubungan (*Coherence*)
- c. Penekanan (*Emphasis*)(Rumpoko, 2012:32).

Naskah pidato secara umum terdiri dari tujuan, materi atau isi dan sifatnya pesan dari isi pidato tersebut. Pidato tentu harus mempunyai tujuan, dan itu jelas tercermin dari naskah pidatonya. Tujuan yang tersurat dari naskah pidato harus jelas, tidak menimbulkan kebingungan, tanda Tanya atau persepsi yang berbeda dari sekalian para pendengar. Oleh karena, tujuan dari pidato harus disampaikan secara jelas, gamblang dan tuntas.



Perihal materi atau isi harus mempunyai satu gagasan yang mendominasi seluruh uraiannya. Pemilihan bahan-bahan penunjang atau pelengkap harus tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga akibatnya malah lebih dominan dibandingkan materi atau isi pidatonya sendiri. Jika hal ini yang terjadi, maka hanya akan menimbulkan kebingungan dari para pendengarnya karena mereka menjadi sulit menangkap isi pidato yang disampaikan.

Satu naskah pidato yang baik, harus mempunyai hubungan antara urutan bagian dari uraian yang berhubungan atau berkaitan satu dan lainnya harus terungkap secara jelas, sehingga keseluruhan pembicaraan dapat dimengerti serta dipahami dengan jelas lagi baik oleh sekalian para pendengarnya.

Seorang orator yang baik harus mampu dan dapat menunjukkan kepada sekalian para pendengarnya bagian-bagian yang penting dari pidatonya akan dapat ditangkap, dimengerti serta dipahami oleh sekalian para pendengarnya tersebut.

Dalam penulisannya dalam naskah pidato, hal-hal yang perlu untuk diterapkan ini ditebalkan, dimiringkan atau juga diberi baris bawah, sehingga ketika menyampaikan pidato, orator mengetahui bahwa ia harus menekankan bagian yang bertanda khusus tersebut kepada para pendengarnya.

## 10. Sistematika Pidato

Naskah pidato sudah tentu harus komunikatif, karena itu harus disusun secara konseptual sistematis. Secara retorika susunan pidato terdiri atas empat bagian :

- a. Pendahuluan,
- b. Penampilan masalah,
- c. Penegasan argumentative,
- d. Kesimpulan (Rumpoko, 2012:40)

Fungsi bagian *pendahuluan* adalah sebagai upaya menyiapkan para hadirin secara psikologis mengenai hal atau masalah pokok yang akan di kemukakan. Suatu pidato akan membangkitkan perhatian para hadirin apabila masalah yang ditampilkannya menyentuh kebutuhan dan kepentingannya.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memikat perhatian hadirin, antara lain :

- a. Menampilkan kutipan pendapat seorang ahli atau tokoh,
- b. Mengajukan pertanyaan,
- c. Menyajikan ilustrasi yang spesifik,

- d. Memberikan fakta yang mengejutkan (*surprise*),
- e. Mengetengahkan hal yang mengandung rasa insani (*human interest*),
- f. Mengemukakan hal yang ganjil.

Dari susunan pidato *penampilan* masalah adalah bagian yang akan di tampilkan pokok pembahasan yang dalam pengurainnya harus bersifat persuasif, yakni mengandung ajakan atau bujukan untuk melaksanakannya. Penampilan pokok pembahasan perlu diberi ilustrasi yang relevan dengan dipatri oleh ungkapan-ungkapan yang menyengat sehingga terasa oleh hadirin, betapa pentingnya masalah yang dibahas untuk dirinya, yang pada gilirannya penting untuk masyarakat atau Negara.

Selanjutnya bagian *argumenta* adalah yang berfungsi memberikan penegasan disertai pengungkapan mengenai cara melaksanakannya atau cara mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dijumpai. Jika berdasarkan pengalaman atau dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan cara pemecahan masalah yang dikemukakan itu, dibagian inilah dilakukan netralisasi, sehingga segalanya menjadi jelas bagi hadirin.

Bagian akhir dari suatu susunan pidato ialah kesimpulan berisi pelandasan. Bagian ini harus singkat, sederhana, dan merupakan kebulatan dari seluruh isi pidato.

Demikianlah beberapa hal mengenai penyusunan pidato yang sering menjadi tugas kahumas. Karena itu kahumas harus mengamati gaya pidato atasannya itu sehingga, dengan menghayati gayanya itu, akan menghasilkan susunan pidato yang memuaskan bagi sang pemimpin.

## **11. Sasaran dan Tujuan Pidato**

Sasaran utama pidato adalah untuk menyampaikan informasi, membangkitkan minat dan meraih simpati atau perhatian dari pendengar sehingga isi pidato tersebut dapat diterima, diketahui, dipahami, serta akhirnya dilaksanakan dengan baik.

Menurut Luqman Hadinegoro (Rumpoko, 2011:15), seseorang orator harus mampu menyajikan isi pidatonya secara sistematis, runtut dan teratur serta menarik dengan diikuti cara penyajian yang juga harus baik sehingga minat dan perhatian dari pendengar akan tergugah dan tertarik menyimak pidato yang diberikan sang orator. Fungsi pidato sangat banyak dan beragam, yang kesemuanya akan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pidato tersebut.

Adapun fungsi-fungsi pidato tersebut di antaranya adalah :

- a. Memberikan Informasi (*to inform*)
- b. Menghibur (*to entertain*)
- c. Membujuk (*to persuade*)
- d. Menarik Perhatian (*to interest*)

- e. Meyakinkan (*to convince*)
- f. Memperingatkan (*to warn*)
- g. Membentuk Kesan (*to impress*)
- h. Memberikan instruksi (*to instruct*)
- i. Membangun Semangat (*to arouse*)
- j. Menggerakkan massa (*to move*), dan lain-lainnya (Rumpoko, 2012:16)

## 12. Pidato yang Memukau

Menurut seorang ahli komunikasi massa, Asul Wijayanto(Rumpoko, 2001:39), agar dapat memukau ada beberapa hal sangat penting berikut ini :

### a. Perhatikan Komunikator

Komunikator adalah pembicara yang akan menyampaikan pesan. Pembicara sebagai komunikator harus memperhatikan penampilan diri agar dapat berpidato dengan baik. Untuk itu, pembicara harus memperhatikan cara berpakaian cara berjalan menuju mimbar, cara berdiri di belakang mimbar, cara memandang pendengar untuk membina kontak bathin dan sebagainya.

Pembicara juga harus menguasai dan memahami benar apa yang akan dikatakan dan cara mengatakannya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pembicara biasanya hanya menyiapkan dengan

matang apa yang akan dikatakan (isi pidato). Pembicara lupa bahwa cara mengatakannya pun harus dipersiapkan secara matang agar pidatonya mencapai hasil seperti yang diharapkan.

b. Pesan adalah masalah yang dipidatokan atau isi pidato.

Pesan atau isi pidato juga harus diuraikan secara jelas agar pendengar sebagai penerima pesan dapat memahaminya. Itulah sebabnya isi pidato akan berupa penjelasan pendapat, alasan, dan bukti.

Tidak harus semua unsur itu ada dalam pidato. Sebab unsur-unsur yang ada dalam pidato dan kedalaman pembahasannya sangat bergantung pada waktu yang tersedia, situasi, pendengar, dan tujuan pidato.

c. Gunakan Sarana Secara Maksimal

Sarana adalah alat yang digunakan dalam berpidato seperti pengeras suara, OHP, dan benda peraga. Pembicara harus memahami cara menggunakan sarana dengan tepat. Sedikit saja melakukan kesalahan dalam menggunakan alat-alat itu, kelancaran pidato akan terganggu.

Pengeras suara memainkan peranan yang sangat penting dalam berpidato. Besarnya volume harus diatur sesuai dengan luasnya

ruang dan banyaknya pendengar. Suara yang terlalu keras akan memekakan telinga. Sebaliknya, suara yang terlalu lemah menyebabkan pendengar tidak dapat menerima isi pidato dengan sempurna. Berkaitan dengan itu, pembicara harus mampu mengatur keras lemahnya suara agar sesuai dengan kebutuhan pendengar.

#### d. Lihat Respek Komunikan

Komunikan adalah orang yang menangkap atau menerima pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dalam bahasa sehari-hari penerima pesan ini disebut pendengar. Pembicara yang ingin berhasil pidatonya harus berusaha mengetahui dan memahami pendengar. Karena pendengarsalah satu unsur yang penting dalam kegiatan berpidato.

### 13. Jenis-Jenis Pidato

Menurut ada tidaknya persiapan, sesuai dengan cara yang dilakukan waktu persiapan, dapat dikemukakan empat macam pidato:

#### a. Pidato tanpa Naskah (*impromptu*)

Pidato tanpa naskah sering disebut pidato secara *impromptu* atau pidato secara *ad libitum*. Pidato dengan cara ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara mimbarawan dengan hadirin terjadi *personal contact* atau kontak pribadi dimana kedua pihak saling

menatap. Selain itu hadirin akan menaruh kepercayaan penuh kepada mimbarawan, karena penyampaian merupakan pencetusan dari ide atau pemikirannya sendiri.

Kerugiannya sangatlah fatal apalagi bagi pemula pidato tentunya dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah, karena dasar pengetahuan tidak memadai. Impromptu mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat atau tidak lancer, gagasan yang disampaikan bisa berantakan dan ngawur karena tidak adanya persiapan dan spontanitas, kemungkinan akan demam panggung.

b. Pidato dengan naskah (Manuskrip)

*Manuskrip* disebut juga pidato dengan naskah. juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Disini tidak berlaku istilah “menyampaikan pidato” tetapi “membacakan pidato”. Manuskrip diperlukan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan kata saja dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat buruk pada pembicara. Manuskrip juga dilakukan oleh ilmuwan yang melaporkan hasil penelitian dalam pertemuan ilmiah.

Manuskrip tentu saja juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan-keuntungan adalah diantaranya kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip



dapat disusun kembali, kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan serta manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak.

Ditinjau dari komunikasi kerugiannya cukup berat diantaranya komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah memperpendek atau memperpanjang pesan, pembuatannya lebih lama dan sekedar menyiapkan garis-garis besarnya (*Outline*) saja.

### *c. Memoriter*

Pesan pidato ditulis dan kemudian diingat kata demi kata. Seperti manuskrip, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Tetapi karena pesan sudah tetap, maka tidak terjalin saling hubungan antara pesan dan pendengar, kurang langsung, memerlukan banyak waktu dalam persiapan, kurang spontan, perhatian beralih dari kata-kata kepada usaha mengingat-ingat. Bahaya terbesar timbul bila satu kata atau lebih hilang dari ingatan. Seperti penulisan manuskrip, maka naskah memoriter pun harus ditulis dengan gaya ucapan.

#### *d. Ekstempore*

Ekstempore adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Pidato sudah dipersiapkan sebelumnya berupa *out-line* (garis besar) dan pokok-pokok penunjang pembahasan (*supporting points*). Tetapi pembicara tidak berusaha mengingatnya kata demi kata. *out-line* itu hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran kita.

Keuntungan ekstempore ialah komunikasi pendengar dan pembicara lebih baik karena pembicara berbicara langsung kepada khalayak, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan.

Bagi pembicara yang belum ahli kerugiannya adalah persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru, pemilihan bahasa yang jelek, kefasihan yang terhambat karena kesukaran memilih kata dengan segera, kemungkinan menyimpang dari *out-line*, dan tentu saja tidak dapat dijadikan bahan penerbitan.

#### **14. Persiapan Menyusun Naskah Pidato**

Humas sebagai terjemah dari *public relations* dewasa ini sudah menjadi profesi yang bersifat ilmiah (*scientific*). Dalam ilmu komunikasi penulisan pidato termasuk *retorika*. Retorika mempunyai dua pengertian, secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit retorika adalah

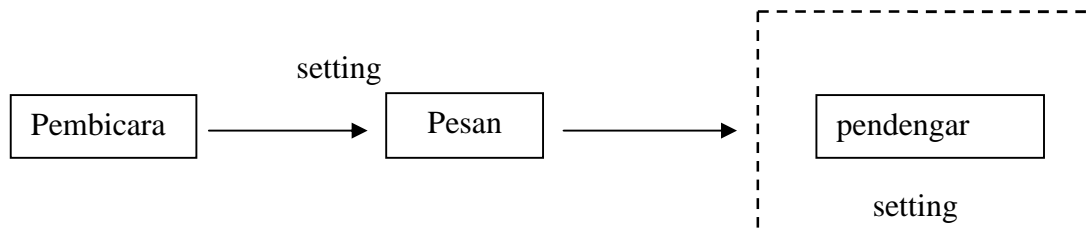
seni bicara didepan umum atau publik, singkatnya, retorika adalah pidato. Dalam pengertian luas retorika tidak hanya merupakan *seni bicara*, tetapi *seni menulis*.

Suatu pidato yang disusun oleh kehumasan untuk dibacakan atasannya, tidak hanya merupakan paparan informatife yang berisi keterangan atau penjelasan, tetapi persuasif, yakni mengandung ajakan atau bujukan sehingga para hadirin tergerak hatinya untuk melaksanakannya. Dalam hubungan dengan tugas penyusunan naskah pidato, seorang kehumasan harus mengobservasi dan meneliti gaya bicara atasannya dalam suatu pertemuan intern, misalnya ketika memberikan *Brifing* kepada para pegawai.

Biasanya, jika seorang pejabat meminta dibuatkan naskah pidato kepada kehumasan, ia hanya menyebutkan topiknya disertai hal-hal tertentu yang dianggap penting untuk dijadikan bahan penyusunan. Oleh karena itu kahumas harus mempunyai data mengenai segala bidang guna menjadi penunjang naskah pidato yang disusunnya itu, sebab bobot suatu pidato ditentukan oleh data penunjangnya. Kahumas yang terampil akan menguasai salah seorang karyawannya untuk mengelola segala data yang mungkin pada suatu ketika diperlukan.

## 15. Model Aristoteles

Model aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retorik (*rhetorical model*). Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (*speaker*), pesan (*message*) dan pendengar (*listener*).



Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan suatu keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan di majelis legislatif dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh karena bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, Aristoteles tertarik menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato.

Menurut Aristoteles ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia. *Pertama*, harus sanggup menunjukkan kepada khalayak memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat (ethos). *Kedua*, harus menyentuh hati khalayak : perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang (pathos). *Ketiga*, meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti dilihat pada respon khalayak (logos).

Sebagai seorang orator, harus memiliki persyaratan meliputi aspek-aspek psikis dan fisik, aspek teoritis dengan dilengkapi kegiatan praktek yang harus terdapat factor-faktor *Ethos, Pathos, dan Logos*.

*Ethos* yang merupakan kredibilitas sumber (*Source Credibility*) dimana pengetahuan berlandaskan pendidikan formal ditambah hasil studi literature mengenai segala aspek kehidupan yang begitu mendalam dan meluas.

*Pathos* menunjukkan imbauan emosional (*Emotional Appeals*). Dengan kata-kata yang terpilih, dengan kalimat yang bervariasi dalam menyampaikan orator dihadapan khalayak.

*Logos* menunjukkan imbauan logis (*Logical Appeals*) yang diketengahkan dalam suatu pidato berdasarkan pemikiran yang mantap.

Menurut aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa anda (ethos-keterpercayaan anda), argumen anda (logos-logika dalam pendapat anda), dan dengan memainkan emosi khalayak (phatos-emosi khalayak). Dengan kata lain faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek

persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya dan cara penyampaianya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu dalam suatu keadaan emosi.

Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. Seseorang berbicara, pesannya berjalan kepada khalayak dan khalayak mendengarkan. Tahap-tahap dalam peristiwa itu berurutan alih-alih terjadi secara simultan. Disamping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang bertujuan (disengaja) yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya.

Kelemahan lain model retorik ini adalah tidak dibahasnya aspek-aspek non verbal dalam persuasi. Meskipun demikian, kita harus bersifat adil untuk tidak menilai model komunikasi dengan perspektif kekinian. Jelas bahwa model aristoteles ini, telah mengilhami pakar-pakar komunikasi lainnya untuk merancang model komunikasi yang lebih baik. Kebanyakan model komunikasi lebih baru yang dikembangkan para ahli sejak zaman aristoteles tetap mengandung tiga unsur yang samayakni sumber yang mengirimkan pesan, pesan yang dikirimkan dan penerima pesan tersebut.

## **G. Konsep Operasional**

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih jelas maka perlu adanya konsep operasional. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan dan permasalahannya, maka konsep operasional peneliti dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator untuk mengukur permasalahan tersebut:

### **1. Indikator Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:**

#### **a. Menyusun *out line* pidato**

- 1). Pembukaan
- 2). Tema
- 3). Isi pidato
- 4). Tujuan / Sasaran
- 5). Kesimpulan
- 6). Penutup

#### **b. Mengumpulkan data atau informasi**

- 1). Dokumen
- 2). SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 3). Mitra Kerja
- 4). Media

- a). cetak
  - b). audio
  - c). audio visual
- 5). Buku / Literatur
- c. Penyusun draf pidato
    - 1). Pemilihan kata
    - 2). Pemilihan kalimat atau bahasa
  - d. *Editing* pidato
    - 1). SKPD
    - 2). Mitra Kerja
    - 3) *editing* Humas
  - e. Verifikasi konsep pidato
    - 1). Kasubbag
    - 2). Kabag Publikasi
    - 3) Kepala Biro
  - f. *Finishing* pidato
    - 1). Kepala Biro
    - 2). Gubernur atau Wakil Gubernur.



g. Publikasi-penyerah pidato

1). Humas

2). Ajudan Gubernur

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Riau tepatnya di Bidang Publikasi Kantor Gubernur Jln. Jendral. Sudirman No. 460 Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Humas Pemerintah Provinsi Riau.

b. Objek

Dalam penelitian ini adalah Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Utama(*Key Informan*)**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, atau orang yang diwawancarai, serta dokumen (Moleong, 2004: 157). Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Publikasi, Kasubbag Editor dan 3 orang Staff Editor sehingga seluruh informan berjumlah 5 orang, kemudian hasil observasi dan dokumen-dokumen yang ada di Humas Pemerintah Provinsi Riau.

#### **b. Sumber Data Pelengkap**

Adapun tehnik penentuan informan adalah tehnik Purposive dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif penulis, dengan begitu penulis menentukan sendiri informannya (Subagyo, 1999: 31).

Sumber data pelengkap sebagai data pendukung dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Humas Pemerintah Provinsi Riau.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara) yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informasi atau otoritas atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dasar interview yang penulis tanyakan yaitu Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan yakni melalui Rekam, Reduksi, dianalisis dalam bentuk kata-kata kemudian di edit dan hasil.

- b. *Observasi* yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kondisi riil yang terjadi pada Bagian Publikasi Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Observasi yang saya lakukan adalah observasi tidak terlibat, dimana saya hanya mengamati secara langsung dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

- c. *Dokumentasi* yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

## **I. Teknik Analisis Data**

Menurut Sumadi Surya Brata secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenal situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka, menarik kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1998:24).

Teknik analisa data yang saya lakukan yakni berawal dari interview yang kemudian direkam kemudian direduksi dan dianalisis yang hasil datanya berupa kata-kata.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis susun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam pembahasan ini berisikan tentang :

Latar Belakang, Alasan memilih Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis

dan Konsep Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, menggambarkan tentang : Sejarah Provinsi Riau, Letak Geografis Provinsi Riau, Tugas Pokok dan Fungsi Humas Pemerintah Provinsi Riau, Kondisi dan Struktur Humas Pemerintah Provinsi Riau.

**BAB III PENYAJIAN DATA**, dalam pembahasan ini berisikan masalah bagaimana Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

**BAB IV ANALISA DATA**, dalam pembahasan ini penulis mengemukakan pandangan yang berhubungan dengan Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur dan faktor pendukung dan penghambat dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

**BAB V PENUTUP**, berisikan kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Provinsi Riau**

##### **1. Periode 5 Maret 1958-6 Januari 1960**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957. kemudian diundangkan dalam undang-undang nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam undang-undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Jo lembaran negara No.75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra Tingkat II:

- a. Bengkalis
- b. Kampar
- c. Indragiri

d. Kepulauan Riau, temakutub dalam undang-undang no. 8 tahun 1956 No.25)

e. Kotoparaja Pekanbaru. temakutub dalam undang-undang No. 8 tahun 1956 No.19.

Dengan ini Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di TanjungPinang oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr.Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau.

Sering dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI Pemerintah di Kabupaten mulai diterbitkan. sebagai Bupati Inderagiri di rangat ditunjuk Tengku Bay. di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor

Gubernur Tanjung Pinang,yaitu Bupati Dt.Abdurrahman dibantu oleh Wedana T.Kamuruzzaman.

## **2. Pemindahan Ibu Kota**

Karena situasi daerah telah mulai aman,maka Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah memulai difikirkan untuk menetapkan Ibu Kota Provinsi Riau hanya Bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No.Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus.Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958- No.21/0/03-D/58 dibentuk panitia penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I

## **3. Daerah Swatantra Tingkat I Riau**

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat. penguasa perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat



Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia Interdepartementel kepentingan pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. sebagai pelaksana di daerah di bentuk pula satu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol.Kaharudin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres no. 6/1959 sekaligus direalisasikan.

Gubernur Mr.S.M.Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Gedung sekolah Pei Ing pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

#### **4. Periode 6 Januari 1960 – 15 November 1966**

Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala

Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan Ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibukota.

## **5. Pekanbaru Menjadi Ibukota**

Aparatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di Gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari:

- a. Wan Ghalib
- b. Soeman Hs
- c. Muin Sadjoko

Anggota-Anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen disusunlah Program Kerja Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

- a. Pemulihan pehubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat
- b. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
- c. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekuen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharudin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantara pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, Gedung Pertemuan Umum (Gedung Trikora), Gedung Universitas Riau, Wisma Riau Masjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putra dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan Pemerintah Daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan *Hearing* dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan di samping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah yaitu Dt.Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsure Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideology bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal atas dasar

Nasakomisasi ini maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur Pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah Kabupaten yang ada stagnasi dalam kelancaran jalannya roda Pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-siapi dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan Sk.No615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Dengan di angkatnya Kolonel Arifn Achmad sebagai wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/443-1506. Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jendral Basuki Rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada Tanggal 15 November 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifn Achmad Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan surat keputusan NO. UP/6/136-260, TERTANGGAL 24 Februari 1967. surat keputusan tersebut diperbarui dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146/M/1969 TERTANGGAL 17 Nopember 1969.

Hinga Sekarang ini pejabat Gubernur Riau Sudah mengalami beberpa kali Pergantian, yaitu :

- a. Mr.S.M.Amin Periode 1958-1966
- b. H.Kaharudun Nasution Periode 1960-1966
- c. H.Arifin Achmad Periode 1966-1978
- d. Hr.Subrantas.S Periode 1978-1980
- e. H.Prpto Prayinto (Plt) 1980
- f. H.Imam Munandar Periode 1980-1988
- g. H.Baharudin Yusuf (Plh)1988.
- h. AtarSibero(Plt)1988
- i. H.Soeripto Periode 1988-1998
- j. H.Saleh Djasit Periode 1998-2003
- k. H.M.Rusli Zainal Periode 2003-2008
- l. H.Wan Abubakar Periode 2008
- m. H.M.Rusli Zainal Periode 2008-Sekarang .

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drasti terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya

pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten / Kota sekarang hanya menjadi 11 kabupaten / Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah (1). Kuantan Singingi, (2). Indragiri Hulu, (3). Indragiri Hilir, (4). Pelalawan, (5). Siak, (6). Kampar, (7). Rokan Hulu, (8). Bengkalis, (9). Rokan Hilir, dan Kota (10). Pekanbaru, (11). Dumai.

## **B. Letak Geografis Provinsi Riau**

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik Provinsi Riau berada dalam kawasan yang sangat strategis, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1 15' Lintang Selatan sampai 4 45' Lintang Utara atau antara 100 03' -109 19 Bujur Timur Greenwich dan 6 50' -1 45' Bujur Barat Jakarta (Badan Perencanaan Pusat Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2007:1).

Provinsi Riau mempunyai luas 107.94 Km<sup>2</sup> dengan persentasi luas Daratan sebesar 80,11 persen dan Lautan seluas 19,89 Persen. Hal ini berbalik ketika kepulauan Riau masih merupakan bagian dari Provinsi Riau, dimana

lautan lebih luas dari Daratan. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting bagi prasarana perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, 2007:2).

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan daerah tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Berhala
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan
- d. Sebelah Barat: provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dari posisi ini kelihatan bahwa provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : Provinsi Sumatra utara, Sumatra barat, jambi, dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) Negara Tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan memberikan keuntungan kepada Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang tersebut tidak saja di sector ekonomi tetapi bisa di sector lainnya.



Memasuki era otonomi daerah, permasalahan – permasalahan batas-batas daerah menjadi mengemuka. Dikatakan penting karena terkait langsung dengan upaya penambahan dan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepastian hukum bagi masing-masing Daerah. Dalam konteks penyelesaian batas-batas Daerah dibentuk tim dari masing-masing daerah dan dibawah koordinasi Tim Penyelesaian dan Penerapan Batas Daerah (TPPBD). TPPBD provinsi Riau dibentuk dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 26 November 2001 Nomor : Kpts. 530/XI/2001 dan disempurnakan dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 22 Maret 2003 Nomor : 137/III/2003.

Sampai saat ini penyelesaian batas-batas wilayah, baik antar Provinsi maupun batas-batas antar Kabupaten masih banyak yang belum diselesaikan. Misalnya saja batas Laut antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyangkut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan Provinsi mempunyai hak dalam pengelolaan hasil kekayaan laut sepanjang 12 mil Laut. Namun sampai sekarang, batas 12 mil laut masing-masing Provinsi masih belum jelas.

Begitu juga batas antar Kabupaten/kota yang ada di provinsi riau yang perlu dilakukan pengukuran agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk melakukan upaya dalam melakukan tapal batas masing-masing kabupaten / kota yang ada di Riau. Usaha nyata yang sudah dilakukan adalah penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu,

sekarang sudah bisa diselesaikan. Belum lagi batas antar kecamatan maupun batas antara desa yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

## **C. Visi dan Misi Riau**

### **1. Visi Riau**

Filosofi pembangunan Daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “*Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi*”. Posisi Strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur Perdagangan dan Ekonomi Internasional.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara local, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat riau maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin dan beradat istiadat melayu yang agamis, maka disusunlah visi riau sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 Tentang Poal dasar Pembangunan daerah provinsi tahun 2001-2005 yakni :”*Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan*

*Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Serta Lahir Dan Batin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”.*

Untuk memberikan gambaran untuk penjabaran visi riau 2020, telah dirumuskan visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu sesuai dengan Perda Provinsi Riau No 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan No 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008, guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan Visi antara Provinsi Riau, yakni :”  
*Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Mengentaskan Kemiskinan, Pembangunan Pendidikan Yang Menjamin Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Kemudahan Aksesibilitas, Dan Pengembangan Kebudayaan Yang Menempatkan Kebudayaan Melayu Secara Proposional dalam Kerangka Kebudayaan”.*

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi antara Provinsi Riau kurun waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan visi Riau 2020, maka kedepan Misi pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan professional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat
- d. Mewujudkan perekonomian potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis
- f. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama , seni budaya dan moral
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan public.
- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan

- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

#### **D. Keberadaan Humas di Pemerintah Provinsi Riau**

Humas Provinsi Riau berada dibawah asisten I Gubernur Provinsi Riau. Humas di Pemerintah Provinsi Riau terletak dalam suatu Biro yang dinamakan Biro Humas.

Humas di Pemerintah Provinsi Riau bertugas sebagai mediator antara public dan pemerintah. Yang dimaksud fungsi dan Humas hanya sebagai mediator adalah Humas bertindak sebagai komunikator dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada publik. Kemudian Biro Humas sebagai komunikator dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan Pemerintah.

Publik sasaran Humas Pemerintah Provinsi Riau adalah public internal yaitu jajaran pemerintahan yang berupa instansi-instansi pemerintah di Provinsi Riau sendiri dan public eksternal yaitu masyarakat Riau pada umumnya dari kalangan manapun.

Kebijakan yang disampaikan bukan hanya kebijakan yang berasal dari pemerintah Provinsi Riau sendiri akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Humas**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau maka tugas pokok dan fungsi Humas adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan untuk pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan perencanaan pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- e. Mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- f. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah untuk pengumpulan informasi.

## **2. Bagian Pengumpulan Informasi**

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pendataan informasi, penyaringan informasi, dan tata usaha biro.

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan program pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- b. Melaksanakan program pendataan informasi dan penyaringan informasi
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan pendataan informasi dan penyaringan informasi.

- e. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana.
- f. Melaksanakan penatausahaan biro.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Pengumpulan Informasi terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Pendataan Informasi**

Kepala Sub Bagian Pendataan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.
- b). Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bagian.

### **2). Sub Bagian Penyaringan Informasi**

Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi



non pemerintah yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.

- b). Menyiapkan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

### **3). Sub Bagian Tata Usaha Biro.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerimaan dan pengolahan surat masuk dan surat keluar biro
- b). Menyiapkan bahan arsip/ laporan/ data-data lain secara sistematis pada biro
- c). Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana program/ kegiatan serta rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan dan melaksanakan inventarisasi di lingkungan biro.
- d). Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan biro, yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala.

- e). Menyipakan bahan administrasi keuangan di lingkungan biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas, serta hak-hak keuangan lainnya.
- f). Melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup biro.
- g). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
- h). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **3. Bagian Penyajian Informasi**

Kepala Bagian penyajian informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraantugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.

Kepala Bagian Penyajian Informasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- b. Melaksanakan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan pers, dokumentasi dan distribusi
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Penyajian Informasi, terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Hubungan Pers**

Kepala Sub Bagian Hubungan Pers, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan pers dengan Pemerintah Provinsi Riau
- b). Melaksanakan hubungan dengan pers untuk menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **2). Sub Bagian Dokumentasi**

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, mempunya tugas:

- a). Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual
- b). Menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- c). Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi
- d). Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **3). Sub Bagian Distribusi**

Kepala Sub Bagian Distribusi, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan data, bahan dan informasi untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait
- b). Melaksanakan distribusi penerbitan internal dan eksternal
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **4. Bagian Penerangan**

Kepala Bagian Penerangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program penyuluhan, pemberitaan dan penerbitan.

Kepala Bagian Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penerangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- c. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- d. Melaksanakan koordinasi penyebaran informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Riau melalui media massa baik cetak, elektronik maupun on-line
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagaian Penerangan terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Bina Penyuluhan**

Kepala Sub Bagian Bina Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyuluhan di bidang kehumasan.
- b). Melaksanakan penyuluhan di bidang kehumasan.
- c). Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

### **2). Sub Bagian Bina Pemberitaan**

Kepala Sub Bagian Bina Pemberitaan, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan analisis pemberitaan
- b). Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
- c). Menyiapkan konferensi pers dan press release
- d). Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

### **3). Sub Bagian Bina Penerbitan**

Kepala Sub Bagian Bina Penerbitan mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerbitan
- b). Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik

- c). Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, duka cita dan iklan pembangunan di media massa baik cetak maupun elektronik.
- d). Melaksanakan pembuatan agenda / buku kerja, kalender dan penerbitan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **5. Bagian Publikasi**

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program audio visual, publikasi dan editor.

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penggunaan audio visual yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- c. Melaksanakan editing konsep pidato Gubernur Riau
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro

Bagian Publikasi, terdiri atas:

### **1). Sub Bagian Audio Visual**

Kepala Sub Bagian Audio Visual, mempunyai tugas:

- a). Menghimpun hasil peliputan audio visual kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

- b). Menyiapkan dan melakukan perbaikan hasil peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau, sebelum dipublikasikan.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **2). Sub Bagian Publikasi**

Kepala Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas:

- a). Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual melalui media elektronik dan *on-line*
- b). Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan.
- c). Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun
- d). Melaksanakan pembuatan baliho, spanduk dan *running text* untuk menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **3). Sub bagian Editor**

Kepala Sub Bagian Editor, mempunyai tugas :

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur
- b). Melaksanakan editor terhadap konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

- c). Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyusunan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.



## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau khususnya di Bidang Publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Mekanisme Kerja yang berkaitan dengan bagaimana proses pembuatan pidato, serta faktor-faktor pendorong dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya pada Bab pendahuluan yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **A. Mekanisme Kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur**

Data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian berupa hasil wawancara langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data mengenai mekanisme kerja dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, penulis mengadakan wawancara kepada subjek penelitian yaitu kepada Kabag Publikasi, Kasubbag Editor dan Staff Editor Publikasi Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun persiapan teknis mengenai penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi pencarian data, proses pembuatan dan hasil

pidato. Persiapan petunjuk teknis berawal dari draf yang diberikan oleh SKPD terkait .

Setelah data terkumpul selanjutnya penelitian disajikan pada bab III sesuai dengan sistematika penelitian yang telah peneliti tetapkan. Adapun mekanisme kerja Humas Pemerintah Provinsi Riau dianalisis berdasarkan hasil wawancara secara terstruktur yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

#### **1. Menyusun *Out Line* Pidato.**

Garis-garis besar (outline) pidato merupakan pelengkap yang amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan keharusan bagi pembicara baru. Garis besar adalah peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Peta ini memberikan petunjuk dan arah yang akan dituju. Garis besar yang salah akan mengacaukan pembicaraan, begitu juga sebaliknya garis besar yang teratur akan menertibkan pembicaraan.

Humas Pemerintah Provinsi Riau biasanya menyusun out line (garis besar) pidato, berawal dari judul atau tema kegiatan kemudian dirangkumlah kapan acara kegiatan dilaksanakan, siapa saja yang menghadiri dan pesan apa yang akan disampaikan. Outline berguna untuk mengarahkan pembuatan konsep pidato dan hal-hal pokok yang menjadi

sasaran pidato yang dijelaskan oleh bapak Darusman (**Wawancara, Kabag Publikasi, Rabu 08 Mei 2013**)

**a. Pembukaan**

Pembukaan pidato merupakan awal pembuka pidato yang berisi salam pembuka, puji syukur dan shalawat.

Contoh:

**Paragraf 1**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Wr, Wb**

**Salam Sejahtera bagi kita semua,**

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Yth. Saudara Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Pemerintah Provinsi Riau

Yth. Saudara Kapolda Riau beserta kapolres / Kapolesta Se Provinsi  
Riau

Yth. Saudara Kepala Dinas / Instansi terkait di lingkungan Pemerintah  
Provinsi Riau dan di lingkungan Pemerintah Kab / Kota Se-  
Provinsi Riau

Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kab / Kota Se  
Provinsi Riau

Yth. Saudara Narasumber pada Rapat Koordinasi dan Fasilitasi  
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka  
Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak Se Provinsi  
Riau.

Yth. Peserta Rapat dalam Rangka Pengendalian Penggunaan Bahan  
Bakar Minyak Se Provinsi Riau Tahun 2013 dan Hadirin yang  
berbahagia.

## **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruangan ini dalam acara rapat koordinasi dan fasilitasi pengendalian penggunaan bahan bakar minyak Se Provinsi Riau.

## **Paragraf 3**

Kemudian shalawat beriringkan salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah meninggalkan warisan dan pedoman hidup yang sangat berharga dan mulia kepada kita umat islam, yakni berupa Al-Qur'an dan Sunnah, untuk itu marilah kita bershalawat kepada beliau **“Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad Wa Ala Ali Muhammad”**, semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at dari beliau pada hari kiamat kelak.

### **b. Tema**

Tema merupakan landasan/ pedoman yang mengacu suatu kegiatan atau acara.

Contoh :

## **Paragraf 4**

**“Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri ESDM NO. 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak”**

Jadi tema merupakan pedoman atau landasan untuk membuat konsep pidato, guna tema adalah agar subbag editor senantiasa mencari

data atau informasi yang berkaitan dengan tema. Selain itu juga bertujuan untuk membatasi isi pidato agar tidak membahas topic yang melenceng dari tema (Rakhmat, 2004: 13).

### **c. Tujuan Pidato**

#### **Paragraf 5**

##### **Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan pemerintah dengan melakukan pentahapan pembatasan penggunaan BBM jenis tertentu atau bersubsidi dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak tidak terlepas dari upaya agar subsidi yang telah direncanakan tepat sasaran dan dinikmati oleh yang berhak menerima dengan tujuan agar kuota BBM Tahun 2013 dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

#### **Paragraf 6**

##### **Hadirin yang saya Hormati,**

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang timbul, permasalahan itu antara lain berkaitan dengan kurangnya sosialisasi peraturan Menteri ESDM dimaksud, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya kesadaran pengguna BBM bersubsidi yang tidak berhak menikmati sesuai amanat peraturan tersebut.

#### **Paragraf 7**

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, saya himbau kepada semua elemen Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab / Kota agar secara bersama-sama untuk berkoordinasi, mensosialisasi, memfasilitasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dimaksud.

#### **Paragraf 8**

Saya juga menghimbau agar pemerintah Kab / Kota dalam menjalankan tugasnya meminimalisir permasalahan yang muncul dalam penyaluran Bahan bakar Minyak Bersubsidi, juga menyusun langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian penggunaan

Bahan Bakar Minyak agar tepat sasaran dan mensosialisasikan dan memfasilitasi program dimaksud di daerah.

#### **d. Isi Pidato**

##### **Paragraf 9**

###### **Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya memberikan subsidi atau bantuan berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan subsidi yang diberikan seperti pupuk, energy, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

##### **Paragraf 10**

Pada APBN Tahun 2012 kebijakan pemberian subsidi untuk sector energi dianggarkan sebesar 312 Triliun terdiri dari subsidi untuk listrik sebesar 89,2 Triliun, sedangkan subsidi untuk BBM sebesar 137,4 Triliun (untuk alokasi sebanyak 40 juta kilo liter).

##### **Paragraf 11**

Sampai akhir tahun 2012 terjadi beberapa kali penambahan alokasi untuk subsidi BBM karena banyaknya terjadi kekurangan kuota BBM di beberapa Provinsi dan termasuk Provinsi Riau.

##### **Paragraf 12**

Jumlah total alokasi BBM bersubsidi secara Nasional Tahun 2012 setelah penambahan menjadi 222,8 Triliun (alokasi BBM menjadi sebanyak 45,3 juta kilo liter), terjadi peningkatan konsumsi BBM sebanyak 85,4 Triliun atau 5,3 juta kilo liter).

##### **Paragraf 13**

Oleh karena melihat besarnya jumlah alokasi anggaran untuk subsidi sector energy khususnya Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak.

##### **Paragraf 14**

###### **Hadirin yang saya Hormati.**

Upaya pemerintah dalam rangka mengurangi beban subsidi energy yang semakin besar setiap tahunnya dalam APBN, pada awalnya dengan menetapkan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2012 dan

diganti lagi dengan No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

#### **Paragraf 15**

Berdasarkan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk transportasi darat, dilaksanakan oleh:

- Penetapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *Untuk Transportasi Jalan*, mulai berlaku untuk jenis:
  1. Kendaraan dinas tehitung mulai **Tanggal 1 Februari 2013**
  2. dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) berlaku mulai **Tanggal 1 Maret 2013**
- pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *untuk Transportasi Laut*, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.

#### **e. Kesimpulan**

#### **Paragraf 16**

**Hadirin yang saya Hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga apa yang menjadi harapan kita untuk mensukseskan program ini dapat kita raih demi kesejahteraan masyarakat. Kepada peserta kiranya dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan maksimal, dan saya harapkan Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Implementasi Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak Se Provinsi Riau dan adanya kesimpulan rapat yang mampu menjawab hal-hal berkaitan dengan upaya pemaksimalan kebijakan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

#### **f. Penutup**

Penutup merupakan bagian akhir dari pidato. Biasanya penutup pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berisi pantun dan salam.

Contoh:

### **Paragraf 17**

Akhir kata dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Se Provinsi Riau Tahun 2013, Secara resmi saya nyatakan Dibuka.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

**Terima Kasih,**

**Wassalamu’alaikum Wr. Wb**

## **2. Mengumpulkan Data/ Informasi**

Data atau informasi yang diperoleh harus disusun kembali dan mengemas data dan informasi. Data informasi bisa saja didapatkan dari SKPD ataupun mitra kerja dan media internet.

### **a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).**

Humas biasanya mengumpulkan data atau informasi melalui SKPD terkait pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Koordinasi antara Humas dengan SKPD diatur oleh Pergub Riau No. 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.



Adapun SKPD yang bekerjasama dengan Humas Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan draf guna menunjang data dan memudahkan humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam nota dinas diantaranya:

- 1). BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
- 2). Biro Hukum
- 3). Badan Kesbang Polinmas
- 4). Dinas Pendidikan Tingkat I
- 5). Dinas Perkebunan
- 6). Biro Tata Pemerintahan
- 7). Dinas Kesehatan
- 8). Biro Administrasi Perekonomian

**b. Mitra Kerja Sama Non SKPD**

Adapun mitra kerjasama antara pihak Humas dengan pihak swasta lainnya, yaitu:

- 1). PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepri
- 2). PT. Garuda Indonesia
- 3). Tribun

- 4). UR
- 5). UIN
- 6). UIR
- 7). UNILAK
- 8). PONPES Naga Beralih, Kab. Kampar
- 9). Dan lain sebagainya,

Menurut Bapak Darusman, SKPD ataupun mitra kerja yang berkoordinasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di naungan Pemerintah Provinsi dan pihak swasta yang telah diatur dalam nota dinas. adapun bentuk koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan mitra kerja tidak terlalu formal bisa saja SKPD terkait yang mengantarkan draf ke Humas, ataupun bisa saja mengirimkan melalui Email, Fax selain itu Bagian Publikasi juga melakukan komunikasi secara terus menerus dengan SKPD terkait baik melalui telekomunikasi seperti HP dan jejaring sosial lainnya.

Panduan Humas dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah draf yang diberikan dari SKPD ataupun mitra kerjasama Hal ini agar pidato tersebut tidak menyimpang dari kegiatan tersebut. Selain itu juga bertujuan apabila ada keraguan atau hal yang masih keliru dapat ditanyakan langsung kepada pihak terkait. karena kita tahu bahwa penampilan Gubernur dan Wakil Gubernur di forum

sangat diperhatikan oleh pers oleh karena itu data yang diberikan haruslah valid. **(Wawancara Kabag Publikasi, Senin 06 Mei 2013)**

Jika Humas tidak menerima Draf dari SKPD ataupun mitra kerja, protokol yang memberikan tema atau judul serta waktu dan tempatnya. Jika hal ini terjadi tentunya sangat menyulitkan Humas karna tidak ada pedoman ataupun bahan dasar. Subbag Editor harus mencari sendiri isi ataupun gagasan untuk ditampilkan. Beda halnya dengan draf yang diberikan oleh SKPD hal ini sangat memudahkan Subbag Editor dalam bekerja sehingga hanya mengedit sebagian untuk menjadi konsep pidato yang utuh.

### c. Media

#### 1). Media cetak

Pada media cetak seperti Koran atau majalah biasanya juga sering mengumpulkan data melalui keliping yang diarsipkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena dari Koran Humas bisa mengetahui repon apa yang terjadi pada masyarakat atas kebijakan Pemerintah.

#### 2). Media audio / Audio Visual

Kecanggihan teknologi sekarang ini mempermudah akses informasi bagi Humas. Humas biasanya senantiasa mencari data

melalui media internet seperti Blog ataupun kata sambuta dari Menteri.

### 3). Buku / Literatur

Mengumpulkan data penunjang seperti studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan jarang sekali melihat studi literatur tanpa terkecuali Hut Riau karena keterbatasan waktu. **(Wawancara Staff Editor, Senin 06 Mei 2013).**

## 3. Menyusun Draf Pidato

### a. Pemilihan kata

Editor memilih kata dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan EYD (Ejaan yang disempurnakan).

### b. Pemilihan bahasa atau kalimat

Pemilihan bahasa atau kalimat dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur lebih diperhalus saja dari draf yang diberikan oleh SKPD ataupun mitra kerja.

## 4. *Editing* Pidato

Menurut Bapak Fuadi, Shi, M.Si sebagai Kasubbag Editor bahwa Draf atau Bahan dasar yang diberikan oleh seluruh SKPD sangat membantu dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil

Gubernur. Karena data yang diperlukan sudah ada sehingga pihak editor hanya mengedit dan merangkai kata sehingga menjadi pidato yang sempurna.

Beliau juga menambahkan bahwa jika bagian editor telah mendapat data dari SKPD maka pembuatan konsep pidato dapat selesai dalam waktu yang tidak lama dalam mengedit pidato bahkan bisa menyelesaikan satu naskah dalam waktu 2 jam dan bisa menyelesaikan 20 naskah dalam sehari (**Wawancara Kasubbag Editor, Rabu 08 Mei 2013**).

Adapun sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

- a. Salam pembuka
- b. Puji syukur dan shalwat
- c. Isi pidato tersebut
- d. Himbauan
- e. Pantun
- f. Penutup

Hal-hal penyusunan Pendahuluan, Penampilan Masalah, Penegasan Argumentatif serta Penutup dalam sebuah konsep pidato. Bapak Putra sebagai staff Bagian Editor menjelaskan bahwa penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan atau dipedomani oleh draf tersebut. Susunan atau sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan

Wakil Gubernur bersifat **Baku dan Resmi** jadi formatnya telah ditetapkan. Penyusunan pendahuluan bersifat salam pembuka, penampilan masalah berisi masalah yang terjadi, penegasan argumentatif berisi solusi dan penutup berisi salam dan pantun. Pantun selalu ada dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur karena Riau identik dengan tanah melayu (**Wawancara, Kamis 16 Mei 2013**).

Draf yang diterima dari SKPD ataupun mitra kerja hanya merupakan bahan mentah yang harus diolah lagi, draf juga merupakan pedoman dalam menulis konsep pidato. Macam-macam *editing* pidato:

**a. Contoh Pidato dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum diedit Humas.**

Contoh draf yang diedit oleh SKPD kemudian diantar ke Humas untuk sebagai pedoman dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

**SAMBUTAN GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAAN  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING, DAN  
WORKSHOP STANDARISASI LPSE  
PEKANBARU, 2 JULI 2013**

---

Yang saya hormati, Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yang saya hormati, Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Wr. Wb,**

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahummashalli 'ala Muhammad Wa'ala 'ali Muhammad.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di bumi lancang kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

**Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif, dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

#### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan, dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

#### **Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahdalam bidangPengadaan



Barang/Jasa menuju aparaturnya yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

Anak Dara Mandi Disungai

Berkemban Panjang Menutup Diri

Acara Rapat Koordinasi Dan Workshop Akan Dimulai

Semoga Mendapat Restu Illahi

Akhirnya, dengan ucapan "Bismillahirrahmanirrahim" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

**b. Contoh Pidato dari Mitra Kerja**

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL  
BANK INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA  
PERBANKAN DI PROVINSI RIAU TANGGAL 26  
OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat entrepreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus.

Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

GUBERNUR RIAU

**c. Humas**

**1). Contoh *Editing* Pidato Humas setelah diberi draf oleh SKPD**

**SAMBUTAN  
GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAANKEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING DAN WORKSHOP  
STANDARISASI LPSE  
TANGGAL, 2 JULI 2013 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Yth. Saudara Rekan-Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Wakil Gubernur Riau,

Yth. Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yth. Saudara Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia.

## **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Alhamdulillah* pada saat yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini, dalam rangka menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE.

## **Paragraf 3**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ucapan “**Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa ala ali Muhammad**“ semoga mendapat safaat pada hari akhir nanti.

## **Paragraf 4**

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Lancang Kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

## **Paragraf 5**

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

## **Paragraf 6**

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur Pemerintah harus

diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 7**

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran Pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **Paragraf 8**

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada Tanggal 1 Agustus 2012.

#### **Paragraf 9**

##### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

#### **Paragraf 10**

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

#### **Paragraf 11**

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala

ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

### **Paragraf 12**

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan dan terbentuknya profesi-karier pengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

### **Paragraf 13**

**Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.

### **Paragraf 14**

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para Narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

### **Paragraf 15**

Demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampaikan se bait pantun.

**Tuah sakti hamba negeri**

**Tuah Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji**

**Rakor Management Training dibuka secara resmi**

**Untuk peningkatan Standarisasi LPSE di Negeri ini**



**Paragraph 16**

Akhirnya, dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

**Paragraf 17**

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua.

**Terimakasih.**

**Wabillahitaufiqwalhidayah.**

**Wassalamualakum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

## **2).Contoh *Editing* Pidato Humas yang berasal dari Mitra Kerja**

### **SAMBUTAN**

#### **GUBERNUR RIAU**

#### **PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BANK INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU**

**TANGGAL 26 OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

#### **Paragraf 1**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

#### **Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, dalam rangka memupuk tali silaturahmi, berhalal bi halal khususnya dengan jajaran Bank Indonesia dan para pimpinan Perbankan serta Bank Perkreditan Rakyat se Provinsi Riau.

#### **Paragraf 3**

Selanjutnya salawat beriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia

dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at Beliau pada hari kiamat kelak.

#### **Paragraf 4**

Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini dan berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, atas nama pribadi, keluarga dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan **"minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin"** . Semoga segala amal ibadah kita, terutama dibulan suci Ramadhan yang lalu kita diberi pahala berlipat ganda oleh Allah SWT dan segala kesalahan dan dosa kita mendapat ampunan dari-Nya. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi suci seperti bayi dan menjadi pemenang di hari kebahagiaan ini. Selanjutnya dengan modal tersebut, mari kita tatap dan songsong hari depan yang lebih baik lagi.

#### **Paragraf 5**

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

#### **Paragraf 6**

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

#### **Paragraf 7**

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua

tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

#### **Paragraf 8**

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 9**

##### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat entrepreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

#### **Paragraf 10**

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

### **Paragraf 11**

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

### **Paragraf 12**

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

### **Paragraf 13**

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

### **Paragraf 14**

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

*Burung pipit hinggap dijerami*

*Terbang kembali ke angkasa*

*Kita berkumpul bersilaturahmi*

*Semoga kebersamaan dapat dipupuk sepanjang masa*

*Mari beriring, kita berjalan  
Menuju negeri yang di impikan  
Seiya sekata dalam tugas kita jalankan  
Riau yang jaya dan maju kita harapkan*

**Paragraf 15**

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

GUBERNUR RIAU

**H. M. RUSLI ZAINAL, SE, MP**

**5. Verifikasi Konsep Pidato**

Setelah konsep pidato selesai dibuat oleh staff editor maka setelah itu akan diverifikasi oleh kasubbag editor untuk mengecek hasil ataupun menambah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah diperikasa oleh Kasubbag Editor kemudian di cek kembali oleh Kabag Publikasi dan terakhir disahkan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau.

## 6. *Finishing* Pidato

Setelah dicek oleh berbagai pihak dan terakhir adalah Kepala Biro Humas maka selesailah pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kepala Biro Humas □ □ → Gubernur / Wakil Gubernur

Gambar 1.1 Alur *Finishing*  
(Sumber: Bagian Publikasi Humas Pemprov Riau)

## 7. Publikasi – Penyerah Pidato

Setelah konsep pidato selesai, langkah terakhir adalah penyerahan konsep pidato tersebut dari Humas ke Gubernur melalui Ajudan Gubernur. Adapun skema dapat dilihat sebagai berikut:

**PROTOKOL — HUMAS — AJUDAN GUBERNUR**

Gambar 1.2 Alur Penugasan  
(Sumber: Bagian Publikasi Humas Pemprov Riau)

Bagan diatas adalah jalur atau sistem tentang jalannya perintah mengenai penugasan pembuatan pidato. Bagian Publikasi hanya diberikan Tema ataupun judul kegiatan beserta tanggal kegiatan oleh pihak protokol. Setelah itu Bagian Publikasi mencari data sendiri melalui kerjasama dengan seluruh SKPD.

Adapun apabila pidato telah diselesaikan staff editor menyerahkan konsep pidato kepada Kasubbag Editor kemudian diserahkan lagi kepada

Kabag Publikasi dan terakhir diperiksa kembali oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Setelah semuanya selesai maka pidato tersebut langsung diantar kepada Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **B. Kendala-Kendala dalam Pembuatan Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.**

Dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur banyak memiliki hambatan atau kendala-kendala yaitu diantaranya adalah:

### **1. Kekurangan isi (*content*)**

Terkadang isi pidato yang dibuat Bagian Publikasi kurang lengkap. Misalnya membuat konsep pidato mengenai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, editor hanya membahas atau membuat isi mengenai Kesejahteraan Tani dan Pemberdayaan Tani. Padahal masih banyak lagi hal-hal yang juga dapat dicantumkan pada isi pidato seperti infrastruktur atau transportasi, dimana kedua hal tersebut merupakan latarbelakang dari kesejahteraan tani.

Selain itu terkadang isi pidato yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarena berbeda pandangan dan pendapat antara individu. Dilain sisi juga Sulitnya mengikuti atau menirukan sifat atau perilaku Gubernur dan Wakil Gubernur. Editor harus mampu berempati Gubernur dan Wakil Gubernur.



## **2. Waktu yang Relatif Singkat**

Keterbatasan waktu membatasi imajinasi editor. Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan jangka waktu yang relatif sangat singkat sehingga daya konsentrasi atau pemikiran dibatasi oleh waktu sehingga berpengaruh terhadap isi pidato. Editor dituntut kreatif mungkin untuk membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **3. Kekurangan Personil**

Keterbatasan personil merupakan kendala yang amat besar. Karena pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sangatlah banyak. Ditambah lagi Gubernur dan Wakil Gubernur selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang menuntut untuk tampil di depan forum. Hal tersebut tentunya mengharuskan Bagian Publikasi bekerja keras untuk memenuhi segala pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan terkadang *subbag editor* harus lembur bekerja hingga malam (**Wawancara Staff Editor, Senin 13 Mei 2013**).

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Mekanisme Kerja Humas dalam Membuat Konsep Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur**

Pada bab ini penulis menganalisis data yang telah disajikan pada Bab III yang sesuai dengan permasalahan. Adapun analisa yang penulis gunakan yaitu teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

Analisa data kualitatif adalah teknik upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun tujuan analisa data adalah untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian. Analisa penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Menyusun *Out Line* Pidato.**

Garis-garis besar (outline) pidato merupakan pelengkap yang amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan keharusan bagi pembicara baru. Garis besar adalah peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Peta ini memberikan petunjuk dan arah yang akan dituju. Garis besar yang salah akan mengacaukan

pembicaraan, begitu juga sebaliknya garis besar yang teratur akan menertibkan pembicaraan.

Analisa penulis sesuai dengan **Paragraf 15 hal 76** bahwa sistem lambang yang dibuat oleh staff editor tidak sesuai dengan teori atau sitem lambang yang baik. Dapat dilihat pada paragraph berikut ini.

Berdasarkan Permen ESDM No.01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk transportasi darat, dilaksanakan oleh:

- Penetapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *Untuk Transportasi Jalan*, mulai berlaku untuk jenis:
  1. Kendaraan dinas tehitung mulai **Tanggal 1 Februari 2013**
  2. dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) berlaku mulai **Tanggal 1 Maret 2013**
- pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu *untuk Transportasi Laut*, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.

Analisa penulis sesuai dengan teori bahwa outline yang baik itu adalah:

Bentuk garis besar bermacam-macam, tetapi ada pedoman yang sama untuk membuat garis besar yang baik. Adapun Ciri-ciri garis besar yang baik adalah:

- a. Garis besar terdiri dari tiga bagian : pengantar, isi, dan penutup. Dapat membaginya menjadi lima bagian: perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Perhatian ditempatkan pada pengantar; kebutuhan, pemuasan, dan visualisasi. Pada isi; tindakan pada penutup pidato.

- b. Lambang yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tidak boleh membingungkan. Sistem lambang yang tidak tertib akan mengaburkan pikiran penunjang. Ada dua macam sistem lambang yaitu sistem angka dan sistem kombinasi.
- c. Pikiran pokok dan penunjang dibedakan dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Pernyataan yang mempunyai kedudukan sama berada pada garis vertical yang sama pula.

Contoh: jurnalistik mencakup bermacam-macam pekerjaan :

- 1). Dalam media surat kabar: reporter, penyunting, pembaca naskah dan sebagainya,
- 2). Dalam kantor berita ; reporter, juru potret, penyunting dan sebagainya.

Jadi dapat dikatakan bahwa out line pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sistem lambangnya belum baik namun indikator out line lainnya sudah baik dilakukan dimana garis besar yang baik dimana terdiri atas tiga bagian yaitu: pengantar, isi dan penutup. Dan telah dapat membaginya menjadi lima bagian: perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi dan tindakan. Perhatian ditempatkan pada pengantar; kebutuhan, pemuasan, dan visualisasi pada isi; tindakan penutup pidato. Semua unsur-unsur tersebut telah termuat pada pidato Gubernur dan wakil Gubernur.

Analisa penulis mengenai prinsip penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sesuai dengan teori yang meliputi :

**a. Kesatuan**

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terdiri atas tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, tanda tanya atau persepsi yang berbeda. Perihal materi atau isi telah memiliki satu gagasan yang mendominasi seluruh uraiannya.

Dapat dilihat pada **Paragraf 9 hal 75** yang menjelaskan bahwa isi memiliki satu gagasan yang mendominasi isi keseluruhannya, dapat dilihat sebagai berikut:

**Paragraf 9**

**Hadirin yang saya Hormati,**

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya memberikan subsidi atau bantuan berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan subsidi yang diberikan seperti pupuk, energy, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**b. Hubungan**

Seluruh uraian pidato memiliki hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diterapkan dapat dilihat pada **paragraf 6, paragraf 7 dan 8 Hal 74** dimana pada paragraf tersebut menjelaskan hubungan antara uraian satu dan lainnya. Selain itu juga memberikan ilustrasi yang berbeda namun berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

## **Paragraf 6**

### **Hadirin yang saya Hormati,**

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang timbul, permasalahan itu antara lain berkaitan dengan kurangnya sosialisasi peraturan Menteri ESDM dimaksud, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya kesadaran pengguna BBM bersubsidi yang tidak berhak menikmati sesuai amanat peraturan tersebut.

## **Paragraf 7**

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, saya himbau kepada semua elemen Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab / Kota agar secara bersama-sama untuk berkoordinasi, mensosialisasi, memfasilitasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dimaksud.

## **Paragraf 8**

Saya juga menghimbau agar pemerintah Kab / Kota dalam menjalankan tugasnya meminimalisir permasalahan yang muncul dalam penyaluran Bahan bakar Minyak Bersubsidi, juga menyusun langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak agar tepat sasaran dan mensosialisasikan dan memfasilitasi program dimaksud di daerah.

### **c. Penekanan**

Dalam penulisan naskah pidato, hal-hal yang perlu diterapkan ditebalkan, dimiringkan atau juga diberi garis bawah sehingga ketika menyampaikan pidato, Gubernur dan Wakil Gubernur mengetahui bahwa ia harus menekankan bagian yang bertanda khusus tersebut.

Seperti terlihat jelas dalam paragraf Hal 73 dimana tema ditebalkan karena dianggap penting dan merupakan pedoman uraian berikutnya.

#### **Paragraf 4**

**“Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri ESDM NO. 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak”**

## **2. Mengumpulkan Data/ Informasi**

Data atau informasi yang diperoleh harus disusun kembali dan mengemas data dan informasi menjadi satu pidato yang utuh. Data informasi bisa saja didapatkan dari SKPD ataupun mitra kerja dan media internet.

### **a.SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Mitra Kerja Non SKPD.**

Humas biasanya mengumpulkan data atau informasi melalui SKPD ataupun Mitra Kerja terkait pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Koordinasi antara Humas dengan SKPD diatur oleh Pergub Riau No. 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Analisa penulis bahwa koordinasi dengan SKPD atau Mitra Kerja dengan pihak Humas adalah upaya yang sangat baik karena data akan lebih akurat dan validasi kebenarannya sudah teruji. Selain itu kita tahu bahwa Humas tidak mungkin mengetahui segala data dan informasi mengenai SKPD atau Mitra kerja yang bernaung di Provinsi Riau. Jadi,

koordinasi atau kerja sama dengan SKPD ataupun Mitra kerja merupakan hal yang baik.

#### **b. Buku / Literatur**

Mencari data informasi tidak hanya melalui SKPD ataupun Mitra kerja tetapi juga harus mencari data penunjang. Mengumpulkan data penunjang seperti studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan jarang sekali melihat studi literatur tanpa terkecuali Hut Riau.

Buku sangat bagus menjadi data penunjang dalam membuat konsep pidato karena akan dapat menunjukkan seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan kredibilitas. Seluruh pidato Gubernur dan Wakil Gubernur baik tentang SKPD ataupun Mitra Kerja tidak ada membuka buku melainkan Hut Riau. Hal kebiasaan buruk ini harusnya dapat dirubah.

Analisa penulis disesuaikan dengan teori aristoteles ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia. *Pertama*, harus sanggup menunjukkan kepada khalayak memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat(ethos). *Kedua*, harus menyentuh hati khalayak : perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang (pathos). *Ketiga*, meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti dilihat pada respon khalayak (logos).



Salah satu komponen penting kredibilitas adalah otoritas. Memiliki otoritas artinya memiliki keahlian yang diakui. Hal-hal yang membuat seseorang memiliki otoritas adalah :

1. Otoritas dibentuk karna orang melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman
2. Dalam kredibilatas adalah *good sense*. Pendengar menyukai dan akhirnya menerima gagasan yang dikemukakan oleh pembicara yang di pandang objektif. Membangun citra objektif terdiri atas :
  - a. Menggunakan pendekatan rasional dan argumentasi yang logis.
  - b. Menghindari penjulukan atau memilih kata-kata.
  - c. Menghindari sikap tidak jujur dalam menyajikan informasi seperti dengan sengaja menutup informasi yang sudah sangat dikenal khalayak.
  - d. Tidak menggurui pendengar maksudnya ialah memperlakukan pendengar sebagai rekan, saudara atau mitra dalam mencari kebenaran.
3. *Good sense* erat kaitannya dengan *good character*(prilaku yang baik) yang merupakan komponen kredibilitas yang ketiga. Prilaku yang baik yaitu termasuk kejujuran, integritas, dan ketulusan. Pendengar akakn tertarik pada tokoh yang terkenal jujur, yang tidak mudah di beli, yang telah berbuat banyak untuk masyarakat.
4. *Good will* artinya pendengar akan tertarik mendengar pidato yang disampaikan jika mereka tau bahwa pidato tersebut berbicara untuk

kepentingan mereka. membangun *good will* melalui proses ko – orientasi. Yakni mencari kesamaan antara pembicara dengan pendengar dalam perbuatan, sikap dan nilai. Ciptakan kesan bahwa keperluan mereka adalah keperluan pembicara, kerugian mereka adalah kerugian anda, dan kecemasan mereka adalah kecemasan anda. Satukan pembicara secara psikologis dengan seluruh pendengar. Teknik lain untuk membangun *good will* adalah menunjukkan keterlibatan pribadi (komitmen).

5. *Dinamisme* adalah ekspresi fisik dari komitmen psikologis pembicara terhadap topik bila anda memandang serius pembicaraan anda, suara dan gerak anda juga kelihatan serius. Semangat, begitu juga kelesuan.

Etos di tunjukan dalam kualifikasi (kesan yang baik mengenai anda).

Contohnya yang menimbulkan etos :

1. Pernyataan yang mengenai sumber-sumber yang anda kutip
2. Pernyataan yang menunjukkan keterlibatan anda dalam studi yang relevan dengan pembicaraan
3. Pernyataan yang mengacu pada posisi, penghargaan, atau prestasi yang dicapai
4. Pernyataan yang menunjuk pada peristiwa, orang atau tempat penting yang berkaitan dengan topik anda (Jalaludin Rakhmat, 2002: 71).

### 3. Menyusun Draf Pidato

#### a. Pemilihan Kata

Pemilihan kata berdasarkan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

#### b. Pemilihan Bahasa atau Kalimat

Pemilihan bahasa yang lebih diperhalus kata-katanya.

Analisa penulis bahwa pemilihan kata berdasarkan EYD dan pemilihan bahasa yang lebih diperhalus belum cukup untuk membuat sebuah konsep pidato yang baik dan benar karena berdasarkan teori bahwa pemilihan kata dan bahasa itu terdiri atas:

#### a. Kata-kata harus jelas

Bahwa kata-kata yang dipilih tidak boleh menimbulkan arti ganda (ambigues), tetap dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. Untuk mencapai kejelasan seperti itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

##### 1). Gunakan istilah yang spesifik (tertentu)

Ada kata-kata yang terlalu umum sehingga mengundang tafsiran bermacam-macam. Ada pula kata-kata yang artinya sudah tertentu. “ia mengajar saya bahasa inggris” lebih spesifik daripada “ia mendidik saya”.

2). Gunakan kata-kata yang sederhana

Berpidato adalah berkomunikasi karena nilai komunikasinya, kata-kata yang diucap harus dapat dipahami dengan cepat.”konsep-konsep kaum politisi yang sarat dengan fantasi dan delusi” adalah kalimat yang sulit dicerna.

3). Hindari istilah-istilah teknis

Ciri dunia modern ialah berkembangnya spesialisasi yang mempertinggi kemampuan, tetapi juga menkotak-kotak manusia dalam dunianya sendiri. Masing-masing mengembangkan kata-kata yang dipahami oleh mereka sendiri sedangkan bagi orang lain istilah tersebut adalah membingungkan.

4). Berhemat dalam penggunaan kata-kata

Seringkali kalimat yang panjang menjadi jelas setelah kata-kata yang berlebihan dibuang. Seperti “ adalah suatu keharusan bagi seorang guru untuk menaruh perhatian yang tinggi kepada siswa-siswanya”, kalimat ini lebih jelas diganti dengan “ guru harus memperhatikan sekali siswa-siswanya”. Termasuk penghematan kata adalah menghindari gejala-gejala kerancuan (kontaminasi).

5). Gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda.

#### **4. *Editing* Pidato**

##### **a. Contoh Pidato dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum diedit Humas.**

Contoh draf yang diedit oleh SKPD kemudian diantar ke Humas untuk sebagai pedoman dalam membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

**SAMBUTAN GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAAN  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING, DAN  
WORKSHOP STANDARISASI LPSE  
PEKANBARU, 2 JULI 2013**

---

Yang saya hormati, Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yang saya hormati, Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Wr. Wb,**

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi Besar

Muhammad SAW, dengan ucapan Allahummashalli 'ala Muhammad Wa'ala 'ali Muhammad.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di bumi lancang kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif, dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan, dan terbentuknya profesi-karierpengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

### **Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahdalam bidangPengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

Anak Dara Mandi Disungai

Berkemban Panjang Menutup Diri

Acara Rapat Koordinasi Dan Workshop Akan Dimulai

Semoga Mendapat Restu Illahi

Akhirnya, dengan ucapan "Bismillahirrahmanirrahim" Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training, dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

**b. Contoh Pidato dari Mitra Kerja**

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL  
BANK INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA  
PERBANKAN DI PROVINSI RIAU TANGGAL 26  
OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

- Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau
- Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau
- Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran
- Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau
- Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.



**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

## **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat enterpreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

**GUBERNUR RIAU**

c. Contoh *Editing* Pidato Humas setelah diberi draf oleh SKPD

**SAMBUTAN  
GUBERNUR RIAU  
PADA ACARA PEMBUKAANKEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI, MANAGEMENT TRAINING DAN WORKSHOP  
STANDARISASI LPSE  
TANGGAL, 2 JULI 2013 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Yth. Saudara Rekan-Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Wakil Gubernur Riau,

Yth. Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

Yth. Saudara Para Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,

Yth. Saudara Para Narasumber, Peserta Rapat Koordinasi se-Indonesia serta hadirin yang berbahagia.

**Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Alhamdulillah* pada saat yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini, dalam rangka menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE.

**Paragraf 3**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ucapan "**Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa ala ali Muhammad**" semoga mendapat safaat pada hari akhir nanti.

#### **Paragraf 4**

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Lancang Kuning dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi turut hadir untuk mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI serta kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara kegiatan dimaksud pada hari yang berbahagia ini.

#### **Paragraf 5**

##### **Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan kultur birokrasi Indonesia sedang menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan dan contoh teladan bagi masyarakat, hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam agenda reformasi birokrasi.

#### **Paragraf 6**

Agenda reformasi ini dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, perilaku koruptif dan masih banyak lagi citra birokrasi yang bersifat kontra produktif. Dengan demikian, reformasi birokrasi aparatur Pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui upaya penataan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, termasuk perbaikan akhlak-moral, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 7**

Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan dan pembaharuan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar pengeluaran Pemerintah diperuntukkan bagi sektor pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarannya, serta sistem pengadaan barang/jasa yang baik menjadi salah satu indikator bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **Paragraf 8**

Upaya mereformasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan, strategi dan langkah yang berdimensi luas terhadap perwujudan *good governance*. Terkait dengan kebijakan dalam bidang legislasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan terakhir kali dirubah melalui Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada Tanggal 1 Agustus 2012.

**Paragraf 9**

**Hadirin dan Peserta Rapat yang berbahagia,**

Dengan telah diundangkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, maka selanjutnya seluruh proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik menggunakan Dana APBN maupun APBD harus mengacu pada aturan main yang telah ditetapkan.

**Paragraf 10**

Namun demikian, meskipun kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah sudah cukup jelas diatur dalam pasal-pasal, saya yakin belum semua prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

**Paragraf 11**

Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pengadaan tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan *mismanagement* atau *human error* dalam proses pengadaan yang menyebabkan para pelaku pengadaan dapat terjerat sanksi pidana, perdata, atau sanksi administratif. Hal yang demikian itu tidak perlu terjadi apabila pemahaman dari para pelaksana pengadaan terhadap segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atas Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dipahami dengan benar.

**Paragraf 12**

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas para pelaksana pengadaan barang/jasa yang disertai dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan pengadaan dan terbentuknya profesi-karier pengadaan yang membanggakan, merupakan upaya yang harus terus didorong untuk mewujudkan profesionalisme pelaksana pengadaan barang/jasa.

**Paragraf 13**

**Hadirin dan Peserta Rapat yang saya hormati,**

Sejalan dengan hal tersebut, sehubungan dengan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik, serta dalam rangka peningkatan kapasitas personil, maka Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE ini juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa menuju aparatur pengadaan yang profesional dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah soal

standarisasi LPSE, dimana setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.

**Paragraf 14**

Oleh karenanya marilah kita manfaatkan moment ini dan kita simak dengan sebaik mungkin pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para Narasumber dari LKPP RI dan Lembaga Sandi Negara.

**Paragraf 15**

Demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampaikan seabait pantun.

**Tuah sakti hamba negeri**

**Tuah Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji**

**Rakor Management Training dibuka secara resmi**

**Untuk peningkatan Standarisasi LPSE di Negeri ini**

**Paragraph 16**

Akhirnya, dengan mengucapkan ”**Bismillahirrahmanirrahim**”Kegiatan Rapat Koordinasi, Management Training dan Workshop Standarisasi LPSE, secara resmi dibuka.

**Paragraf 17**

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua.

**Terimakasih.**

**Wabillahitaufiqwalhidayah.**

**Wassalamualakum Wr. Wb.**

Pekanbaru, 2 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

**d. Contoh *Editing* Pidato Humas yang berasal dari Mitra Kerja**

**SAMBUTAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PADA ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BANK  
INDONESIA PEKANBARU DENGAN PARA PERBANKAN DI PROVINSI  
RIAU**

**TANGGAL 26 OKTOBER 2007 DI PEKANBARU**

---

**Paragraf 1**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

Yth. Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau

Yth. Rekan-rekan Muspida Provinsi Riau

Yth. Pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru, Saudara Gatot Sugiono beserta Staf dan jajaran

Yth. Saudara-saudara Para Kepala Dinas/Instansi dilingkup Provinsi Riau

Yth. Saudara-saudara para Pimpinan Bank-bank Umum dan BPR di Provinsi Riau, para Pelaku Dunia Usaha, para undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Paragraf 2**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, dalam rangka memupuk tali silaturahmi, berhalal bi halal khususnya dengan jajaran Bank Indonesia dan para pimpinan Perbankan serta Bank Perkreditan Rakyat se Provinsi Riau.

**Paragraf 3**

Selanjutnya salawat beriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam berilmu pengetahuan dan teknologi



seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at Beliau pada hari kiamat kelak.

#### **Paragraf 4**

Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini dan berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, atas nama pribadi, keluarga dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan **"minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin"**. Semoga segala amal ibadah kita, terutama dibulan suci Ramadhan yang lalu kita diberi pahala berlipat ganda oleh Allah SWT dan segala kesalahan dan dosa kita mendapat ampunan dari-Nya. Mudah-mudahan kita semua kembali menjadi suci seperti bayi dan menjadi pemenang di hari kebahagiaan ini. Selanjutnya dengan modal tersebut, mari kita tatap dan songsong hari depan yang lebih baik lagi.

#### **Paragraf 5**

**Bapak/Ibu, Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus perhatian kita semua, terutama selaku pelaku pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Terakhir sampai triwulan II tahun 2007 ini perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Untuk diketahui pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yakni sebesar 7,28%. Pertumbuhan ekonomi Riau tersebut lebih ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ekspor.

#### **Paragraf 6**

Kondisi ekonomi Riau seperti ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa telah terjadi akumulasi kegiatan pembangunan diberbagai sektor, terutama dibidang perekonomian. Membaiknya ekonomi Riau ini salah satunya adalah berkat adanya peningkatan kredit perbankan, yakni sebesar 4,04%, sehingga posisi kredit saat ini menjadi Rp. 14.568.211 juta. Yang menarik dari jumlah itu, tercatat sebesar Rp. 10.044.830 juta atau sebesar 68,95% adalah kredit kepada sektor UMKM. Diharapkan kondisi ini akan dapat mendorong sektor ril untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

#### **Paragraf 7**

Suatu hal yang menggembirakan kita semua, sebagai akibat dampak positif pertumbuhan ekonomi Riau tersebut, tingkat kemiskinan di Riau pada dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada

tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau sebesar 14,67 % dan pada tahun 2005 berkurang sebesar (1,34 %) menjadi 13,35 %. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka secara konsisten setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti tahun 2005 sebesar 13,91 %, pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik pada periode Februari 2007 telah pula mengalami penurunan menjadi 10,39 % (BPS 2007).

### **Paragraf 8**

Kita ke depan tentu berharap kemajuan ekonomi yang signifikan yang selama ini dirasakan, yakni melalui berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Riau yang bersinergi secara harmonis dengan pihak perbankan selama ini, kiranya terus dapat kita tingkatkan, sehingga benar-benar membawa perbaikan yang sangat tajam terhadap ekonomi Riau di masa yang akan datang.

### **Paragraf 9**

#### **Hadirin yang saya hormati,**

Selama kurun waktu 3,5 tahun membangun akses kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan membangun jiwa, pengetahuan dan semangat enterpreneur masyarakat, telah berdampak positif kepada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 13,91 %, dan pada tahun 2006 turun menjadi 11,46 % dan data terakhir yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, yakni pada periode Februari 2007, angka pengangguran di Riau telah mengalami penurunan hingga menjadi 10,39 %. Indikator-indikator tadi, minimal telah menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

### **Paragraf 10**

Semua ini tentulah berkat upaya yang kita lakukan bersama selama ini. Peranan dunia perbankan, melalui komitmennya terhadap peningkatan perekonomian Riau dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, sungguh sangat besar sekali. Namun ini semua tentu perlu kita sinergikan terus menerus. Dalam rangka itu, maka kami menyambut baik dan sangat mendukung sekali, bahwa jumlah Bank Umu di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 34 bank. Apalagi dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi 2 bank. Dan kami juga sangat gembira, dari sekian jumlah bank-bank umum tadi, didukung oleh sebanyak 65 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu dan 156 kantor kas/simpan pinjam.

### **Paragraf 11**

Disamping itu, pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah mencapai 20 BPR dan 10 BPR lagi sedang dalam proses perizinannya, tentu semua ini akan semakin dapat meningkatkan kredit perbankan kepada masyarakat

dan dunia usaha di Riau. Apalagi dengan asset perbankan di Riau yang saat ini telah mencapai Rp. 33,88 triliun, kemudian dana pihak ketiga yang dikelola pihak perbankan sebesar Rp.29,46 dan kredit sebesar Rp.15,30 triliun, semua ini tentu akan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang.

#### **Paragraf 12**

Pemerintah Provinsi Riau termasuk Kabupaten/Kota, sangat berharap bagaimana segala persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di daerah, seperti masalah kesejahteraan, sumber daya manusia dan infrastruktur, sebagaimana Program K2-i yang tengah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat sama-sama kita jalankan secara bersama-sama dan lebih bersinergi, sehingga nantinya akan sama-sama kita tuai hasil yang akan memberikan membanggakan bagi kita bersama pula, terutama bagi masyarakat.

#### **Paragraf 13**

Sekali lagi ke depan, kami mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan para perbankan di Riau, sehingga Program K2-I itu benar-benar terealisasi dengan baik. Lebih dari itu kami juga berharap, format dan manajemen perbankan di Riau akan semakin mampu membuat berbagai terobosan baru, sehingga disamping membawa dunia perbankan di Riau semakin lebih baik dan semakin sehat, juga putaran dananya dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Riau, sebagai upaya kita bersama menuju **Visi Riau 2020**, yang merupakan tekad dan tujuan pembangunan Riau di masa depan.

#### **Paragraf 14**

##### **Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

*Burung pipit hinggap dijerami  
Terbang kembali ke angkasa*

*Kita berkumpul bersilaturahmi*

*Semoga kebersamaan dapat dipupuk sepanjang masa*

*Mari beriring, kita berjalan*

*Menuju negeri yang di impikan*

*Seiya sekata dalam tugas kita jalankan*

*Riau yang jaya dan maju kita harapkan*

**Paragraf 15**

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi segala usaha kita bersama.

**Terima kasih.**

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Pekanbaru, 26 Oktober 2007**

GUBERNUR RIAU

**H. M. RUSLI ZAINAL, SE, MP**

Analisa penulis bahwa editing pidato dari Humas kurang baik, karena merupakan salinan dari draf SKPD. Seharusnya tatanan bahasa dan kalimatnya harus lebih bervariasi agar pidato terlihat lebih menarik dan tidak terlalu kaku.

**5. Verifikasi Konsep Pidato**

Setelah konsep pidato selesai dibuat oleh staff editor maka setelah itu akan diverifikasi oleh kasubbag editor untuk mengecek hasil ataupun menambah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah diperikasa oleh Kasubbag Editor kemudian di cek kembali oleh Kabag Publikasi dan terakhir disahkan oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Analisa penulis verifikasi sangat baik dilakukan karena pidato Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan berbagai penyaringan ide baik itu melalui SKPD, Staf Editor, Kasubbag Editor, Kabag Publikasi dan yang terakhir adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk penyempurnaan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, ide atau gagasan pidato murni dari SKPD dan Humas. Humas tidak ada koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pidato yang akan disampaikan.

## **6. *Finishing* Pidato**

Setelah dicek oleh berbagai pihak dan terakhir adalah Kepala Biro Humas maka selesailah pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Analisa penulis penyelesaian konsep pidato tersebut memang sudah cukup baik karena telah mengalami berbagai proses penyaringan hingga selesai menjadi satu konsep yang utuh.

## **7. Publikasi – Penyerah Pidato**

Setelah konsep pidato selesai, langkah terakhir adalah penyerahan konsep pidato tersebut dari Humas ke Gubernur melalui Ajudan Gubernur. Adapun skema dapat dilihat sebagai berikut:

**PROTOKOL — HUMAS — AJUDAN GUBERNUR**

(Sumber: Bagian Publikasi)

Bagan diatas adalah jalur atau sistem tentang jalannya perintah mengenai penugasan pembuatan pidato. Bagian Publikasi hanya diberikan Tema ataupun judul kegiatan beserta tanggal kegiatan oleh pihak protokol. Setelah itu Bagian Publikasi mencari data sendiri melalui kerjasama dengan seluruh SKPD.

Adapun apabila pidato telah diselesaikan staff editor menyerahkan konsep pidato kepada Kasubbag Editor kemudian diserahkan lagi kepada Kabag Publikasi dan terakhir diperiksa kembali oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Setelah semuanya selesai maka pidato tersebut langsung diantar kepada Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Humas Pemerintah Provinsi Riau memiliki berbagai bagian, salah satunya Bagian Publikasi yang terdiri oleh subbagian. Editor merupakan subbagian dari publikasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yakni membuat konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur berawal dari draf yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mitra kerja yang terangkum oleh nota dinas kepada pihak Humas.

Meskipun pembuatan konsep pidato ini bersifat editor namun ada beberapa langkah dalam membuat konsep pidato Gubernur dan wakil Gubernur yaitu:

1. Menyusun out line pidato
2. Menyusun data / informasi
3. Menyusun draf pidato
4. *Editing* pidato
5. Verifikasi pidato
6. *Finishing* pidato
7. Publikasi – penyerah pidato

Adapun sistematika penulisan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sangatlah berbeda dengan konsep pidato pada umumnya. Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat tetap, baku dan resmi. Ada halnya konsep pidato secara umum tidak dapat diterapkan dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur sepenuhnya belum bisa mengaplikasikan teori. Dimana konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur ada beberapa hal yang belum diterapkan yakni kurangnya membuka studi literatur, penggunaan bahasa yang belum bervariasi masih terlalu kaku. Namun prinsip penyusunan naskah pidato telah diterapkan semua pada konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas kesatuan, hubungan dan penekanan. Konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur *pertama*, memiliki kesatuan antara isi dan tujuan artinya tidak melenceng dari tema kegiatan. *Kedua*, memiliki hubungan antara uraian satu yang lainnya jika memberikan ilustrasi hal tersebut relevan dengan tema kegiatan yang artinya berhubungan. *Ketiga*, memiliki penekanan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang dianggap penting untuk disampaikan selalu ditulis dengan tebal, dimiringkan dan sebagainya sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur mengetahui untuk menekankan tulisan tersebut.



## **B. Saran**

### **1. Staff Editor**

#### **a. Masalah bahasa**

Adapun saran ataupun masukan dari penulis terhadap Bagian Publikasi khususnya Sub Bagian Editor yakni harus mampu menguasai atau lebih memperdalam ilmu bahasa dan dapat membuat pidato. Karena bahasa merupakan alat komunikasi yang memberikan pemahaman persepsi kepada pendengar.

Pemilihan kata dan bahasa juga harus sangat diperhatikan karena salah satu unsure teori aristoteles bahwa bahasa juga mempengaruhi dihadapan khalayak. Yakni unsur *pathos* menunjukkan imbauan emosional dengan kata-kata yang terpilih, dengan kalimat yang bervariasi dalam menyampaikan orator di forum.

#### **b. Masalah lambang dalam out line pidato**

Lambang yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tidak boleh membingungkan. Sistem lambang yang tidak tertib akan mengaburkan pikiran penunjang. Ada dua macam sistem lambang yaitu sistem angka dan kombinasi.

Sistem lambang yang digunakan editor dalam konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memenuhi kriteria

bukan sistem angka dan bukan sistem kombinasi. Kesalahan lambang akan membuat pemahaman berbeda dan akan membingungkan.

### **c. Mengumpulkan data**

Data memang diperoleh dari SKPD ataupun mitra kerjanamun juga sebaiknya menambahkan data penunjang melalui studi literature karena akan berbeda isi, wawasan dan kutipan yang lebih berbobot jika membuka studi literatur.

Sudi literature mempengaruhi factor ethos pada teori Aristoteles dimana ethos merupakan kredibilitas sumber (*source credibility*)dimana pengetahuan berlandaskan pendidikan formal ditambah hasil studi literatur mengenai segala aspek kehidupan yang begitu mendalam dan meluas.

## **2. Protokol**

Dilain sisi juga perlu diperhatikan bahwa jarak waktu penugasan pembuatan pidato sebaiknya seminggu sebelum hari kegiatan sehingga editor lebih memiliki daya waktu berpikir yang lebih lama tanpa harus bekerja dengan dikejar waktu.

### **3. Gubernur**

Selain itu penulis juga memberikan masukan kepada Gubernur dan wakil Gubernur untuk menambah personil Bagian publikasi khususnya Subbag Editor. bahwa kekurangan personil (editor) dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur membuat staff editor kewalahan. Oleh karenanya tidak salah untuk menambah personil lainnya namun dalam arti personil yang berpengalaman dibidangnya ataupun profesional dalam pembuatan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta
- Effendi, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kriyanto, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. PT Kencana, Jakarta
- Kurniati, Prima. 2008. *Mekanisme Kerja Sri Junjungan Televisi (SJTV) Bengkalis Dalam Menyiarkan Program Acara “Dondang Sayang”* . Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau
- Kusumaningrat hikmat dkk. 2009. *Jurnalistik Teori & Praktek*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad. 2004. *Menjadi Orator Ulung*, PT Grasindo. Jakarta
- Murfhy, Mohammad Ary. 2009. *Mekanisme Kerja Program Acara Siaran Forum Dialog Di TVRI Riau*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau
- Rogers, Natali. 1982. *Berani Berbicara didepan Publik*. Nuansa. India Muflih
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Retorika Modern Pendekatan Praktis*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Rumpoko, Hadi. 2012. *Panduan Pidato Luar Biasa*. Megabooks, Yogyakarta
- Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan Konsepsi&Aplikasi*.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaja, H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Reneka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Komunikasi dan Humas*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-menulis.html>
- <http://ssgpelajarbahasa.blogspot.com/2011/11/kaitan-retorika-dengan-pidato.html>

